

**KONDISI SOSIAL-EKONOMI  
MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II :  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**HASIL BME**



**KONDISI SOSIAL-EKONOMI  
MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II:  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**HASIL BME**

MITA NOVERIA  
ASWATINI  
DEWI HARFINA  
MEIRINA AYUMI MALAMASSAN



LIPI

COREMAP-LIPI  
PUSAT PENELITIAN KEPENDUDUKAN  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
(PPK-LIPI), 2008



COREMAP-LIPI



## RANGKUMAN

**C**OREMAP, program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang yang berskala nasional, mulai dilaksanakan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2005. Program ini mencakup 37 desa/kelurahan terpilih di sepuluh kecamatan kepulauan serta pesisir dan dataran rendah di kabupaten ini. Hanya dua kecamatan dataran tinggi, yaitu Tondong Tallasa dan Balocci, dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkep yang tidak terpilih sebagai lokasi kegiatan COREMAP.

Kegiatan COREMAP tidak terbatas hanya pada pengelolaan terumbu karang dan sumber daya laut dalam arti fisik. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan aspek sosial ekonomi, seperti peningkatan kesadaran masyarakat terhadap manfaat penting terumbu karang (dan oleh karena itu perlu dijaga kelestariannya) serta perbaikan kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi fokus kegiatan COREMAP. Kesadaran yang tinggi untuk menjaga kelestarian terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya sangat diperlukan untuk mencegah masyarakat dari berbagai kegiatan yang merusak sumber daya tersebut. Selain itu, dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, masyarakat juga dapat dijauhkan dari kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber daya laut yang bersifat berlebihan dan merusak.

Manfaat langsung kegiatan COREMAP terhadap kehidupan (ekonomi) masyarakat baru dirasakan setelah sekitar tiga tahun program ini berjalan, yaitu pada kuartal kedua tahun 2008 di Kelurahan Pundata Baji (Kecamatan Labakkang) dan pertengahan tahun 2008 di Desa Mattiro Bombang (Kecamatan Liukang Tupabbiring). Ini setelah cairnya dana bergulir yang dikenal dengan *seed fund* yang penggunaannya adalah untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif, khususnya penciptaan mata pencaharian alternatif

bagi masyarakat di lokasi COREMAP. Namun dalam kenyataannya, *seed fund* tidak selamanya digunakan untuk mengembangkan mata pencaharian alternatif karena banyak di antara penerimanya yang menggunakan dana bantuan untuk meningkatkan usaha yang selama ini telah mereka geluti, termasuk yang terkait dengan eksploitasi sumber daya laut. Karena dana untuk bantuan modal usaha ekonomi bagi masyarakat baru saja dicairkan sekitar satu sampai dua bulan sebelum penelitian dilaksanakan, maka sulit untuk menilai manfaat kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan COREMAP terhadap perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.

Meskipun sudah berlangsung selama sekitar tiga tahun, capaian program COREMAP dapat dikatakan masih belum memadai. Hal ini terlihat dari terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan program tersebut beserta berbagai kegiatan yang dilaksanakannya. Mereka yang mengetahui tentang program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang tersebut hanya terbatas pada sebagian anggota masyarakat yang mata pencahariannya sangat bergantung pada sumber daya laut. Padahal, idealnya pengetahuan mengenai COREMAP juga harus dimiliki oleh mereka yang tidak menggantungkan kehidupan ekonomi pada sumber daya laut agar program ini mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan sedikitnya jumlah anggota masyarakat di lokasi penelitian yang mengetahui keberadaan COREMAP, mereka yang terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan program ini juga terbatas jumlahnya. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, sosialisasi COREMAP tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kedua, banyak anggota masyarakat yang tidak tertarik dengan kegiatan-kegiatan Coremap karena pada awal pelaksanaannya kegiatan lebih ditekankan pada hal-hal yang tidak terkait langsung dengan kondisi ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Jika faktor pertama yang lebih dominan, maka diperlukan kegiatan sosialisasi yang lebih intensif untuk mencapai keberhasilan program di masa mendatang. Sebaliknya, jika penyebab kedua yang lebih dominan, maka setelah berjalannya kegiatan-kegiatan yang secara langsung terkait dengan (perbaikan) kondisi

ekonomi masyarakat, akan lebih di antara mereka yang terlibat dalam program ini.

Penelitian ini menemukan adanya peningkatan pendapatan masyarakat (yang diwakili oleh 122 dan 120 rumah tangga terpilih di Desa Mattiro Bombang dan Kelurahan Pundata Baji secara berturut-turut) dalam kurun waktu dua tahun, sejak tahun 2006 sampai dengan 2008. Peningkatan pendapatan yang signifikan ditemukan di antara rumah tangga sampel di Desa Mattiro Bombang. Pada tahun 2006 pendapatan rata-rata rumah tangga terpilih sebesar Rp. 547.250,- per bulan, sementara dua tahun setelahnya (2008) meningkat menjadi Rp. 958.750,- setiap bulan. Jika dilihat dari pendapatan per kapita, terjadi peningkatan dari Rp. 116.960,- setiap bulan menjadi Rp. 195.350,- per bulan selama kurun waktu dua tahun tersebut. Selanjutnya, di Kelurahan Pundata Baji pendapatan rata-rata rumah tangga sampel pada tahun 2006 adalah Rp. 1.137.570,- per bulan. Jumlah ini meningkat menjadi Rp. 1.168.725,- per bulan pada tahun 2008. Hal yang sama juga terjadi pada pendapatan per kapita, dengan peningkatan dari Rp. 222.320,- setiap bulan pada tahun 2006 menjadi Rp. 236.600,- setiap bulan pada tahun 2008.

Peningkatan pendapatan juga dapat dilihat dari distribusi pendapatan penduduk di lokasi penelitian, terutama di Desa Mattiro Bombang. Jika pada tahun 2006 sekitar 61 persen rumah tangga sampel di desa ini mempunyai pendapatan rata-rata kurang dari Rp. 500.000,- dalam sebulan, pada tahun 2008 proporsi rumah tangga dengan jumlah pendapatan tersebut berkurang menjadi 34,4 persen. Kondisi yang sebaliknya terjadi pada rumah tangga dalam kelompok pendapatan yang lebih besar. Hanya 1 persen di antara seluruh rumah tangga sampel pada tahun 2006 yang berpenghasilan lebih dari Rp. 3.000.000,- per bulan. Pada tahun 2008 proporsi rumah tangga yang berpenghasilan lebih dari Rp. 3.000.000,- meningkat menjadi 3,3 persen. Perubahan distribusi pendapatan rumah tangga seperti tersebut tidak terlihat di antara rumah tangga-rumah tangga sampel di Kelurahan Pundata Baji. Proporsi rumah tangga berpenghasilan kecil (kurang dari Rp. 500.000,- setiap bulan) bahkan sedikit lebih banyak pada tahun 2008 daripada tahun 2006, yaitu 25,8 persen dan 25 persen secara berturut-turut. Selanjutnya, proporsi rumah tangga yang

berpenghasilan lebih dari Rp. 3.000.000,- per bulan juga berkurang dari 6 persen pada tahun 2006 menjadi 5,8 persen di tahun 2008.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, peningkatan pendapatan masyarakat di atas tidak dapat dikatakan karena peranan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan COREMAP. Banyak faktor lain yang berperan menyebabkan terjadinya kondisi tersebut. Salah satu di antaranya semakin bervariasinya pekerjaan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga di lokasi penelitian. Di Desa Mattiro Bombang, umpamanya, jika pada tahun 2006 mayoritas penduduk mempunyai sumber pendapatan utama dari kegiatan kenelayanan, pada tahun 2008 banyak di antara mereka yang melakukan kegiatan ekonomi di sektor-sektor lain. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak terpengaruh oleh kondisi cuaca, sehingga mereka bisa memperoleh pendapatan yang relatif lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, pada tahun 2008 kesempatan kerja lebih terbuka luas, bahkan juga untuk mereka yang berumur di bawah usia kerja. Kesempatan kerja untuk anak-anak usia sekolah, khususnya di Desa Mattiro Bombang lebih terbuka luas dengan adanya beberapa usaha pengupasan kepiting (dikenal dengan sebutan *mini plan*) yang baru dibuka. Banyak anak usia sekolah yang memanfaatkan kesempatan ini, sehingga mereka bisa memperoleh pendapatan. Kegiatan yang mereka lakukan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja, termasuk anak-anak usia sekolah, memungkinkan rumah tangga untuk mengalami peningkatan pendapatan.

Selain faktor di atas, berbagai program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah (selain COREMAP) juga berperan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga di lokasi penelitian. Seperti halnya COREMAP, program-program tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat, melalui bantuan pinjaman modal usaha. Bagi sebagian nelayan, dana pinjaman yang diterima digunakan untuk meningkatkan kemampuan armada tangkap, misalnya membeli mesin perahu berkapasitas lebih besar, atau memperbanyak jenis dan jumlah alat tangkap. Dengan kemampuan armada tangkap yang lebih besar mereka dapat berlayar

sampai jauh, sehingga volume produksi dalam setiap kegiatan melaut menjadi lebih besar. Selain itu, jenis dan jumlah alat tangkap yang lebih banyak juga memungkinkan mereka untuk memperbesar volume produksi. Kedua hal tersebut berperan besar dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka setiap bulan.



## KATA PENGANTAR

Pelaksanaan COREMAP fase II bertujuan untuk menciptakan pengelolaan ekosistem terumbu karang, agar sumber daya laut ini dapat direhabilitasi, diproteksi dan dikelola secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Program ini telah berjalan kurang lebih tiga tahun atau sampai pada pertengahan program. Keberhasilan COREMAP dapat dikaji dari aspek bio-fisik dan sosial ekonomi. Terjadinya peningkatan tutupan karang sebesar 2 persen per tahun merupakan indikator keberhasilan dari aspek bio-fisik. Indikator keberhasilan dari aspek sosial ekonomi adalah jumlah pendapatan yang didapat dari, dan jumlah orang yang menerima pendapatan dari berbagai kegiatan berkelanjutan yang berbasis terumbu karang meningkat sebesar 10 persen pada akhir program. Selain itu, diharapkan sedikitnya 70 persen masyarakat pesisir, terutama nelayan (penerima manfaat) merasakan dampak positif program terhadap kesejahteraan dan status ekonominya.

Untuk melihat keberhasilan tersebut perlu dilakukan penelitian benefit monitoring evaluation (BME) baik ekologi maupun sosial-ekonomi. Penelitian BME ekologi dilakukan setiap tahun untuk memonitor kesehatan karang, sedangkan BME sosial-ekonomi dilakukan pada tengah dan akhir program. BME sosial-ekonomi bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan COREMAP di daerah dan mengumpulkan data mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya tingkat pendapatan untuk memantau dampak program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hasil BME sosil- ekonomi ini selain dapat dipakai untuk memantau perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya peningkatan pendapatan penduduk di lokasi COREMAP, juga dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi pengelolaan dan pelaksanaan program, baik di tingkat nasional, kabupaten maupun di tingkat lokasi. Dengan adanya evaluasi dan masukan-masukan bagi pengelola

dan pelaksana program, diharapkan dalam sisa waktu yang ada sampai akhir program fase II, keberhasilan COREMAP dari indikator bio-fisik dan sosial-ekonomi dapat tercapai.

Buku laporan ini merupakan hasil dari BME sosial-ekonomi yang dilakukan pada tahun 2008 di lokasi-lokasi Coremap di Indonesia Bagian Timur (lokasi World Bank). BME sosial-ekonomi ini dilakukan oleh CRITC-LIPI bekerjasama dengan tim peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI (PPK-LIPI) dan beberapa peneliti sosial dari kedepujian IPSK - LIPI.

Terlaksananya kegiatan penelitian dan penulisan buku laporan melibatkan berbagai pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI yang telah memberikan dukungan kepada tim peneliti melakukan studi ini. Kepada para informan: masyarakat nelayan, ketua dan pengurus LPSTK dan POKMAS, pemimpin formal dan informal, tokoh masyarakat di Desa Mattiro Bombang (Kecamatan Liukang Tupabbiring) dan di Kelurahan Pundata Baji (Kecamatan Labakkang) kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pewawancara yang telah membantu pelaksanaan survai. Kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua narasumber dari berbagai unsur pengelola COREMAP di tingkat kabupaten: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Unit pelaksana COREMAP di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, CRITC Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan berbagai pihak yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah membantu memberikan data dan informasi.

Pada akhirnya, kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna meskipun tim peneliti telah berusaha sebaik mungkin dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan ini.

Jakarta, Desember 2008

Direktur NPIU CRITC COREMAP II-LIPI

Prof. DR. Ono Kurnaen Sumadhiharya, MSc

# DAFTAR ISI

Halaman

RANGKUMAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Tujuan .....	5
	1.3. Metodologi .....	5
	1.4. Pembabakan Penulisan .....	8
BAB II	PROFIL LOKASI PENELITIAN .....	11
	2.1. Kondisi Geografis.....	12
	2.2. Potensi Sumberdaya Alam dan Pengelolaannya.....	15
	2.2.1. Kondisi Sumber Daya Alam .....	15
	2.2.2. Wilayah Pengelolaan .....	20
	2.2.3. Teknologi Penangkapan .....	22
	2.2.4. Sarana dan Prasarana.....	25
	2.2.5. Program dan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Laut .....	33
	2.3. Kependudukan.....	35
	2.3.1. Jumlah dan Komposisi .....	35
	2.3.2. Pendidikan .....	40
	2.3.3. Pekerjaan .....	43
	2.3.4. Kesejahteraan Penduduk .....	47

BAB III	COREMAP DAN IMPLEMENTASINYA .....	53
	3.1. Pelaksanaan Coremap: Permasalahan dan Kendala.....	53
	3.1.1. Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Coremap Di Tingkat Kabupaten .....	54
	3.1.2. Pengelolaan dan Pelaksanaan Coremap di Tingkat Lokasi/Desa.....	66
	3.2. Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan/Program Coremap .....	85
BAB IV	PENDAPATAN PENDUDUK DAN PERUBAHAN (T0 DAN T1) .....	97
	4.1. Pendapatan Kabupaten Pangkep.....	98
	4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangkep .....	98
	4.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha : Fokus pada Sumbangan Sektor Pertanian.....	99
	4.1.3. PDRB Per Kapita.....	103
	4.2. Pendapatan Rumah Tangga Terpilih dan Perubahannya (T0 dan T1) .....	104
	4.2.1. Desa Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Tuppabiring .....	105
	4.2.2. Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang .....	117
	4.3. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Perubahan Pendapatan.....	128
	4.3.1. Faktor Struktural.....	129
	4.3.2. Faktor Internal .....	131
	4.3.3. Faktor Eksternal .....	133
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN .....	139
	5.1. Kesimpulan.....	139
	5.2. Saran .....	147
DAFTAR PUSTAKA	.....	151

# DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas di Kabupaten Pangkep ..... 17
Tabel 2.2	Kalender Aktivitas Penduduk Kelurahan Pundata Baji..... 19
Tabel 2.3	Kalender Aktivitas Penduduk Desa Mattiro Bombang..... 20
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, Kepadatan dan Rasio Jenis Kelamin, 2006 ..... 36
Tabel 3.1	Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Mengenai Kegiatan COREMAP, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%) ..... 86
Tabel 3.2	Distribusi Responden yang Mengetahui Kegiatan COREMAP Menurut Keterlibatannya, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%) ..... 88
Tabel 3.3	Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Mengenai Kegiatan COREMAP, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%) ..... 92
Tabel 3.4	Distribusi Responden yang Mengetahui Kegiatan COREMAP Menurut Keterlibatannya, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%) ..... 93
Tabel 4.1	PDRB Kabupaten Pangkep dan Pertumbuhannya 2000-2006..... 99

Tabel 4.2	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Pangkep Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, Kabupaten Pangkep Tahun 2000-2006 (dengan Semen Tonasa).....	100
Tabel 4.3	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, Kabupaten Pangkep Tahun 2001-2006 (%) (dengan Semen Tonasa).....	101
Tabel 4.4	Pertumbuhan Sektor Pertanian Kabupaten Pangkep Menurut Sub-sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2001-2006 (%).....	102
Tabel 4.5	Distribusi PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Pangkep Menurut Sub-sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2001-2006 (%).....	103
Tabel 4.6	Rata-Rata PDRB Perkapita Penduduk Kabupaten Pangkep dan Sulawesi Selatan Tahun 2001-2006 (Rupiah) .....	104
Tabel 4.7	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 .....	107
Tabel 4.8	Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Besar Pendapatan, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 .....	108
Tabel 4.9	Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Lapangan Kerja Utama Kepala Rumah Tangga dan Besar Pendapatan, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 .....	109

Tabel 4.10	Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 .....	113
Tabel 4.11	Distribusi Rumah Tangga Menurut Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan dan Musim, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (%) .....	114
Tabel 4.12	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Anggota dan Bukan Anggota Pokmas/COREMAP, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkep, 2008 .....	115
Tabel 4.13	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Anggota Pokmas/COREMAP Menurut Lapangan Pekerjaan KRT, Desa Mattiro Bombang Kabupaten Pangkep, 2008 .....	117
Tabel 4.14	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 .....	120
Tabel 4.15	Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Besar Pendapatan Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 .....	121
Tabel 4.16	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 .....	122
Tabel 4.17	Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 .....	124

Tabel 4.18	Distribusi Rumah Tangga Menurut Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan dan Musim, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (%).....	125
Tabel 4.19	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Anggota dan Bukan Anggota Pokmas/COREMAP, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkep, 2008.....	127
Tabel 4.20	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Anggota Pokmas/COREMAP Menurut Lapangan Pekerjaan KRT, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkep 2008.....	128

# DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Preferensi Wilayah Tangkap Nelayan Berdasarkan Kondisi Musim di Desa Mattiro Bombang dan Kelurahan Pundata Baji .....	21
Gambar 2.2 Kepemilikan Armada Tangkap di Desa Mattiro Bombang .....	23
Gambar 2.3 Kepemilikan Alat Tangkap di Desa Mattiro Bombang .....	24
Gambar 2.4 Alat Tangkap Nelayan Pulau Salemo (Jaring dan Bubu).....	25
Gambar 2.5 Industri Pengupasan Kepiting di Desa Mattiro Bombang .....	28
Gambar 2.6 Industri Pengolahan Ikan Asin oleh Masyarakat Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang .....	29
Gambar 2.7 Kendaraan Operasional Puskesmas Pembantu di Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang .....	32
Gambar 2.8 Distribusi ART Sampel Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkep, 2008 (%).....	39
Gambar 2.9 Distribusi ART Sampel Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kelurahan Pundata Baji Kabupaten Pangkep, 2008 (%).....	40
Gambar 2.10 Distribusi ART Sampel Usia 7 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lokasi Penelitian, 2008 (%) .....	42

Gambar 2.11 Distribusi ART Sampel Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Lokasi Penelitian, 2008 (%).....	44
Gambar 2.12 Distribusi ART Sampel Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lokasi Penelitian, 2008 (%).....	46
Gambar 2.13 Kepemilikan Armada Tangkap Rumah Tangga Sampel di Kelurahan Pundata Baji dan Desa Mattiro Bombang, Tahun 2006-2008 (%).....	48
Gambar 2.14 Kepemilikan Alat Tangkap Rumah Tangga Sampel di Kelurahan Pundata Baji dan Desa Mattiro Bombang Tahun 2006-2008 (%).....	49
Gambar 3.1 Struktur Kelembagaan COREMAP II – Kabupaten Pangkep .....	55
Gambar 3.2 Struktur Kelembagaan LPSTK .....	67

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 3.1	Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Tentang Jenis Kegiatan Ekonomi COREMAP, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)..... 153
Tabel 3.2	Distribusi Responden yang Mengetahui Jenis Kegiatan Ekonomi Menurut Sumber Informasi Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)..... 154
Tabel 3.3	Distribusi Responden yang Mengetahui Jenis Kegiatan Ekonomi COREMAP dan Keterlibatannya Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)..... 154
Tabel 3.4	Distribusi Responden yang Terlibat dalam Kegiatan Ekonomi COREMAP Menurut Manfaat yang Dirasakan, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)..... 155
Tabel 3.5	Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Mengenai Jenis Usaha Ekonomi yang Pernah Dilakukan COREMAP, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%) ..... 155
Tabel 3.6	Distribusi Responden yang Mengetahui Jenis Usaha Ekonomi yang Pernah Dilakukan COREMAP Menurut Keterlibatannya, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%) ..... 156
Tabel 3.7	Distribusi Responden yang Terlibat dalam Usaha Ekonomi yang Pernah Dilakukan COREMAP Menurut Manfaat yang Dirasakan, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%) ..... 156
Tabel 3.8	Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Tentang Jenis Kegiatan Ekonomi COREMAP, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%)..... 157

Tabel 3.9	Distribusi Responden yang Mengetahui Jenis Kegiatan Ekonomi Menurut Sumber Informasi, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%).....	157
Tabel 3.10	Distribusi Responden yang Mengetahui Jenis Kegiatan Ekonomi COREMAP dan Keterlibatannya, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%).....	158
Tabel 3.11	Distribusi Responden yang Terlibat dalam Kegiatan Ekonomi COREMAP Menurut Manfaat yang Dirasakan, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%).....	158
Tabel 3.12	Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Mengenai Jenis Usaha Ekonomi yang Pernah Dilakukan COREMAP, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%).....	159
Tabel 3.13	Distribusi Responden yang Mengetahui Jenis Usaha Ekonomi yang Pernah Dilakukan COREMAP Menurut Keterlibatannya, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%).....	159
Tabel 3.14	Distribusi Responden yang Terlibat dalam Usaha Ekonomi yang Pernah Dilakukan COREMAP Menurut Manfaat yang Dirasakan, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%).....	160

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Fenomena kerusakan terumbu karang telah sampai pada kondisi yang mengkhawatirkan<sup>1</sup>. Hasil pantauan di 686 stasiun pantau di seluruh Indonesia memperlihatkan bahwa sebanyak 31,92 persen terumbu karang berada dalam kondisi kurang baik, sekitar 36,59 persen dalam kategori cukup baik, dan sisanya, 25,66 persen mempunyai kondisi baik serta 5,83 persen dengan kondisi sangat baik (Suharsono, 2005 dikutip dalam Noveria, dkk., 2008). Artinya, hanya sekitar sepertiga lokasi terumbu karang yang dipantau termasuk dalam kondisi baik dan sangat baik. Di wilayah perairan Sulawesi Selatan pada umumnya, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), khususnya juga ditemui kondisi yang serupa. Dari 18 lokasi stasiun pantau di seluruh wilayah kabupaten ini, di 11 lokasi kondisi terumbu karang tergolong kurang baik, sedangkan di lokasi yang lain kondisinya hanya dalam kategori cukup. Sementara itu,

---

<sup>1</sup> Kerusakan terumbu karang terjadi akibat faktor alami dan perilaku manusia. Faktor-faktor alam yang menyebabkan kerusakan terumbu karang antara lain adanya organisme laut yang berfungsi sebagai predator seperti bintang laut dan bencana alam, khususnya gempa bumi yang bersumber dari laut. Dari sisi manusia, faktor dominan penyebab rusaknya terumbu karang adalah praktik-praktik pemanfaatan sumber daya laut yang destruktif. Kegiatan penangkapan ikan dan sumber daya laut lainnya menggunakan armada dan alat tangkap yang merusak terumbu karang menjadi fenomena keseharian yang ditemui di berbagai wilayah perairan. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh nelayan dengan modal besar, meskipun tidak tertutup kemungkinan sebagian nelayan tradisional juga melakukan hal yang sama. Selain itu, beberapa perilaku penduduk kepulauan dan pesisir juga memberikan kontribusi atas kerusakan terumbu karang. Membuang sampah ke laut merupakan perilaku penduduk yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya laut, yang secara tidak langsung menimbulkan kerusakan terumbu karang.

untuk tutupan karang hidup, terjadi penurunan dari 34,68 persen pada tahun 2006 menjadi 30,42 persen pada 2007 (Manuputty, 2007).

Kerusakan terumbu karang menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan alam dan juga manusia, khususnya masyarakat yang hidup di wilayah pulau dan pesisir di sekitarnya. Karena berfungsi sebagai tempat hidup dan berkembangbiaknya berbagai jenis biota laut, termasuk ikan dan jenis-jenis sumber daya laut lainnya, maka kerusakan terumbu karang berarti terganggunya kehidupan jenis-jenis biota laut yang hidup pada terumbu karang. Hal ini selanjutnya berpotensi menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem laut. Bagi penduduk yang matapencahariannya tergantung pada sumber daya laut berkurangnya jenis-jenis sumber daya laut yang hidup di sekitar terumbu karang, terutama yang bernilai ekonomi tinggi sangat mempengaruhi penghasilan mereka. Ini karena berkurangnya hasil tangkapan dan bahkan pada kondisi yang paling buruk nelayan tidak lagi menangkap jenis-jenis sumber daya laut tertentu karena sangat sulit mendapatkannya. Selain itu, kerusakan terumbu karang memaksa nelayan untuk berlayar ke lokasi yang lebih jauh agar bisa memperoleh hasil tangkapan yang 'memadai', sehingga biaya produksi menjadi lebih besar.

Agar kerusakan terumbu karang tidak semakin berlanjut, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan beberapa lembaga donor, antara lain *Asian Development Bank* (ADB) dan *World Bank* (WB) telah meluncurkan program untuk menjaga dan merehabilitasi kondisi sumber daya laut tersebut. Program tersebut adalah *Coral Reef Rehabilitation and Management Program* (COREMAP), yang dilaksanakan dalam tiga fase, yaitu fase inisiasi, fase implementasi, dan fase akselerasi. Pelaksanaan COREMAP melibatkan berbagai *stakeholders* dari berbagai institusi, mulai dari tingkat nasional, kabupaten/kota, sampai ke desa/kelurahan yang terpilih sebagai lokasi program.

COREMAP terdiri dari berbagai komponen, tidak hanya yang menyangkut kondisi fisik terumbu karang serta sumber daya laut lainnya (aspek ekologi), tetapi juga mencakup komponen yang terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di perairan sekitar lokasi

terumbu karang. Komponen-komponen COREMAP meliputi: (1) *Public Awareness* (PA), (2) *Community Based Management* (CBM), (3) *Marine Conservation Area* (MCA), (4) *Management, Controlling, and Surveillance* (MCS), dan (5) *Coral Reef Information, Training, and Controlling* (CRITC). Salah satu kegiatan dalam komponen CBM adalah penciptaan mata pencaharian alternatif, yang terutama bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya laut. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa berkurangnya ketergantungan terhadap sumber daya laut juga berpotensi untuk mengurangi kerusakan terumbu karang. Adanya mata pencaharian alternatif menyebabkan berkurangnya intensitas eksploitasi sumber daya laut yang dapat berakibat pada kerusakan terumbu karang. Bersama-sama dengan komponen COREMAP lainnya seperti MCA dan MCS, kegiatan penciptaan mata pencaharian alternatif diharapkan dapat mempertahankan serta menjaga kondisi terumbu karang karena eksploitasi terhadap terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya menjadi berkurang.

Keberhasilan program COREMAP diukur menggunakan beberapa indikator, dari aspek fisik maupun sosial ekonomi. Dari aspek sosial ekonomi, indikator capaian tujuan program ini meliputi: (1) peningkatan pendapatan dan jumlah penduduk yang menerima pendapatan dari kegiatan ekonomi berbasis terumbu karang dan kegiatan alternatif lainnya sebesar sepuluh persen pada akhir tahun 2009, (2) sedikitnya 70 persen dari masyarakat nelayan (*beneficiaries*) di kabupaten lokasi program merasakan dampak positif COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan dan status sosial ekonominya (World Bank, 2004). Selanjutnya, dari aspek fisik indikator keberhasilan program ini antara lain penambahan luas tutupan karang serta jenis-jenis biota laut lainnya, termasuk yang hidup pada terumbu karang.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Pangkep kegiatan COREMAP telah dilaksanakan sejak tahun 2005. Kegiatan di kabupaten ini termasuk dalam COREMAP fase kedua, setelah kegiatan fase pertama yang dilakukan di Kabupaten Selayar. Sampai dengan tahun 2008 kegiatan COREMAP di Kabupaten Pangkep dilaksanakan di 10 kecamatan, yang secara keseluruhan

mencakup 37 desa/kelurahan. Kecuali dua kecamatan yang terletak di dataran tinggi, yaitu Tondong Tallasa dan Balocci, semua kecamatan di wilayah kepulauan serta wilayah pesisir dan dataran rendah Kabupaten Pangkep merupakan lokasi kegiatan program pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang tersebut.

Seperti berbagai program (pembangunan) lainnya, pelaksanaan COREMAP juga perlu dipantau dan dievaluasi. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui kinerja program, dalam arti pelaksanaan teknis operasionalnya. Kegiatan ini sangat diperlukan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan program dengan yang ditetapkan dalam rencana dan rancangannya. Oleh karena itu, hasil pemantauan sangat diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja program. Selanjutnya, kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian program sesuai dengan tahapannya. Melalui kegiatan evaluasi, capaian terhadap target-target yang ditetapkan oleh semua komponen dalam jangka waktu tertentu dapat terlihat. Hal ini menjadi dasar untuk (perbaikan) penyelenggaraan program di masa selanjutnya.

Sebagai program yang direncanakan dalam jangka panjang, diperlukan informasi mengenai pelaksanaan serta dampak (sosial ekonomi) yang ditimbulkannya dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum COREMAP dilaksanakan (T0) telah dilakukan "Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi Coremap II" pada tahun 2006. Setelah dua tahun program berjalan dilakukan pemantauan untuk mengetahui dampak program terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (T1). Salah satu cara untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan COREMAP adalah melalui penelitian di daerah-daerah yang melaksanakannya. Sesuai dengan fokus kegiatan, diperlukan penelitian yang berbeda-beda terhadap masing-masing komponen. Sebagai contoh, penelitian untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan MCA dan MCS berbeda dengan kegiatan PA dan CBM. Penelitian ini termasuk dalam skema pemantauan dan pengevaluasian komponen sosial ekonomi COREMAP, yaitu PA dan CBM.

## 1.2. TUJUAN

### Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya tingkat pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, setelah dilaksanakannya berbagai kegiatan yang termasuk dalam cakupan COREMAP. Hal ini dimaksudkan untuk memantau dampak program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

### Tujuan Khusus:

Secara khusus, tujuan penelitian adalah untuk:

1. Memberikan gambaran umum tentang lokasi COREMAP yang meliputi kondisi geografi, sarana dan prasarana, potensi sumber daya alam khususnya sumber daya laut dan pola pemanfaatannya.
2. Menggambarkan kondisi sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraannya.
3. Mendeskripsikan tingkat pendapatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
4. Mengidentifikasi dampak program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

## 1.3. METODOLOGI

### *Lokasi Penelitian*

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi Coremap di Kabupaten Pangkep, yaitu satu kelurahan di wilayah pesisir dan satu desa di daerah kepulauan. Kelurahan di daerah pesisir adalah Pundata Baji, yang termasuk wilayah Kecamatan Labakkang, sedangkan desa di kepulauan yaitu Desa Mattiro Bombang (Kecamatan Liukang Tupabbiring). Keduanya merupakan lokasi "Survei Kondisi Sosial

Ekonomi Masyarakat di Lokasi Coremap II” yang dilaksanakan pada tahun 2006.

### *Pengumpulan Data*

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data kuantitatif dan kualitatif, dikumpulkan menggunakan teknik-teknik yang sesuai dengan jenisnya. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui survei, dengan daftar pertanyaan (kuesioner) terstruktur. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan untuk rumah tangga dan juga untuk individu terpilih dalam rumah tangga sampel. Pertanyaan-pertanyaan di tingkat rumah tangga mencakup kondisi sosial, demografi, dan ekonomi seluruh anggota rumah tangga, antara lain umur, jenis kelamin, pendidikan tertinggi yang ditamatkan (khusus untuk anggota rumah tangga berusia 7 tahun ke atas), serta pekerjaan (untuk anggota rumah tangga usia 10 tahun ke atas). Selain itu, pendapatan rumah tangga dari sektor perikanan (pada setiap musim gelombang), sektor non perikanan, termasuk pertanian, perkebunan, dan jasa, serta kepemilikan aset (produktif dan non produktif) rumah tangga juga ditanyakan dalam kuesioner rumah tangga. Kuesioner individu berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai pengetahuan individu tentang COREMAP, komponen-komponen yang ada di dalamnya, serta berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh program pengelolaan sumber daya terumbu karang tersebut. Dalam kuesioner individu juga ditanyakan keikutsertaan individu dan atau anggota rumah tangga yang lain dalam berbagai kegiatan COREMAP dan juga manfaat yang dirasakan dari keberadaan dan keikutsertaan dalam kegiatan yang diikuti. Kuesioner individu ditutup dengan pertanyaan tentang perlu atau tidaknya kegiatan ekonomi COREMAP dilanjutkan pelaksanaannya.

Kuesioner dibagikan kepada rumah tangga yang pada tahun 2006 (penelitian data dasar) terpilih menjadi sampel penelitian. Cara ini dilakukan agar dapat memantau perkembangan sosial ekonomi mereka, terutama perubahan pendapatan setelah COREMAP dilaksanakan. Hampir semua rumah tangga terpilih pada tahun 2006

kembali menjadi sampel dalam penelitian tahun 2008. Beberapa yang sudah pindah digantikan oleh rumah tangga di sebelahnya. Di antara 100 rumah tangga terpilih di masing-masing lokasi penelitian hanya sedikit yang menjadi anggota pokmas COREMAP. Mengingat tujuan penelitian ini adalah untuk memantau pelaksanaan kegiatan COREMAP, maka secara khusus dipilih lagi beberapa rumah tangga yang anggotanya terlibat dalam kegiatan pokmas-pokmas yang ada. Secara keseluruhan jumlah rumah tangga sampel di wilayah kepulauan (Desa Mattiro Bombang) adalah 122 rumah tangga, sedangkan di pesisir (Kelurahan Pundata Baji) berjumlah 120 rumah tangga.

Data kualitatif dikumpulkan menggunakan beberapa teknik kualitatif, yaitu wawancara mendalam, FGD (*focus group discussion*), PRA (*participatory rural appraisal*), dan observasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, FGD, PRA, dan pedoman observasi. Untuk mengumpulkan data kualitatif narasumber dipilih secara purposive, yaitu mereka yang memahami dan menguasai informasi yang akan digali. Tokoh masyarakat, formal dan informal, nelayan, dan masyarakat pada umumnya adalah narasumber-narasumber terpilih di tingkat lokasi penelitian. Selain itu, pengumpulan data kualitatif juga dilakukan di tingkat kabupaten, dengan narasumber pengelola Coremap di Kabupaten Pangkep, mulai dari ketua PMU, koordinator masing-masing komponen Coremap, serta konsultan yang mendampingi pelaksanaan setiap komponen.

Data sekunder yang dikumpulkan mencakup dokumen-dokumen yang relevan dengan materi penelitian yang dikeluarkan oleh berbagai instansi. Data statistik yang dikeluarkan oleh BPS dan juga sektor-sektor teknis lainnya seperti perikanan, pertanian, dan perkebunan, laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Coremap, serta hasil-hasil penelitian yang relevan merupakan data sekunder yang dikumpulkan. Data-data tersebut berfungsi sebagai pendukung data primer.

## *Analisis Data*

Analisis data dilakukan secara deskriptif, dengan metode yang berbeda sesuai dengan jenis data. Data kualitatif dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif, antara lain untuk mengetahui mean, median, serta rata-rata pendapatan tertinggi dan terendah keluarga di setiap musim gelombang (untuk pendapatan di sektor perikanan) dan pendapatan dari sektor-sektor non perikanan, serta tabulasi frekuensi dan tabulasi silang informasi-informasi yang terkait dengan pengetahuan responden mengenai COREMAP. Untuk menganalisis data kualitatif digunakan analisis isi dari informasi-informasi yang diperoleh untuk memperkaya pemahaman mengenai isu-isu yang dianalisis.

### **1.4. PEMBABAKAN PENULISAN**

Buku ini terdiri dari enam bab, dengan fokus yang berbeda-beda pada setiap bab. Bab pertama adalah "Pendahuluan" yang berisi informasi mengenai latar belakang dilaksanakannya kegiatan penelitian, tujuan penelitian, serta metodologinya. Beberapa informasi seperti sumber dan cara pengumpulan data, dibahas secara detil dalam bab ini. Bab II berisi pembahasan mengenai profil lokasi penelitian, mencakup kondisi geografis sarana dan prasarana, serta kelembagaan sosial ekonomi yang terdapat di sana. Selain itu, isu pengelolaan sumber daya laut yang mencakup kebijakan yang mengatur, praktek-praktek pemanfaatan, serta permasalahannya juga menjadi fokus dalam Bab II ini. Dalam Bab III disajikan potret penduduk di lokasi penelitian. Jumlah dan komposisi penduduk, kualitas penduduk yang dilihat dari pendidikan formal yang dicapai dan keterampilan yang dikuasai, serta kepemilikan aset menjadi fokus bahasan dalam bab ini. Informasi yang disajikan dalam Bab II dan Bab III diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan COREMAP. Selanjutnya, Bab IV menyajikan informasi mengenai pendapatan penduduk dan perubahannya mulai dari awal pelaksanaan kegiatan COREMAP sampai dengan dua tahun setelahnya. Pembahasan mengenai pendapatan disertai dengan berbagai faktor yang

mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal. Bab V merupakan bahasan mengenai pelaksanaan kegiatan COREMAP serta manfaatnya bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di lokasi penelitian. Gambaran yang disajikan dalam bab ini bermanfaat untuk mengetahui dampak COREMAP bagi masyarakat dan juga sebagai *lesson learned* untuk pelaksanaan program tersebut di masa mendatang. Buku ini ditutup dengan Bab V yang berisi kesimpulan dan bahan-bahan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan COREMAP pada tahap-tahap selanjutnya.



## **BAB II**

### **PROFIL LOKASI PENELITIAN**

**K**abupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, berjarak 50 km dari Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Pangkep yang terletak pada pantai barat Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki 3 jenis wilayah topografi, yaitu wilayah dataran rendah, wilayah pegunungan dan wilayah kepulauan. Wilayah dataran rendah di kabupaten ini terbentang dari pesisir barat hingga timur, seluas 73.231 Ha, terdiri dari lahan pertanian basah, daerah rawa dan tambak. Wilayah pegunungan dengan ketinggian 100 – 1.000 m di atas permukaan laut terletak di wilayah bagian barat dan dikelilingi pegunungan yang mengandung potensi pertambangan berupa batubara dan marmer. Wilayah kepulauan di Kabupaten Pangkep yang tersebar di perairan Selat Makassar dan merupakan bagian dari Kepulauan Spermonde, terdiri dari 112 pulau dan 47 pulau diantaranya tidak berpenghuni.

Kabupaten Pangkep terbagi menjadi 12 kecamatan, terdiri dari tujuh kecamatan yang terdapat di dataran rendah, dua kecamatan di wilayah pegunungan dan tiga kecamatan di wilayah kepulauan. Tujuh kecamatan yang terletak di dataran rendah adalah Kecamatan Pangkajene, Minasate'ne, Bungoro, Labakkang, Marang, Segeri, dan Mandalle, sedangkan dua kecamatan yang terletak di wilayah pegunungan adalah Kecamatan Tondong Tallasa dan Balocci. Tiga kecamatan di wilayah kepulauan terdiri dari Kecamatan Liukang Tupabbiring, Liukang Tangaya dan Liukang Kalmas.

Bab ini mendeskripsikan profil lokasi penelitian, yaitu Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tupabbiring yang terletak di wilayah kepulauan, serta Kelurahan Pundata Baji yang terletak di kawasan daratan (pesisir). Pembahasan difokuskan pada tiga aspek, yaitu kondisi geografis, potensi sumberdaya alam dan

pengelolaannya, serta kependudukan di wilayah ini. Untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap dalam konteks yang lebih luas, pembahasan ketiga aspek ini dimulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa/kelurahan.

## 2.1. KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Pangkep membentang sepanjang 45 km pada pesisir barat Pulau Sulawesi, dengan letak astronomis pada  $4,40^{\circ} - 8^{\circ}$  LS dan  $110^{\circ} - 113^{\circ}$  BT. Luas seluruh Kabupaten Pangkep  $12.362,73$  km<sup>2</sup>, dengan luas wilayah daratan  $898,29$  km<sup>2</sup> dan wilayah laut  $11.464,44$  km<sup>2</sup> ( 4 mil dari garis pantai ), dengan batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Madura, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Bali.

Salah satu kecamatan dengan topografi kepulauan di Kabupaten Pangkep adalah Kecamatan Liukang Tuppabiring. Dibandingkan dengan 2 kecamatan kepulauan lainnya di kabupaten ini, Liukang Tuppabiring merupakan kecamatan yang memiliki jarak terdekat ke ibukota kabupaten Pangkajene (27,06 mil). Kecamatan ini merupakan gugusan 42 pulau-pulau kecil di Selat Makassar yang terletak pada kisaran  $4-5^{\circ}$  LS dan  $12-13^{\circ}$  BT. Luas total wilayah daratan kecamatan ini adalah  $140$  km<sup>2</sup> (12,59 persen dari luas wilayah kabupaten). Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Barru di sebelah utara, Kabupaten Maros dan Kecamatan Pangkajene di sebelah timur, Kota Makassar di sebelah selatan, serta Kecamatan Liukang Kalmas di sebelah barat. Secara administratif, Kecamatan Liukang Tuppabiring terbagi menjadi 13 desa dan satu kelurahan. Ibukota kecamatan terletak di Kelurahan Mattiro Sompe, Pulau Balang Lompo.

Desa Mattiro Bombang merupakan salah satu desa di Kecamatan Liukang Tupabbiring yang mencakup empat wilayah kepulauan yaitu Pulau Salemo, Pulau Sagara, Pulau Sabangko, dan Pulau Sakuala. Sebagai wilayah kepulauan, Desa Mattiro Bombang bertopografi datar dan landai dengan rata-rata ketinggian mencapai kurang dari 50 meter dan luas wilayah 22 km<sup>2</sup>. Secara administratif, Desa Mattiro Bombang berbatasan dengan Perairan Barru (sebelah utara), Desa Mattiro Kanja (sebelah selatan), Desa Mattiro Walie (sebelah barat), dan Kelurahan Talaka (sebelah timur).

Kecamatan Labakkang merupakan salah satu kecamatan di dataran rendah Kabupaten Pangkep. Luas wilayah kecamatan ini sebesar 101,73 km<sup>2</sup> (12,69 persen dari luas wilayah kabupaten), serta terdiri dari sembilan desa dan empat kelurahan. Beberapa desa/kelurahan di kecamatan ini berlokasi di kawasan pesisir pantai barat Pulau Sulawesi. Secara geografis, Kecamatan Labakkang terletak di antara 4,40° – 4,45° LS dan 111° – 112° BT, dengan batas administratif Kecamatan Ma'rang (sebelah utara), Kecamatan Bungoro (sebelah timur dan selatan) dan Kecamatan Liukang Tupabbiring (sebelah barat).

Salah satu kelurahan di Kecamatan Labakkang yang terletak di daerah pesisir adalah Kelurahan Pundata Baji. Secara administratif, kelurahan ini berbatasan dengan Desa Bonto Manai (sebelah utara), Kecamatan Bungoro (sebelah selatan), Kelurahan Borimasunggu (sebelah timur) dan Selat Makasar (sebelah barat). Kelurahan Pundata Baji memiliki luas wilayah 522,58 ha serta terdiri dari 19 RT (Rukun Tetangga) dan 4 RW (Rukun Warga). Wilayah Kelurahan Pundata Baji terbagi menjadi dua lingkungan yaitu Lingkungan Pundata dan Lingkungan Maccini Baji, yang memiliki karakteristik wilayah yang berbeda. Lingkungan Pundata terletak di daratan sedangkan lingkungan Maccini Baji berada di kawasan pesisir.

Berdasarkan keadaan angin dan gelombang laut, Kabupaten Pangkep memiliki dua musim yaitu Musim Barat dan Musim Timur. Musim Barat ditandai dengan keadaan gelombang laut yang kuat sedangkan Musim Timur ditandai dengan gelombang laut yang lemah. Pada umumnya, Musim Barat diikuti dengan musim hujan

yang berlangsung sejak Bulan Desember hingga Maret, sedangkan Musim Timur diikuti musim kemarau dimulai dari Bulan Juli hingga September. Di sela-sela kedua musim tersebut terjadi musim pancaroba, yaitu dari Bulan April – Juni dan Oktober – November, yang merupakan peralihan dari Musim Barat ke Musim Timur atau sebaliknya. Namun, yang terjadi akhir-akhir ini, pergantian musim tidak mudah lagi diprediksi seperti tahun-tahun sebelumnya. Hasil wawancara dengan penduduk setempat menunjukkan bahwa hal ini cukup menyulitkan penduduk yang mata pencahariannya sangat bergantung pada kondisi alam, seperti petani ataupun nelayan. Kemungkinan kondisi ini juga berkaitan dengan perubahan iklim global yang memang sudah dirasakan saat ini.

Pada puncak Musim Barat, penduduk di kepulauan seringkali tidak dapat berpergian menuju daratan ataupun pulau di sekitarnya akibat buruknya cuaca, yang dapat membahayakan perjalanan di laut. Meskipun begitu, musim ini biasanya merupakan panen besar bagi nelayan di beberapa pulau, terutama nelayan kepiting. Sedangkan pada Musim Timur terjadi angin *barubu*, yaitu angin yang bertiup sangat kencang dan kering dari arah barat ke timur yang juga dapat mempengaruhi kondisi perairan di sekitar Kabupaten Pangkep. Musim kering umumnya merupakan masa yang menguntungkan bagi nelayan ikan, sebab kondisi angin dan ombak yang relatif tenang memungkinkan nelayan untuk mengoptimalkan wilayah tangkapannya sehingga hasil yang diperoleh pun umumnya lebih besar dibandingkan musim barat.

Perbedaan topografi wilayah menimbulkan perbedaan kebutuhan moda transportasi oleh masyarakat di wilayah setempat. Oleh karena itu, moda transportasi di Kabupaten Pangkep cukup bervariasi, yang mencakup transportasi darat dan laut. Angkutan umum di wilayah Pangkep dikenal dengan nama *pete-pete*, baik untuk angkutan darat maupun untuk angkutan laut. Angkutan darat umumnya berupa mikrolet, sedangkan angkutan laut berupa kapal penumpang. Mikrolet yang beroperasi di wilayah Pangkep menghubungkan sebagian besar kecamatan di Kabupaten Pangkep dengan ibukota kabupaten serta dengan kabupaten-kabupaten lain di sekitar Kabupaten Pangkep. Penduduk di Kelurahan Pundata Baji

mengandalkan mikrolet sebagai angkutan utama untuk bepergian ke kecamatan atau kabupaten lain. Untuk perjalanan jarak dekat, moda angkutan yang umum digunakan penduduk setempat adalah dokar/andong, ojek ataupun betor (becak motor).

Untuk mencapai wilayah kepulauan di Kabupaten Pangkep, moda transportasi yang dapat digunakan adalah berbagai jenis angkutan laut yang tersedia di beberapa dermaga di wilayah daratan Pangkep. Contohnya, akses ke semua pulau di Desa Mattiro Bombang dapat dicapai dari beberapa dermaga, seperti Dermaga Limbangan, Dermaga Maccini Baji ataupun Dermaga Kassikebo. Desa Mattiro Bombang dapat ditempuh selama 1 jam perjalanan melalui Dermaga Limbangan dan Dermaga Maccini Baji. Perjalanan lebih singkat (25 menit) ke desa ini dapat ditempuh melalui Dermaga Kassikebo.

## **2.2. POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN PENGELOLAANNYA**

Secara umum, potensi sumber daya alam di Kabupaten Pangkep terbagi atas sumber daya laut dan sumber daya darat. Kekayaan sumber daya alam merupakan modal besar bagi proses pembangunan wilayah di Kabupaten Pangkep sehingga penting untuk memberikan perhatian besar terhadap upaya pengelolaan sumber daya alam ini.

### **2.2.1. Kondisi Sumber Daya Alam**

Komoditas utama sumber daya alam darat di Kabupaten Pangkep adalah tanaman pangan. Lahan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pangkep terdiri dari sawah berpengairan teknis, setengah teknis, irigasi sederhana dan pengairan non PU. Komoditas tanaman pangan yang dikembangkan di Kabupaten Pangkep adalah padi sawah/ladang, jagung, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, ketela pohon dan ketela rambat. Padi sawah ditanam di lahan seluas 18.865 Ha, dengan produksi 104.630 ton/tahun (BPS Kabupaten Pangkep, 2007). Namun luas lahan dan jumlah produksi komoditas ini cenderung terus menurun dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (BPS Kabupaten Pangkep, 2007). Penurunan produksi komoditas padi

di Kabupaten Pangkep dalam kurun waktu tahun 2002-2006 terjadi seiring dengan peningkatan produksi komoditas pertanian lain, seperti jagung, kacang tanah dan ketela rambat.

Seluruh kecamatan yang terletak di wilayah daratan di Kabupaten Pangkep merupakan penghasil padi. Kecamatan Minasate'ne merupakan penghasil padi terbesar di kabupaten ini, diikuti oleh Kecamatan Labakkang dan Kecamatan Bungoro (BPS Kabupaten Pangkep, 2007). Meskipun begitu, seperti halnya yang terjadi di hampir seluruh wilayah daratan Kabupaten Pangkep, terjadi penurunan volume produksi dari tahun ke tahun, antara lain disebabkan adanya alih fungsi lahan, rotasi jenis tanaman pangan yang ditanam, ataupun kondisi iklim yang menghambat jumlah produksi tanaman pangan ini.

Sumber daya alam daratan lainnya yang dimiliki Kabupaten Pangkep adalah perkebunan dengan luas areal produksi sebesar 15.801,1 Ha pada tahun 2007, yang terdiri dari berbagai macam komoditas antara lain kelapa, jambu mete, kemiri, kopi, kapuk, kakao dan jeruk bali ([www.pangkep.go.id](http://www.pangkep.go.id)). Komoditas perkebunan yang menonjol di Kabupaten Pangkep adalah jeruk bali, yang pemasarannya telah mencapai Pulau Jawa dan Bali, bahkan sampai ke luar negeri. Sentra produksi tanaman ini terdapat di Kecamatan Marang dan Labakkang. Dua kecamatan penghasil jeruk di Pangkep ini memiliki areal seluas 520 Ha dengan jumlah 104.000 batang pohon .

Berbeda dengan wilayah daratan, wilayah kepulauan di Kabupaten Pangkep memiliki produksi komoditas pertanian dan perkebunan yang rendah. Tanaman yang tumbuh di pulau-pulau ini hanya terbatas pada tanaman tropis seperti pohon kelapa, pohon sukun ataupun beberapa jenis tanaman hias, yang umumnya tumbuh secara alamiah dan dipertahankan oleh penduduk setempat, ataupun dikembangkan bukan untuk kebutuhan produksi.

Sumber daya darat lainnya di Kabupaten Pangkep yang memiliki potensi besar adalah pertambangan dan kehutanan. Potensi pertambangan di kabupaten ini merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi di wilayah ini, terutama dengan keberadaan PT

Semen Tonasa yang juga mendukung penyerapan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Pangkep. Berdasarkan peta potensi sumber daya pertambangan, Kabupaten Pangkep memiliki 18 macam bahan galian, namun baru sekitar 5 jenis bahan galian yang telah dimanfaatkan secara optimal yaitu batubara, pasir silica, tanah liat, batu gamping dan sirtu ([www.pangkep.go.id](http://www.pangkep.go.id)). Sektor kehutanan di Pangkep juga sangat luas dan penyebarannya mencakup beberapa kecamatan seperti Balocci, Marang, Labakkang, Segeri, dan Tondong Tallasa. Luas hutan lindung pada tahun 2005 mencapai 18.025 Ha, hutan produksi terbatas 4.950 Ha, hutan produksi biasa 7.300 Ha dan hutan payau atau mangrove 1.264 Ha ([www.pangkep.go.id](http://www.pangkep.go.id)). Selain terdapat di wilayah pesisir, hutan mangrove di Kabupaten Pangkep juga terdapat di wilayah kepulauan.

Potensi sumber daya darat lain di Kabupaten Pangkep adalah usaha peternakan, yang mencakup ternak besar, kecil dan unggas. Berbeda dengan potensi sumber daya daratan lain yang umumnya hanya terbatas di wilayah dataran rendah dan pegunungan, potensi peternakan ini juga dikembangkan di kawasan pesisir dan kepulauan, meskipun dengan karakteristik/jenis ternak yang berbeda. Di wilayah daratan, jenis ternak yang dikembangkan umumnya berupa ternak besar dan kecil, sementara di wilayah kepulauan lebih didominasi oleh unggas. Luas areal pengembalaan ternak di Kabupaten Pangkep sekitar 817 ha, dengan persebaran populasi ternak seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas di Kabupaten Pangkep**

<i>Jenis ternak</i>	<i>Populasi ternak</i>
Sapi	18.348
Kerbau	9.367
Kuda	4.823
Kambing	27.629
Ayam Buras	563.190
Ayam Ras Petelur	16.584
Ayam Ras Pedaging	27.308
Itik	223.277

Sumber: BPS Kabupaten Pangkep Tahun 2007.

Di Desa Mattiro Bombang, jenis ternak yang banyak dipelihara oleh penduduk adalah bebek, namun hasil produksinya seperti telur lebih banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk setempat. Sementara itu, di Kelurahan Pundata Baji, jenis ternak yang dibudidayakan lebih bervariasi antara lain kuda, ayam atau bebek. Pemeliharaan ternak oleh penduduk kelurahan ini umumnya memiliki tujuan produksi dan menjadi sumber pendapatan alternatif rumah tangga.

Potensi sumber daya alam darat di Kabupaten Pangkep juga mencakup potensi perikanan budidaya, khususnya komoditas ikan bandeng dan udang yang dibudidayakan di tambak. Penggunaan lahan untuk budidaya tambak di Kabupaten Pangkep mencapai 10.200,88 Ha, dengan jumlah produksi pada tahun 2006 mencapai 10.592,2 ton dan nilai produksi mencapai sekitar 133 milyar rupiah. Jumlah produksi ini meningkat pesat jika dibandingkan dengan tahun 2005 yang hanya mencapai 4.153,4 ton. Hasil produksi budidaya tambak di Kabupaten Pangkep didominasi oleh ikan bandeng yang mencapai produksi 9023,7 ton pada tahun 2006. Besarnya jumlah produksi bandeng di kabupaten ini menjadikan Kabupaten Pangkep sebagai salah satu pemasok kebutuhan ikan bandeng di berbagai daerah di Pulau Sulawesi, terutama bagi kebutuhan industri di Kota Makassar.

Kecamatan Labakkang memiliki proporsi luas lahan dan nilai produksi budidaya tambak terbesar jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Pangkep. Luas lahan budidaya tambak di Kecamatan Labakkang mencapai 2.569,63 Ha, dengan jumlah produksi 2.641,4 ton. Di wilayah kepulauan Kabupaten Pangkep, lahan yang diusahakan untuk kegiatan budidaya tambak tidak seluas di wilayah daratan. Dari tiga kecamatan kepulauan di Pangkep, hanya Kecamatan Liukang Tuppabiring yang memiliki lahan budidaya tambak seluas 135,80 Ha dan jumlah produksi 111,9 ton. Luas lahan dan jumlah produksi ini merupakan yang terendah dibandingkan dengan kecamatan lain yang memiliki lahan tambak di Kabupaten Pangkep. Di lokasi penelitian Kelurahan Pundata Baji terdapat lahan tambak seluas 328 Ha, namun di Desa Mattiro Bombang tidak banyak lahan tambak yang dapat ditemui. Sebagian besar lahan tambak di desa ini terdapat di Pulau Sabangko.

Selain potensi sumber daya alam daratan, wilayah Kabupaten Pangkep juga memiliki kekayaan potensi sumber daya laut. Wilayah perairan Pangkep yang mencapai 17.000 km<sup>2</sup> mengandung berbagai potensi kelautan seperti beragam jenis ikan dan biota laut ataupun terumbu karang. Lebih dari 50 jenis ikan terdapat di wilayah perairan Pangkep, yang menjadikan laut sebagai salah satu sumber mata pencaharian utama penduduk Pangkep, dengan 11.631 orang penduduknya bekerja sebagai nelayan. Dengan menggunakan sekitar 18 jenis alat tangkap, baik tradisional maupun modern, nelayan Pangkep mampu memproduksi sekitar 10.040,7 ton dengan nilai produksi 127 milyar rupiah pada tahun 2006 (BPS Kabupaten Pangkep, 2007). Jenis ikan yang memiliki jumlah produksi terbesar di Kabupaten Pangkep antara lain ikang kembung, rajungan, ikan tembang, ikan layang, dan ikan bawal hitam.

Pemanfaatan sumber daya alam, baik sumber daya darat maupun laut, oleh penduduk Kabupaten Pangkep sangat bergantung pada kondisi musim ataupun cuaca di wilayah setempat. Oleh karena itu, jenis komoditas sumber daya yang dimanfaatkan tidak selalu sama sepanjang tahun, seperti di Kelurahan Pundata Baji dan di Desa Mattiro Bombang yang dapat dicermati pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

**Tabel 2.2. Kalender Aktivitas Penduduk Kelurahan Pundata Baji**

Jenis aktivitas	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penangkapan ikan sunu dan karamba										■		
Penangkapan ikan balanak										■		
Penangkapan kepiting rajungan					■	■						
Ambari											■	
Kerang									■	■		
Panen padi				■	■	■						
Panen tambak	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, 2007

**Tabel 2.3. Kalender Aktivitas Penduduk Desa Mattiro Bombang**

Jenis aktivitas	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penangkapan kepiting												
Penangkapan ikan tinumbu												
Penangkapan ikan gamasi												
Tambak bandeng												
Rumput laut alami												
Kapal penumpang												

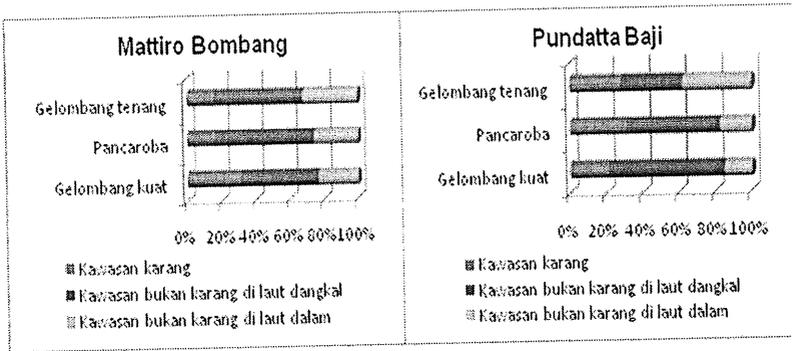
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, 2007

### 2.2.2. Wilayah Pengelolaan

Kekayaan sumber daya alam di Kabupaten Pangkep memerlukan adanya usaha pengelolaan yang memperhatikan semua aspek sumber daya alam yang terkait, termasuk aspek cakupan wilayah pengelolaan. Terkait dengan sasaran program COREMAP, maka wilayah pengelolaan yang akan dijabarkan dalam bagian ini adalah wilayah pengelolaan yang terkait dengan sumber daya laut di Kabupaten Pangkep.

Wilayah tangkapan nelayan di Kabupaten Pangkep mencakup hampir semua wilayah perairan Pangkep dan juga wilayah perairan lain di Pulau Sulawesi. Tiap nelayan memiliki variasi wilayah tangkapan yang sangat bergantung pada kondisi musim, jenis kapal dan alat tangkap, serta jenis komoditas yang ingin ditangkap.

**Gambar 2.1. Preferensi Wilayah Tangkap Nelayan Berdasarkan Kondisi Musim di Desa Mattiro Bombang dan Kelurahan Pundata Baji**



Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008

Kondisi musim sangat berpengaruh terhadap kondisi angin dan gelombang di perairan, sehingga hal ini mempengaruhi keputusan nelayan dalam menentukan wilayah tangkapannya. Temuan penelitian mengenai preferensi wilayah tangkapan berdasarkan kondisi musim oleh nelayan di Mattiro Bombang dan Pundata Baji dapat dicermati pada Gambar 2.1.

Pada musim gelombang kuat dan pancaroba, nelayan di Pundata Baji lebih banyak memilih untuk menangkap ikan pada kawasan bukan karang di perairan dangkal. Ketika kondisi musim beralih menjadi gelombang tenang, persebaran wilayah penangkapan nelayan Pundata Baji lebih beragam, mencakup kawasan karang, kawasan bukan karang di laut dangkal, dan kawasan bukan karang di laut dalam, karena kondisi angin dan gelombang yang mendukung nelayan untuk menjangkau seluruh wilayah penangkapan tersebut. Di wilayah kepulauan Desa Mattiro Bombang, nelayan lebih banyak memilih melaut pada kawasan bukan karang di perairan dangkal pada musim gelombang tenang (51,8 persen) dan musim pancaroba (57,9 persen). Penangkapan sumber daya laut di kawasan karang paling

sering dilakukan oleh nelayan Mattiro Bombang pada musim gelombang kuat, karena kondisi angin dan gelombang yang tidak memungkinkan kebanyakan nelayan untuk menjangkau wilayah tangkapan yang berjarak lebih jauh.

Perbedaan jenis armada dan alat tangkap juga mempengaruhi jarak tempuh nelayan dalam melaut. Nelayan dengan armada dan alat tangkap tradisional umumnya tidak memiliki jarak tempuh melaut yang jauh, akibat keterbatasan sarana dan prasarana yang mereka miliki. Kondisi sebaliknya ditemui pada nelayan yang melaut dengan kapal modern yang dilengkapi dengan mesin motor. Pada umumnya mereka menempuh jarak melaut yang lebih jauh. Namun, karena kadangkala terbentur dengan kendala biaya operasional akibat tingginya harga bahan bakar minyak saat ini, nelayan tidak dapat melaut dalam jarak jauh setiap hari. Selain itu, jenis komoditas laut yang ingin ditangkap nelayan juga mempengaruhi wilayah penangkapan. Umumnya tiap wilayah perairan memiliki komoditas unggulan, sehingga ketika nelayan ingin menjaring jenis-jenis ikan tertentu, mereka memilih melaut ke wilayah perairan tertentu pula, misalnya perairan di sekitar Desa Mattiro Bombang yang kaya akan kepiting.

### 2.2.3. Teknologi Penangkapan

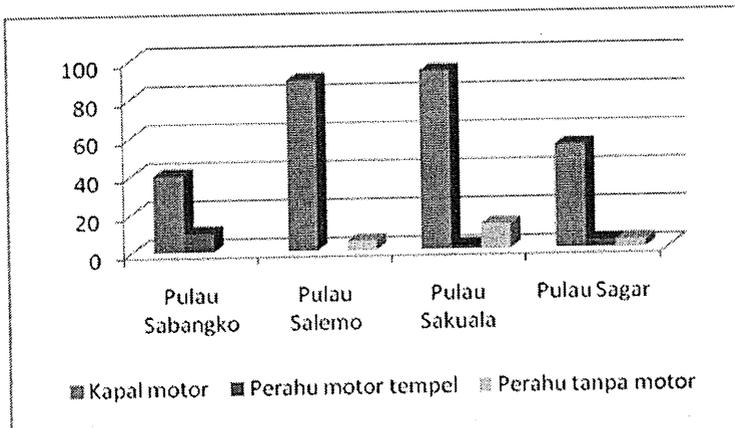
Teknologi penangkapan merupakan salah satu komponen penting yang dapat menentukan besarnya pendapatan nelayan ketika melaut. Teknologi penangkapan mencakup armada dan alat tangkap yang digunakan oleh para nelayan.

Di Pangkep, nelayan umumnya menggunakan armada tangkap seperti perahu motor dalam (*joloro*'), perahu motor tempel (*katinting*) ataupun perahu tanpa motor (*lepa-lepa*). Berdasarkan data dari Dinas Perikanan, lebih dari 80 persen nelayan di Kabupaten Pangkep telah menggunakan perahu bermotor ketika melaut. Selain itu, nelayan di Kabupaten Pangkep juga telah memiliki berbagai variasi jenis alat tangkap, seperti pukat, jaring, bagan ataupun pancing. Jenis alat tangkap yang paling banyak digunakan oleh nelayan Pangkep adalah jaring insang tetap (1068 unit), pancing (267

unit) dan pukat cincin (115 unit) (BPS Kabupaten Pangkep, 2007). Di luar alat-alat tersebut, ada juga alat tangkap lain seperti *trawl*, namun alat ini bersifat ilegal, karena penggunaannya dapat merusak biota laut di sekitar wilayah penangkapan.

Armada tangkap di Desa Mattiro Bombang sebanyak 324 unit tersebar di empat pulau di desa ini, seperti yang dapat diamati pada Gambar 2.2 berikut.

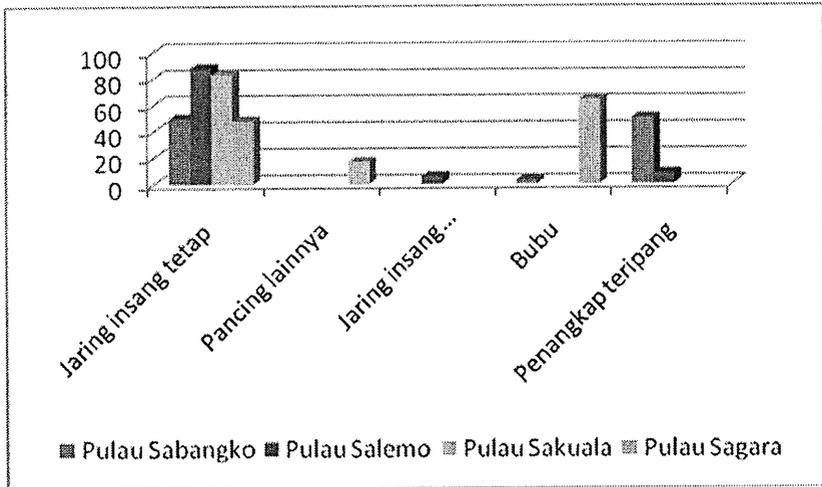
**Gambar 2.2. Kepemilikan Armada Tangkap di Desa Mattiro Bombang**



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, 2007

Alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat di Desa Mattiro Bombang bervariasi, mulai dari pancing sampai dengan alat tangkap yang menggunakan jaring. Target tangkapan dari masing-masing alat tangkap tersebut juga bervariasi. Biasanya untuk jenis alat tangkap yang terbuat dari jaring, target tangkapannya adalah ikan-ikan karang, ikan pada daerah lamun dan kadang-kadang ikan pelagis. Sementara untuk alat tangkap berupa pancing, target tangkapan utamanya adalah ikan sunu dan ikan pelagis (CV Melania Consultant, 2005). Jenis alat tangkap yang digunakan nelayan di Desa Mattiro Bombang beserta jumlahnya dapat dicermati pada Gambar 2.3 berikut ini.

**Gambar 2.3. Kepemilikan Alat Tangkap di Desa Mattiro Bombang**



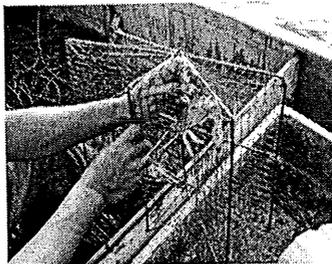
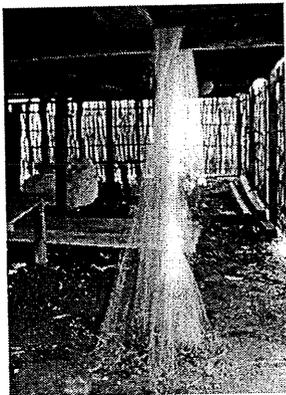
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, 2007

Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 84,5 persen responden di Desa Mattiro Bombang memiliki kapal/perahu. Tingginya kepemilikan perahu di desa ini karena sebagian besar penduduk desa ini bekerja sebagai nelayan. Hal ini berbeda dengan di Kelurahan Pundata Baji yang memiliki diversifikasi pekerjaan yang jauh lebih banyak. Kepemilikan perahu di kelurahan ini hanya sekitar 10 persen dari keseluruhan responden. Penduduk di kelurahan ini lebih banyak yang memiliki alat transportasi komersil ataupun lahan tambak sebagai sumber mata pencahariannya.

Jenis alat tangkap yang dominan digunakan oleh nelayan Mattiro Bombang adalah pancing dan jaring. Di samping untuk menangkap ikan, jaring dan pancing juga digunakan untuk menangkap kepiting. Namun akhir-akhir ini terjadi perubahan alat tangkap, yaitu bubu mulai digunakan untuk menangkap sumberdaya laut tersebut (Gambar 2.4). Penggunaan bubu dilatarbelakangi pertimbangan efisiensi, karena lebih tahan lama, tidak mudah rusak, menghemat tenaga, dan dapat meminimalkan resiko kehilangan atau

dicuri. Jenis alat tangkap di Kelurahan Pundata Baji tidak jauh berbeda dengan jenis alat tangkap di Desa Mattiro Bombang, meskipun dengan jumlah unit yang jauh lebih sedikit. Hal ini dikarenakan rendahnya proporsi penduduk kelurahan ini yang bekerja sebagai nelayan.

**Gambar 2.4. Alat Tangkap Nelayan Pulau Salemo (Jaring dan Bubu)**



#### **2.2.4 Sarana dan Prasarana**

Pembangunan wilayah merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk setempat. Pencapaian kesejahteraan penduduk tidak hanya ditinjau dari pembangunan di bidang ekonomi, misalnya peningkatan pendapatan, namun juga dapat diukur dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia di wilayah setempat. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan proses memperluas pilihan-pilihan masyarakat. Dari berbagai pilihan, terdapat tiga pilihan yang dianggap paling penting dalam rangka pencapaian kesejahteraan penduduk, yaitu panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak (UNDP, 2005). Oleh karena itu,

ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pilihan-pilihan masyarakat tersebut sangat diperlukan.

Sejalan dengan kondisi geografis Kabupaten Pangkep yang didominasi wilayah perairan dan kaya akan sumber daya laut, ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sumber daya laut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya laut antara lain mencakup ketersediaan jaringan pemasaran dan pengembangan teknologi pasca panen.

Beraneka ragam komoditas perikanan hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Pangkep umumnya telah memiliki jaringan pemasarannya masing-masing. Sebagai contoh, penjualan hasil tangkapan nelayan di Desa Mattiro Bombang dan Kelurahan Pundata Baji dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dijual kepada penampung lokal yang berada di lokasi setempat ataupun dijual langsung oleh nelayan ke pasar atau tempat pelelangan ikan.

Nelayan yang menjual hasil tangkapannya ke penampung lokal di lokasi setempat umumnya telah memiliki keterikatan dengan penampung lokal tertentu, sehingga mereka hanya akan menyerahkan hasil tangkapannya kepada penampung yang telah menjadi langganannya. Hubungan di antara kedua pihak terjadi karena adanya saling ketergantungan. Penampung umumnya memberikan bantuan modal tanpa bunga kepada para nelayan, dengan batas waktu pengembalian yang tidak ditentukan secara ketat. Hal ini secara tidak langsung dapat mengikat para nelayan untuk menjual hasil tangkapannya kepada penampung yang telah memberikan bantuan, karena anggapan adanya utang budi nelayan kepada penampung tersebut. Meskipun dilatarbelakangi hubungan pinjaman modal pada awal kerjasama, keterikatan ini bukan semata-mata dalam bentuk keterikatan ekonomi, tetapi lebih karena faktor budaya yaitu keinginan untuk membalas budi. Bagi para nelayan Pangkep yang umumnya bersuku Bugis, utang budi menyangkut harga diri mereka sebagai orang Bugis, sehingga mereka tetap menyerahkan hasil tangkapan mereka pada penampung yang sama, meskipun mereka

mengetahui ada penampung lain yang membeli hasil tangkapan nelayan dengan harga yang lebih tinggi.

Selain dijual ke penampung, hasil tangkapan nelayan umumnya juga dijual langsung ke pasar atau tempat pelelangan ikan. Para nelayan di Kabupaten Pangkep biasanya menjual hasil tangkapannya di pasar yang berlokasi di Pangkep ataupun tempat pelelangan ikan di Makassar, bahkan nelayan di wilayah kepulauan memiliki jaringan pemasaran sampai ke pasar di Kabupaten Barru. Meskipun hasil tangkapan tersebut dibawa ke pasar atau tempat pelelangan ikan, nelayan tidak dapat menjual langsung hasil tangkapannya, karena harus melalui agen/distributor yang biasanya telah menjadi langganan para nelayan. Agen/distributor ini memiliki peran serupa dengan penampung dengan juga memberikan bantuan modal bagi nelayan. Keuntungan yang didapat agen/distributor sebesar 5 persen dari penjualan hasil tangkapan nelayan.

Pemilihan lokasi penjualan hasil tangkapan oleh para nelayan umumnya terkait dengan kedekatan jarak antara wilayah penangkapan mereka dengan pasar. Ketika melaut di perairan dangkal di sekitar wilayah Pangkep, para nelayan lebih memilih untuk menjual hasil tangkapan di pasar yang berada di wilayah Pangkep. Namun ketika melaut di perairan dalam, untuk efisiensi waktu dan biaya operasional, biasanya para nelayan lebih memilih menjual ke pasar atau tempat pelelangan ikan di Makassar atau Barru, karena kedekatan wilayah tangkapan dengan Kota Makassar ataupun Kabupaten Barru.

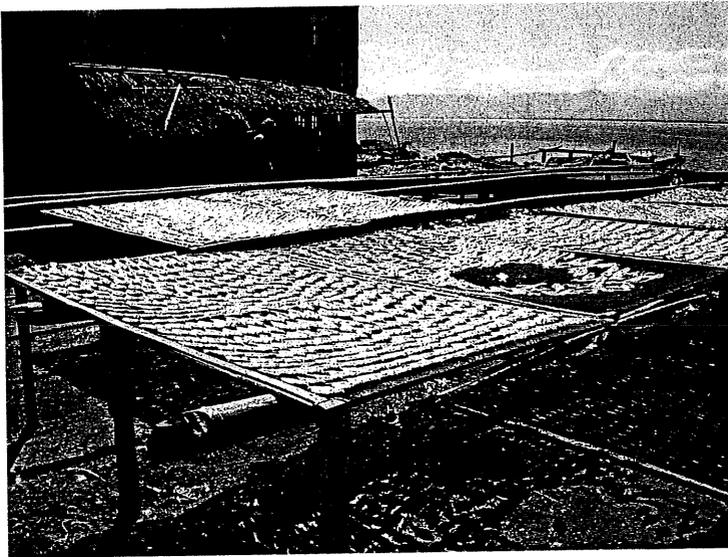
Terkait dengan teknologi pasca panen, pada umumnya nelayan di Pangkep menjual langsung hasil tangkapannya tanpa ada usaha untuk mengolahnya terlebih dahulu dalam rangka menambah nilai jual komoditas tersebut. Hal ini utamanya disebabkan masih rendahnya penguasaan teknologi dan pengetahuan nelayan setempat mengenai pengolahan sumberdaya laut. Sejauh ini, pengolahan sumber daya laut yang dilakukan di wilayah penelitian hanya terbatas pada usaha pengupasan dan proses pengemasan kepiting (Gambar 2.5), yang dilakukan oleh beberapa penampung besar, sebelum dikirim ke industri di Kota Makassar.

**Gambar 2.5. Industri Pengupasan Kepiting di Desa Mattiro Bombang**



Selain itu, di beberapa wilayah perdesaan di Pangkep terdapat pula beberapa industri rumah tangga di bidang perikanan. Pada industri rumah tangga ini, para nelayan mengolah secara sederhana hasil tangkapannya, untuk selanjutnya dipasarkan ke konsumen, misalnya industri pengolahan ikan asin di Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang (Gambar 2.6).

**Gambar 2.6. Industri Pengolahan Ikan Asin oleh Masyarakat Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang**



Selain ketersediaan sarana dan prasarana dalam bidang pengelolaan sumber daya laut, kebutuhan akan penyediaan sarana dan prasarana lainnya di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan prasyarat mutlak dalam rangka pencapaian kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Sarana dan prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan dapat mendukung pilihan pencapaian kesejahteraan penduduk berupa panjang umur dan sehat serta berpendidikan.

Ketersediaan sarana pendidikan di Kabupaten Pangkep ditandai dengan keberadaan sekolah, mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Pada tahun 2006, jumlah sekolah di kabupaten ini mencapai 300 SD negeri dan swasta, 38 SMP negeri dan swasta dan 21 SMA negeri dan swasta, yang tersebar pada 12 kecamatan di Kabupaten Pangkep ([www.pangkep.go.id](http://www.pangkep.go.id)). Ketersediaan sarana pendidikan juga dapat diamati dari rasio murid-

guru dan rasio murid-sekolah. Tidak ada angka ideal sebagai patokan rasio antara guru dan murid ini, namun semakin kecil angka ini akan menggambarkan beban seorang guru yang semakin kecil pula. Rasio murid-guru di Kabupaten Pangkep di tingkat SD sebesar 17,70, di tingkat SMP sebesar 11,96, dan di tingkat SMA 11,27. Sementara itu kecukupan fasilitas pendidikan dapat dicermati melalui rasio murid-sekolah. Di Kabupaten Pangkep, rasio murid-sekolah di tingkat SD sebesar 140,60, di tingkat SMP sebesar 272,84, di tingkat SMA sebesar 302,71 (BPS & Bappeda Kabupaten Pangkep, 2006).

Kabupaten Pangkep juga telah memiliki satu perguruan tinggi yaitu Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Sesuai dengan potensi wilayah yang dimiliki, Politeknik Pertanian Pangkep ini mengkhususkan diri pada sektor perikanan, terutama dalam bidang budidaya perikanan, teknologi perikanan dan agribisnis perikanan. Keberadaan perguruan tinggi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Pangkep ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sekolah pada penduduk berumur 19-24 tahun dan sekaligus juga mendorong kemajuan bidang perikanan di Pangkep.

Kelurahan Pundata Baji telah memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap, terdiri dari 2 SD, 1 SMP dan 1 SMA. Sementara itu, ketersediaan sarana pendidikan di Desa Mattiro Bombang mencakup 5 SD negeri (tersebar di 4 pulau yang terletak di Desa Mattiro Bombang) dan 1 SMP swasta (terletak di Pulau Salemo). Pada tahun ajaran 2008/2009, rencananya mulai dioperasikan satu SMA swasta di desa ini yang juga terletak di Pulau Salemo.

Letak geografis Desa Mattiro Bombang yang terdiri dari empat pulau merupakan tantangan tersendiri dalam pencapaian pendidikan oleh penduduk wilayah ini. Ditinjau dari kondisi geografis, penduduk Kelurahan Pundata Baji memiliki lebih banyak kemudahan dalam mengakses sarana pendidikan karena terletak di wilayah daratan. Hal berbeda terjadi pada penduduk Mattiro Bombang, terutama yang bermukim di Pulau Sakuala, Sagara, dan Sabangko. Keberadaan SMP dan SMA yang hanya terletak di Pulau Salemo membuat para siswa harus menempuh perjalanan laut setiap hari untuk bersekolah. Namun, para penduduk Desa Mattiro

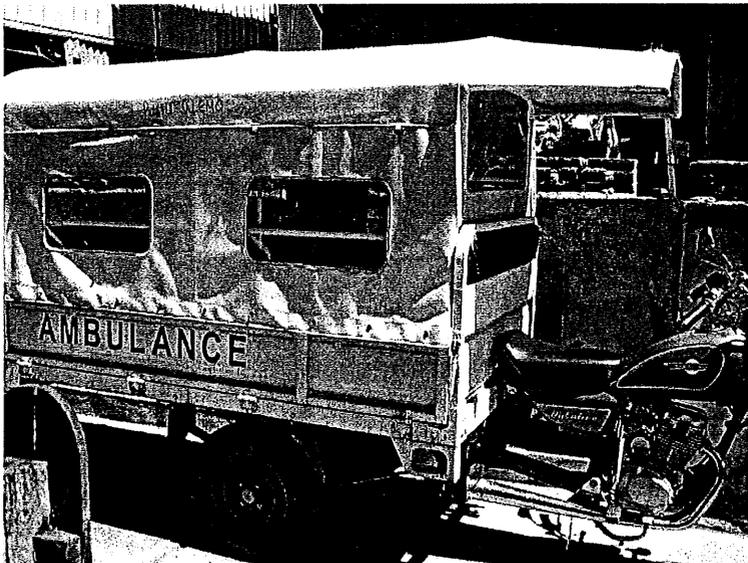
Bombang tidak perlu khawatir mengenai biaya pendidikan, karena dari tingkat SD hingga SMA, biaya pendidikan di wilayah ini gratis. Pembebasan biaya pendidikan ini tidak hanya terjadi di Mattiro Bombang, tapi juga di seluruh wilayah Pangkep. Hal ini dapat terjadi karena komitmen pemerintah daerah Kabupaten Pangkep untuk membebaskan biaya pendidikan dari tingkat SD hingga SMA, dengan alokasi sumber dana yang berasal dari APBN dan APBD Kabupaten Pangkep.

Sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia di Kabupaten Pangkep meliputi rumah sakit dan puskesmas beserta tenaga medisnya. Selain keberadaan 2 buah rumah sakit di kabupaten ini, terdapat pula 18 buah puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pangkep. Aksesibilitas yang rendah pada beberapa kecamatan di Pangkep, terutama yang terletak di wilayah kepulauan, menyulitkan jangkauan kerja puskesmas di wilayah setempat. Oleh karena itu, diperlukan pula keberadaan fasilitas layanan kesehatan penunjang seperti puskesmas pembantu (pustu). Jumlah puskesmas pembantu di Kabupaten Pangkep mencapai 54 buah. Ketersediaan tenaga medis di Kabupaten Pangkep cukup memadai dengan ditunjang oleh keberadaan 69 orang dokter, 118 bidan, 310 tenaga perawat, 174 perawat non medis dan 102 tenaga kesehatan lainnya, yang tersebar di berbagai sarana pelayanan kesehatan pada tiap kecamatan di Kabupaten Pangkep (BPS Kabupaten Pangkep, 2007).

Selain ketersediaan sarana prasarana tersebut, usaha peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan juga dilakukan melalui keberadaan Usaha Kesehatan Bersama Masyarakat (UKBM). Salah satu jenis UKBM yang dikembangkan di Kabupaten Pangkep adalah posyandu. Jumlah posyandu di Kabupaten Pangkep cukup banyak, terbukti dari 102 desa/kelurahan di kabupaten ini telah terdapat sebanyak 300 buah posyandu (BPS & Bappeda Kabupaten Pangkep, 2006). Semakin banyaknya posyandu di wilayah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat setempat karena umumnya posyandu merupakan jenis sarana kesehatan yang relatif mudah diakses oleh masyarakat karena keberadaannya yang memang di tengah-tengah masyarakat pengguna.

Fasilitas kesehatan yang tersedia di di Kelurahan Pundata Baji adalah 1 buah puskesmas dan 1 buah puskesmas pembantu, serta adanya kegiatan posyandu dan pelayanan pos/klinik KB. Sementara itu, di Desa Mattiro Bombang terdapat 1 puskesmas pembantu yang terletak di Pulau Salemo. Sesuai dengan kondisi pulau yang tidak terlalu besar serta kondisi jalan yang sempit, kendaraan operasional puskesmas pembantu di wilayah ini berupa motor yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagaimana layaknya sebuah ambulans (Gambar 2.7)

**Gambar 2.7. Kendaraan Operasional Puskesmas Pembantu di Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang**



### 2.2.5. Program dan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Laut

Kelembagaan/pranata sosial masyarakat yang berkembang di Kabupaten Pangkep umumnya hampir sama dengan di setiap desa/kelurahan di kabupaten ini. Sebagai contoh, Kelurahan Pundata Baji memiliki lembaga sosial kemasyarakatan seperti LKMD, PKK, karang taruna, majelis ta'lim, dan remaja mesjid. Jenis kelembagaan serupa terdapat juga di Desa Mattiro Bombang. Keberadaan lembaga sosial kemasyarakatan ini umumnya dikoordinasi oleh aparat pemerintahan desa ataupun para pemuka desa/kelurahan.

Khusus untuk pengelolaan sumber daya laut, terdapat pula beberapa lembaga kemasyarakatan yang memfokuskan kegiatan pada aspek ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat dari keberadaan program pengelolaan sumber daya laut yang dapat ditemukan di lokasi penelitian Desa Mattiro Bombang dan Kelurahan Pundata Baji. Kegiatan pengelolaan sumber daya laut di Desa Mattiro Bombang ditandai dengan keberadaan beberapa lembaga simpan pinjam bagi masyarakat di lokasi penelitian. Kebanyakan lembaga simpan pinjam ini memberikan bantuan pinjaman uang bagi penduduk yang membutuhkan tambahan modal usaha. Di Desa Mattiro Bombang, setidaknya ada empat lembaga kemasyarakatan yang melakukan kegiatan simpan pinjam bagi masyarakat setempat. Selain dana simpan pinjam yang digulirkan oleh Coremap melalui program *seed fund*, ada juga program KUB (Koperasi Usaha Bersama) yang didanai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, program PPK (Program Pengembangan Kecamatan) oleh pemerintah daerah, dan program Koperasi Syariah. Masing-masing penyelenggara program di wilayah ini berkoordinasi untuk memilih penerima dana simpan pinjam. Hal ini dilakukan dalam rangka pemerataan pengguliran dana dan menghindari adanya anggota masyarakat yang mendapat bantuan dari beberapa program dalam waktu yang sama.

Selain kegiatan simpan pinjam, ada pula program pengelolaan sumberdaya laut yang sarasannya aspek budidaya dan perlindungan wilayah laut yaitu program MCRMP (*Marine and Coastal Resources Management Project*). Program Departemen Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh konsultan dari Universitas

Hasanuddin ini mengembangkan budidaya ikan hias dan juga menentukan daerah perlindungan laut dalam rangka konservasi sumber daya laut. Selain itu, terdapat pula kelompok usaha yang mengolah sumber daya perairan di wilayah ini, seperti kelompok usaha rumput laut. Sayangnya, usaha ini masih dalam lingkup yang sangat kecil, karena belum banyak penduduk Desa Mattiro Bombang yang memiliki mata pencaharian di bidang budidaya rumput laut.

Kehadiran beberapa lembaga terkait dengan pengelolaan sumberdaya laut di Mattiro Bombang belum dilengkapi dengan keberadaan lembaga pengawasan sumber daya laut yang memadai. Padahal kekayaan potensi sumberdaya laut yang dimiliki Desa Mattiro Bombang melahirkan tantangan besar dalam upaya pengelolaan dan pengawasannya, terbukti dengan banyaknya nelayan dari luar lokasi yang menangkap ikan pada wilayah perairan desa ini. Kehadiran nelayan tersebut kerap kali menjadi sumber dari kerusakan sumber daya laut di wilayah perairan Mattiro Bombang, karena mereka menangkap ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti bom, *trawl* dan *mini trawl*

Di Kelurahan Pundata Baji, kehadiran kegiatan pengelolaan sumber daya laut tidak sebanyak di Desa Mattiro Bombang. Terkait dengan aktivitas ekonomi, di wilayah ini hanya terdapat dua kegiatan simpan pinjam, yaitu *seed fund* yang digulirkan Coremap dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri (sebelumnya bernama PPK) yang digulirkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melalui pemerintah daerah.

Berdasarkan pengamatan di kedua daerah penelitian, dapat disimpulkan bahwa kelembagaan yang ada di tingkat desa di Kabupaten Pangkep umumnya lebih banyak melakukan kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Belum banyak lembaga kemasyarakatan yang memberi perhatian pada masalah keamanan perairan atau kelestarian sumber daya laut. Meskipun pada umumnya nelayan di Pangkep memiliki pengetahuan tentang budidaya biota laut dan menyadari pentingnya pelestarian sumberdaya laut, namun ketika berbenturan dengan kepentingan ekonomi, mereka terpaksa mengabaikan aspek budidaya biota laut tersebut. Contohnya, di Desa

Mattiro Bombang, banyak nelayan kepiting yang menyadari pentingnya pelestarian kepiting dengan tidak mengambil kepiting yang masih berukuran kecil. Namun, ketika dihadapkan pada musim paceklik saat jumlah panen kepiting tidak terlalu banyak, para nelayan terpaksa menangkap juga kepiting berukuran kecil.

Kelestarian sumber daya laut yang sulit dipertahankan oleh para nelayan Kabupaten Pangkep juga disebabkan kehadiran kapal-kapal nelayan yang menggunakan bom untuk menangkap ikan di wilayah perairan mereka. Para nelayan tidak berdaya menghadapi kapal-kapal tersebut karena kemampuan armada mereka sangat terbatas. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menyulitkan untuk melakukan tindakan yang tegas dalam menindak para pelaku kejahatan yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Pangkep.

## **2.3. KEPENDUDUKAN**

### **2.3.1. Jumlah dan Komposisi Penduduk**

Pada tahun 2006, jumlah penduduk Kabupaten Pangkep mencapai 293.221 jiwa dan 63.770 RT, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,82 persen per tahun (selama periode tahun 2002-2006). Dengan wilayah seluas 1112,29 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk di kabupaten ini 264 jiwa/km<sup>2</sup> (BPS Kabupaten Pangkep, 2007). Persebaran penduduk di Kabupaten Pangkep menurut kecamatan, jenis kelamin, serta kepadatan penduduk dapat diamati pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, Kepadatan dan Rasio Jenis Kelamin, 2006**

Kecamatan	Jenis Kelamin		Lk+Pr	Kepadatan Penduduk (km <sup>2</sup> )	Rasio Jenis Kelamin
	Lk	Pr			
Lk Tangaya	7.964	8.534	16.498	137	93.3
Lk Kalmas	5.536	5.840	11.376	124	94.8
Lk Tupabbiring	14.769	15.595	30.364	217	94.7
Pangkajene	18.255	20.459	38.714	817	89.1
Balocci	8.008	8.256	16.294	114	96.6
Bungoro	17.526	18.352	35.878	398	95.4
Labakkang	19.214	21.774	40.988	416	88.2
Ma'rang	15.527	15.874	31.401	417	97.8
Segeri	9.526	10.307	19.833	253	92.4
Minasa Te'ne	13.835	15.589	29.424	385	88.7
Tondong	4.567	4.966	9.533	86	92.0
Tallasa					
Mandalle	6.505	6.413	12.918	322	101.4
Jumlah	141.332	151.989	293.221	264	92.9

Sumber: BPS Kabupaten Pangkep, 2007

Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, maka rasio jenis kelamin di Kabupaten Pangkep sebesar 92,9. Angka ini menunjukkan rasio penduduk laki-laki terhadap 100 orang penduduk perempuan di wilayah ini. Pola rasio jenis kelamin seperti ini terjadi pula pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pangkep, kecuali pada Kabupaten Mandalle yang memiliki rasio jenis kelamin di atas 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Berdasarkan kelompok umur, sekitar 30 persen penduduk Kabupaten Pangkep berada pada kelompok umur muda (0-14 tahun). Sekitar 65 persen penduduk berada dalam kelompok umur produktif secara ekonomi (15-64 tahun) dan sisanya, 4,9 persen adalah penduduk lanjut usia (BPS Kabupaten Pangkep, 2007). Berdasarkan proporsi kelompok umur tersebut, maka rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Pangkep tergolong rendah yaitu sebesar 54,29, yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif hanya menanggung kira-kira 54 orang usia non-produktif. Beban ketergantungan penduduk yang rendah dapat menggambarkan potensi ekonomi, berupa penduduk usia produktif, di suatu wilayah,

sehingga dapat menjadi modal besar dalam usaha pembangunan di wilayah tersebut.

Kecamatan Labakkang merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak di Kabupaten Pangkep, diikuti oleh Kecamatan Pangkajene dan Kecamatan Ma'rang. Ketiga kecamatan ini juga merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi. Sebaliknya, Kecamatan Tondong Tallasa dan Balocci merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah. Terjadinya perbedaan kepadatan penduduk antarkecamatan yang cukup besar di Kabupaten Pangkep terutama dipengaruhi oleh perbedaan kondisi geografis. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi umumnya terletak di wilayah topografi dataran rendah, sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk rendah terletak di wilayah topografi pegunungan. Untuk kecamatan di wilayah kepulauan, Liukang Tuppabiring merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi.

Desa Mattiro Bombang dengan luas wilayah 22 km<sup>2</sup> memiliki kepadatan penduduk 113 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Desa Mattiro Bombang terdiri dari 2.890 jiwa dan 557 rumah tangga (BPS Kabupaten Pangkep, 2007), yang tersebar di empat pulau yaitu Pulau Salemo, Pulau Sagara, Pulau Sabangko, dan Pulau Sakuala. Proporsi penduduk terbesar di desa ini berada di Pulau Salemo, yang juga merupakan pulau terluas sekaligus pusat pemerintahan Desa Mattiro Bombang. Pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di desa ini sangat rendah, bahkan mendekati nol. Hal ini terutama disebabkan tingginya angka migrasi keluar dari desa ini, terutama penduduk laki-laki. Keinginan untuk mencari taraf penghidupan yang lebih baik serta terbatasnya lapangan pekerjaan di wilayah kepulauan seperti Desa Mattiro Bombang mendorong tingginya migrasi keluar dari desa ini. Daerah tujuan utama para migran keluar dari Desa Mattiro Bombang umumnya merupakan wilayah yang telah banyak didiami suku Bugis, misalnya di Kalimantan Timur atau Kalimantan Selatan.

Kelurahan Pundata Baji dengan luas wilayah 5,22 km<sup>2</sup> memiliki jumlah penduduk cukup besar yaitu sebesar 4069 jiwa,

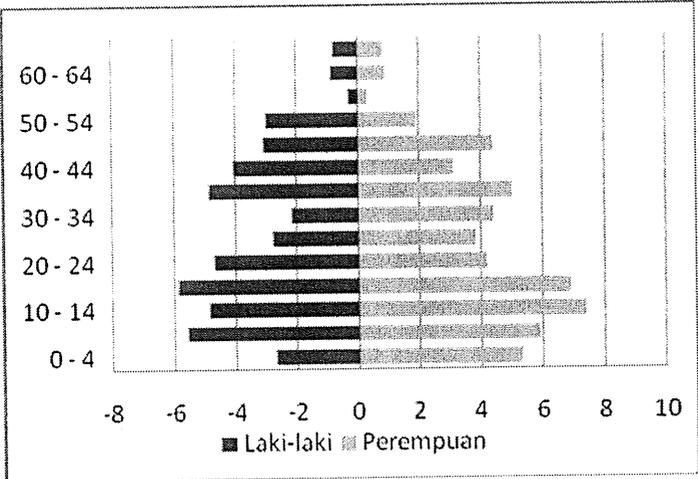
dengan kepadatan penduduk 778 jiwa/km<sup>2</sup>. Dibandingkan dengan wilayah kepulauan, pertumbuhan penduduk di wilayah pesisir ini cukup tinggi. Hal ini antara lain disebabkan karena ketersediaan lapangan kerja yang cukup besar di wilayah ini dan akses yang cukup mudah menuju pusat kota dan ibukota propinsi, sehingga dapat mengurangi angka migrasi keluar di kelurahan ini. Penduduk usia sekolah di Pundata Baji mencapai sekitar 28 persen dari keseluruhan penduduk, sedangkan penduduk usia kerja (usia 15-49 tahun) mencapai 65 persen dari keseluruhan penduduk (Monografi Kelurahan Pundata Baji, 2008). Dengan demikian, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio ketergantungan penduduk di wilayah ini cukup rendah.

Data kependudukan di tingkat rumah tangga sampel dapat memberikan gambaran lebih rinci mengenai kondisi kependudukan di tiap daerah penelitian. Salah satu variabel kependudukan yang dapat dijelaskan adalah komposisi umur anggota rumah tangga (ART) menurut kelompok umur dan jenis kelamin, yang disajikan pada Gambar 2.8 dan Gambar 2.9.

Diagram komposisi umur dan jenis kelamin ART tersebut dapat menunjukkan bahwa komposisi penduduk di kedua lokasi penelitian tidak jauh berbeda dengan komposisi penduduk di Kabupaten Pangkep. Proporsi penduduk yang berada pada kelompok umur produktif (15-64 tahun) sekitar 60 persen, yang diikuti proporsi penduduk usia muda (0-15 tahun) di kisaran 30 persen, serta proporsi penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) yang kurang dari 5 persen. Jika dicermati berdasarkan jenis kelamin, meskipun kedua lokasi tersebut memperlihatkan tren yang sama yaitu jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, namun proporsinya menunjukkan perbedaan yang cukup jauh antar kedua lokasi penelitian. Di Kelurahan Pundata Baji, proporsi penduduk perempuan 50,3 persen dan penduduk laki-laki 49,7 persen, sedangkan di Desa Mattiro Bombang, proporsi penduduk perempuan 54,3 persen dan penduduk laki-laki 45,7

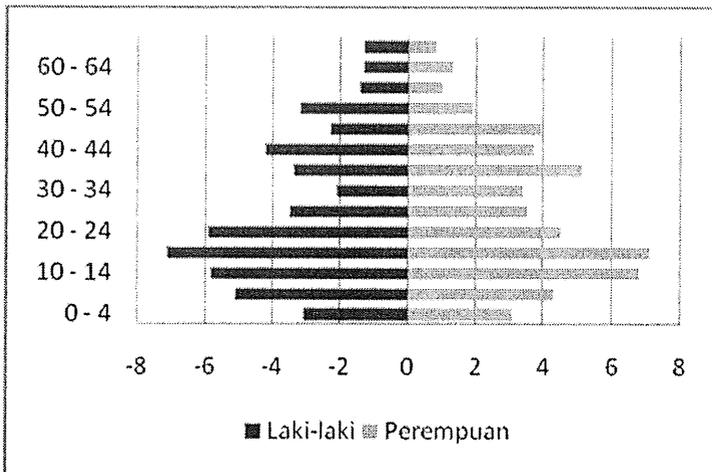
persen. Rendahnya proporsi penduduk laki-laki di Desa Mattiro Bombang terutama terjadi pada kelompok usia muda dan kelompok usia produktif, yang kemungkinan banyak bermigrasi keluar dari desa.

**Gambar 2.8. Distribusi ART Sampel Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Desa Mattiro Bombang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2008 (%)**



Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi, COREMAP, 2008

**Gambar 2.9. Distribusi ART Sampel Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kelurahan Pundata Baji Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2008 (%)**



Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008

### 2.3.2. Pendidikan

Tingkat pencapaian pendidikan di suatu wilayah dapat diukur dengan berbagai indikator. Indikator-indikator tersebut antara lain angka melek huruf, tingkat partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk setempat.

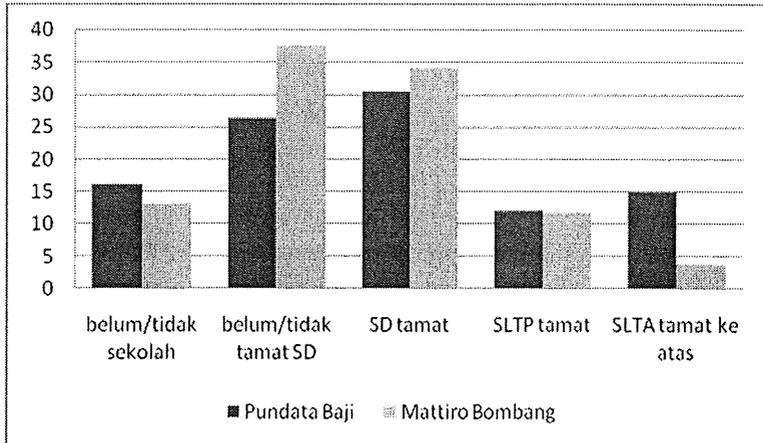
Publikasi BPS (2006) menunjukkan bahwa 70,19 persen penduduk Kabupaten Pangkep yang berumur 10 tahun ke atas memiliki tingkat pendidikan tertinggi SD ke bawah. Meskipun proporsi ini cukup besar namun telah menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2005, penduduk yang berpendidikan tertinggi SD ke bawah sebesar 70,94 persen. Penurunan proporsi penduduk berpendidikan SD ke bawah diikuti

meningkatnya proporsi penduduk yang memiliki jenjang pendidikan tertinggi di SLTP (dari 11,03 persen menjadi 12,11 persen) dan di SMU (12,35 persen menjadi 13,60 persen). Sayangnya, peningkatan pada tingkat SMP dan SMU ini tidak diikuti pada tingkat perguruan tinggi, sebab pada tahun 2006 hanya 4,11 persen penduduk Kabupaten Pangkep yang berumur 10 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan di perguruan tinggi.

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator lain yang dapat memberikan gambaran informasi sejauh mana tingkat pendidikan yang telah dicapai penduduk. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Pangkep sekitar 6,3 tahun pada tahun 2006 (BPS & Bappeda Kabupaten Pangkep, 2006). Hal ini mengindikasikan rata-rata pendidikan penduduk Pangkep hanya mencapai sekolah dasar. Rendahnya nilai rata-rata lama sekolah di Pangkep juga sejalan dengan rendahnya angka partipasi sekolah (APS) di wilayah ini. APS merupakan persentase penduduk umur tertentu yang masih sekolah terhadap seluruh penduduk usia tersebut. Di Kabupaten Pangkep, APS pada kelompok usia sekolah dasar 7-12 tahun tergolong tinggi yaitu sebesar 95,61 persen. Namun, nilai APS ini menjadi semakin menurun pada kelompok usia berikutnya, seperti APS pada kelompok usia 13-15 tahun 74,89 persen, APS pada kelompok usia 16-18 tahun sebesar 43,02 persen, dan APS untuk kelompok umur 19-24 tahun hanya sebesar 6,78 persen (BPS & Bappeda Kabupaten Pangkep, 2006).

Pola capaian tingkat pendidikan di Kabupaten Pangkep terjadi pula pada dua lokasi penelitian, Desa Mattiro Bombang dan Kelurahan Pundata Baji, seperti yang dapat dicermati pada Gambar 2.10.

**Gambar 2.10. Distribusi Anggota Rumah Tangga Terpilih Usia 7 tahun ke atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lokasi Penelitian, 2008 (%)**



Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008

Dari rumah tangga terpilih pada lokasi penelitian, proporsi terbesar tingkat pendidikan penduduk berumur 10 tahun ke atas adalah tamat SD ke bawah. Di Desa Mattiro Bombang, sekitar 84 persen responden berpendidikan SD ke bawah, sedangkan di Kelurahan Pundata Baji sekitar 72 persen responden yang berpendidikan SD ke bawah. Hanya 15 persen responden di Kelurahan Pundata Baji yang berpendidikan tamat SLTA ke atas. Kondisi di kelurahan ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Desa Mattiro Bombang sebab proporsi responden yang tamat SLTA ke atas hanya mencapai sekitar 4 persen. Hal ini dapat memberikan gambaran mengenai masih rendahnya pencapaian pendidikan di kedua lokasi penelitian dan juga di seluruh wilayah Kabupaten Pangkep.

### 2.3.3. Pekerjaan

Pada tahun 2005, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Pangkep mencapai 222.669 jiwa, sedangkan jumlah angkatan kerja di wilayah ini mencapai 120.618 jiwa, dengan pertumbuhan angkatan kerja di Kabupaten Pangkep mencapai 11,19 persen per tahun dalam periode waktu 2004-2005 (BPS & Bappeda Kabupaten Pangkep, 2006). Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Pangkep mencapai 54,17 persen, yang dapat mengindikasikan cukup banyak penduduk usia kerja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, yang umumnya terdiri dari penduduk yang masih bersekolah dan ibu rumah tangga.

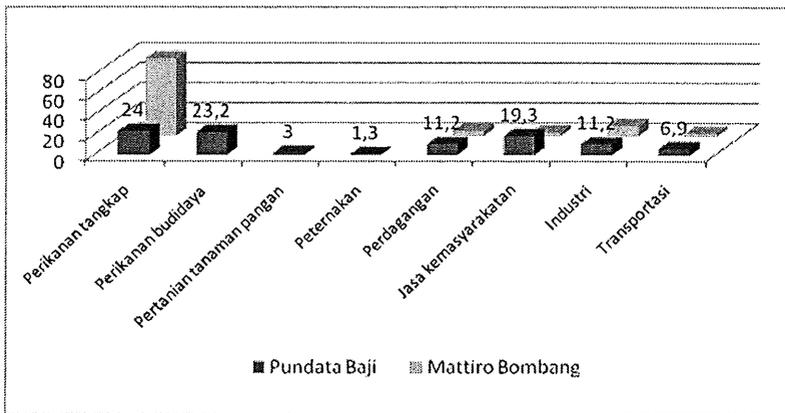
Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, maka sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 49,54 persen, dan kemudian diikuti oleh sektor jasa 15,99 persen, sektor perdagangan 14,18 persen dan sektor industri 5,20 persen (BPS & Bappeda Kabupaten Pangkep, 2006). Besarnya proporsi pekerja di sektor pertanian di Kabupaten Pangkep dapat dikaitkan dengan tingkat pendidikan tertinggi tenaga kerja yang umumnya hanya tamat SD, sebab pekerjaan di sektor pertanian, umumnya tidak menuntut pendidikan atau keterampilan yang tinggi. Lebih dari tiga per empat jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pangkep berpendidikan rendah (tamat SD ke bawah dan SMP), sedangkan jumlah angkatan kerja berpendidikan sedang (SMA dan sederajat) mencapai 16,05 persen, dan yang berpendidikan tinggi hanya sebesar 8,71 persen (BPS & Bappeda Kabupaten Pangkep, 2006). Rendahnya persentase angkatan kerja berpendidikan tinggi di Kabupaten Pangkep, antara lain dapat dipengaruhi pilihan para angkatan kerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan tinggi untuk bekerja di wilayah perkotaan di sekitar Pangkep, misalnya Kota Makassar, yang menjanjikan lapangan usaha yang lebih beragam dan kondisi perekonomian yang jauh lebih baik.

Jika ditinjau dari tingkat pengangguran, maka tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Pangkep sebesar 9,81 persen. Jika dipilah berdasarkan jenis kelamin, maka TPT perempuan sebesar 11,88 persen dan TPT laki-laki 7,56 persen (BPS & Bappeda

Kabupaten Pangkep, 2006). Tingginya nilai TPT perempuan dibandingkan dengan TPT laki-laki di Kabupaten Pangkep dapat memberikan gambaran mengenai ketidaktersediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi fisik perempuan ataupun pencari kerja perempuan lebih selektif dalam memilih pekerjaan.

Kondisi fisik wilayah mempengaruhi preferensi pekerjaan penduduk setempat, oleh karena itu terdapat perbedaan dominasi sektor pekerjaan penduduk pada setiap tipologi wilayah. Gambaran lebih jelas mengenai perbedaan preferensi pekerjaan penduduk Kelurahan Pundata Baji yang mewakili wilayah daratan dan Desa Mattiro Bombang yang mewakili wilayah kepulauan, dapat dicermati pada Gambar 2.11.

**Gambar 2.11. Distribusi ART Terpilih Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Lokasi Penelitian, 2008 (%)**



Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008

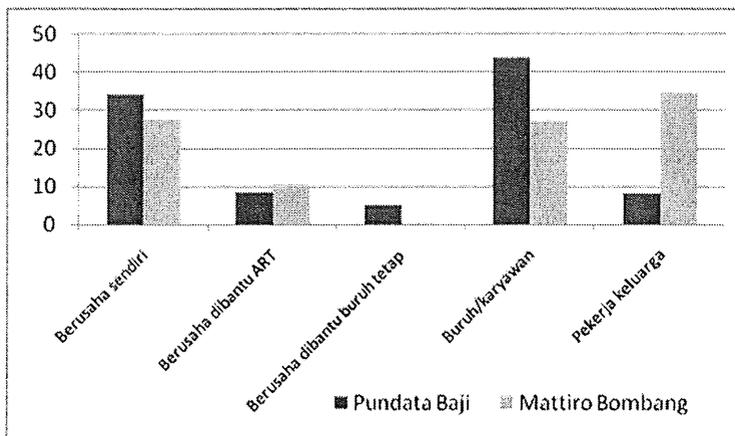
Sekitar 77 persen dari keseluruhan responden di Desa Mattiro Bombang bekerja pada sektor perikanan tangkap. Hal ini sangat terkait dengan kondisi desa ini yang merupakan wilayah kepulauan dan kaya akan sumberdaya laut, sehingga hampir seluruh rumah tangga di Desa Mattiro Bombang memiliki anggota rumah tangga

yang bekerja sebagai nelayan. Sektor lainnya yang menyerap tenaga kerja di Desa Mattiro Bombang adalah industri (10,5 persen), sektor perdagangan (5 persen), sektor jasa kemasyarakatan, dan transportasi (3 persen). Sektor industri yang berkembang di Desa Mattiro Bombang adalah industri pengupasan kepiting. Industri ini memiliki nilai penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi, sebab umumnya sekitar 100 orang tenaga kerja dibutuhkan untuk industri ini. Menariknya, penyerapan tenaga kerja sektor ini lebih banyak terjadi pada anggota rumah tangga pada usia sekolah. Hal ini terjadi karena industri pengupasan kepiting mempekerjakan tenaga kerja yang tidak turun melaut, sehingga industri ini didominasi penduduk usia sekolah.

Kondisi topografis Kelurahan Pundata Baji yang terletak di wilayah daratan dan pesisir, memungkinkan terciptanya keberagaman jenis pekerjaan di wilayah ini. Tidak ada sektor pekerjaan yang mendominasi lapangan pekerjaan di Pundata Baji, meskipun ada beberapa sektor yang cukup menonjol, yaitu sektor perikanan tangkap (24 persen), perikanan budidaya (23 persen) dan jasa kemasyarakatan (19 persen). Sektor perikanan tangkap didominasi oleh nelayan jaring, sektor perikanan budidaya umumnya merupakan usaha tambak, sedangkan sektor jasa kemasyarakatan di wilayah ini bervariasi mulai dari PNS, pegawai honorer ataupun wirawasta.

Kondisi ketenagakerjaan di Desa Mattiro Bombang dan Kelurahan Pundata Baji juga dapat dicermati melalui status pekerjaan utama anggota pada rumah tangga terpilih, seperti yang disajikan pada Gambar 2.12.

**Gambar 2.12. Distribusi ART Terpilih Menurut Status Pekerjaan Utama & Lokasi Penelitian, 2008 (%)**



Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi, COREMAP, 2008

Jika dicermari dari status pekerjaannya, terdapat perbedaan cukup mencolok antara status pekerjaan ART sampel di Kelurahan Pundata Baji dan Desa Mattiro Bombang. Di Kelurahan Pundata Baji, 43,8% anggota rumahtangga yang bekerja merupakan buruh/karyawan dan 34,3% berusaha sendiri. Para pekerja yang berstatus buruh/karyawan umumnya berasal dari sektor jasa kemasyarakatan, industri dan perikanan budidaya. Sementara itu, para pekerja yang berusaha sendiri umumnya berasal dari sektor perikanan tangkap dan perdagangan. Di lain pihak, status pekerjaan sebagai pekerja keluarga paling banyak ditemukan di Desa Mattiro Bombang (34,5%), kemudian diikuti berusaha sendiri (27,5%) dan buruh/karyawan (27,2%). Tingginya proporsi pekerja keluarga di Desa Mattiro Bombang terjadi karena umumnya para nelayan di desa ini melibatkan seluruh anggota keluarganya dalam melakukan pekerjaannya. Anggota keluarga laki-laki umumnya diajak serta ikut melaut sebagai anak buah kapal (ABK), sedangkan anggota keluarga perempuan turut dilibatkan ketika memperbaiki jaring yang rusak,

mencari umpan, dan lain sebagainya yang diperlukan oleh para nelayan.

#### **2.3.4. Kesejahteraan Penduduk**

Kesejahteraan penduduk dapat diamati dari berbagai sudut pandang. Pada bagian tulisan ini, pengukuran kesejahteraan penduduk di Kabupaten Pangkep dan di kedua lokasi penelitian dilakukan dengan menggunakan indikator pemilikan dan penguasaan aset produksi dan non produksi, serta kondisi pemukiman dan sanitasi lingkungan. Pemilikan aset produksi terkait dengan hak memiliki sarana produksi maupun alat lainnya yang bermanfaat bagi produksi, sedangkan penguasaan alat produksi terkait dengan hak memanfaatkan atau mengelola alat atau sarana produksi tanpa harus memilikinya.

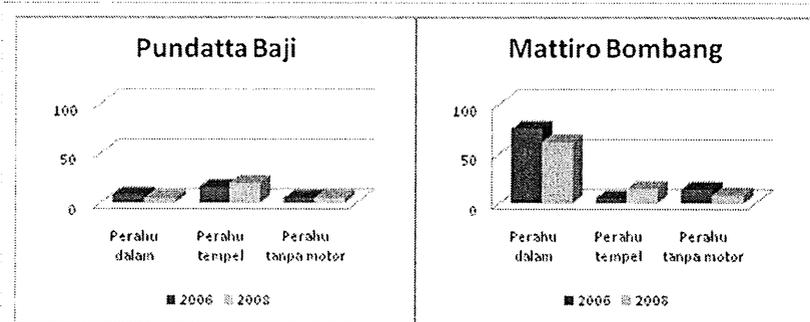
Terkait dengan sumber daya kelautan yang dimiliki Kabupaten Pangkep, aset produksi yang dimiliki penduduk yang bermatapencarian di bidang sumber daya laut berupa armada kapal dan alat produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Kapal penangkap ikan di Kabupaten Pangkep terdiri dari 182 unit perahu tak bermotor dan 989 kapal motor (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2007). Aset produksi lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam bidang perikanan tangkap adalah alat tangkap. Paling tidak ada 4 jenis alat tangkap utama yang dimiliki oleh nelayan di Kabupaten Pangkep, yaitu berbagai jenis pukat, jaring, bagan, dan pancing. Pilihan penggunaan alat tangkap yang oleh nelayan disesuaikan dengan sasaran tangkapan mereka. Di bidang perikanan budidaya, aset produksi utama adalah lahan tambak. Pada tahun 2006, Kabupaten Pangkep memiliki luas areal tambak 10.200,88 Ha dan luas lahan ini meningkat tiap tahunnya (BPS Kabupaten Pangkep, 2007).

Survei pada rumah tangga terpilih di dua jenis tipologi wilayah yang berbeda menunjukkan kecenderungan kepemilikan aset produksi yang berbeda pula. Kepemilikan armada tangkap pada rumah tangga terpilih di Desa Mattiro Bombang dan Kelurahan

Pundata Baji tidak banyak mengalami perubahan dalam kurun waktu 2006-2008, seperti yang dapat dicermati pada Gambar 2.13.

Pada sampel rumah tangga di Desa Mattiro Bombang terdapat sekitar 55 persen yang bekerja sebagai nelayan. Seluruh nelayan yang berusaha sendiri dan berusaha dibantu anggota keluarga di desa ini (64,3 persen dari keseluruhan responden nelayan) telah memiliki kapal sendiri. Sedangkan dari keseluruhan responden yang bekerja di Kelurahan Pundata Baji, terdapat 21 persen responden yang bekerja sebagai nelayan. Sama seperti di Desa Mattiro Bombang, seluruh nelayan yang berusaha sendiri dan berusaha dibantu anggota keluarga di Pundatta Baji (70 persen dari keseluruhan responden nelayan) telah memiliki kapal sendiri, yang terdiri dari 17,6 persen memiliki perahu motor dalam, 64,8 persen memiliki motor tempel, dan 17,6 persen memiliki perahu tanpa motor.

**Gambar 2.13. Kepemilikan Armada Tangkap pada Rumah Tangga Sampel di Kelurahan Pundata Baji dan Desa Mattiro Bombang, Tahun 2006 - 2008 (%)**

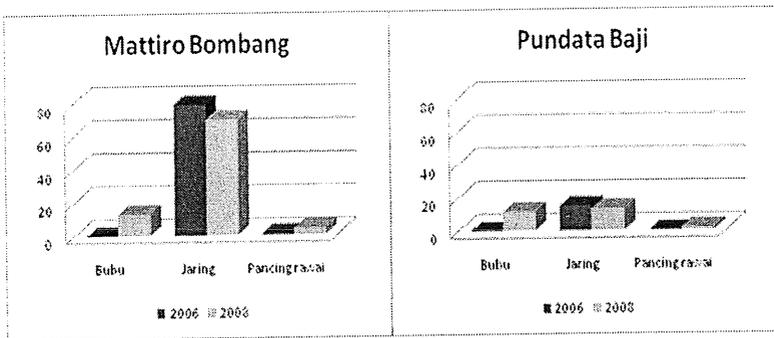


Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi, COREMAP, 2008

Aset produksi penting lainnya yang dimiliki oleh nelayan adalah alat tangkap. Dalam kurun waktu tahun 2006-2008, terjadi penurunan jumlah alat tangkap berupa jaring, yang diikuti peningkatan cukup pesat dalam jumlah alat tangkap bubu di Desa Mattiro Bombang dan Kelurahan Pundata Baji. Gambaran

kepemilikan alat tangkap di kedua lokasi penelitian tersebut dapat dicermati pada Gambar 2.14.

**Gambar 2.14. Kepemilikan Alat Tangkap pada Rumah Tangga Sampel di Kelurahan Pundata Baji dan Desa Mattiro Bombang, Tahun 2006 - 2008 (%)**



Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi, COREMAP, 2008

Selain aset produksi berupa alat tangkap seperti bagan, jaring dan pancing rawai, terdapat pula aset produksi lain yang cukup menonjol di Kelurahan Pundata Baji yaitu tambak, alat transportasi komersil, dan lahan pertanian. Lahan tambak yang terdapat di Kelurahan Pundata Baji tidak hanya yang dimiliki oleh mereka yang bekerja sebagai petani tambak. Banyak pula penduduk Pundata Baji yang bekerja sebagai nelayan, tenaga industri, tenaga profesional, tenaga penjualan ataupun tenaga jasa yang turut memiliki lahan pertambakan, namun umumnya mereka tidak mengelolanya sendiri atau tidak menjadikannya sebagai pekerjaan utama. Mereka menyewa buruh untuk mengusahakan lahan tambak tersebut. Lebih dari 80 persen lahan tambak di Pundata Baji berukuran kurang dari 5 Ha.

Selain kepemilikan aset produksi, kesejahteraan penduduk di suatu wilayah juga dapat diukur dengan kuantitas dan kualitas aset non produksi yang dimiliki penduduk. Salah satu aset non produksi yang penting bagi penduduk adalah tempat tinggal. Berdasarkan data

SUPAS 2005, sebagian besar penduduk di Kabupaten Pangkep (89 persen) tinggal di rumah milik sendiri, sisanya ada yang mengontrak, tinggal di rumah dinas ataupun tinggal rumah milik keluarga. Pada umumnya penduduk di Kabupaten Pangkep memiliki tempat tinggal sendiri dengan kondisi sanitasi yang baik. Sekitar 66 persen rumah tangga di Kabupaten Pangkep memiliki luas lantai tempat tinggal lebih dari 50m<sup>2</sup>. Selain itu, 52 persen tempat tinggal tersebut memiliki jenis dinding terluas dari kayu. Bahan kayu ini juga menjadi jenis lantai terluas yang dimiliki sebagian besar rumah tangga (78,2 persen) di Kabupaten Pangkep.

Data SUPAS 2005 menunjukkan sumber air minum sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Pangkep (50,71 persen) berasal dari sumur terlindung atau pompa air. Tetapi, tidak banyak rumah tangga di Kabupaten Pangkep yang memiliki tempat pembuangan air/kakus yang memadai. Hanya 27,1 persen rumah tangga di Pangkep yang memiliki kakus sendiri dengan tangki septik. Kondisi penerangan di Kabupaten Pangkep semakin membaik setiap tahunnya yang ditunjukkan dengan 87,7 persen rumah tangga di wilayah ini telah menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utama tempat tinggalnya. Untuk jenis bahan bakar yang digunakan untuk memasak, masih cukup banyak rumah tangga di Kabupaten Pangkep yang menggunakan minyak tanah (47 persen) dan kayu bakar (38,4 persen), sedangkan penggunaan gas elpiji baru mencapai 13 persen dari rumah tangga di Kabupaten Pangkep.

Di wilayah kepulauan seperti Desa Mattiro Bombang, bentuk rumah yang dimiliki penduduk setempat umumnya berupa rumah panggung. Kira-kira 79 persen rumah di Desa Mattiro Bombang berbentuk rumah panggung, sedangkan sisanya bervariasi dari rumah batu, rumah panggung batu, gubuk berlantai dan gubuk panggung. Desa Mattiro Bombang, khususnya Pulau Salemo, telah memiliki sumber penerangan listrik PLN. Meskipun begitu aliran listrik PLN belum dapat dinikmati penduduk selama 24 jam. Listrik di desa ini mulai dinyalakan pada pukul 17.30 WITA hingga pukul 23.00 WITA. Air bersih di desa ini relatif tidak terlalu sulit didapatkan, meskipun begitu di Pulau Sakuala dan Pulau Sagara terdapat bak penampungan air, masing-masing 1 unit. Selain itu, di Pulau Salemo juga tersedia

MCK umum sebanyak 17 unit, namun sayangnya sebagian dalam kondisi rusak.

Di Kelurahan Pundata Baji, jenis rumah yang umumnya dimiliki penduduk setempat adalah rumah semi permanen (95 persen), sisanya berupa rumah permanen dan rumah non permanen. Berbeda dengan Desa Mattiro Bombang, listrik PLN di kelurahan ini sudah dapat dinikmati penduduk selama 24 jam. Permasalahan utama yang dihadapi oleh penduduk Pundata Baji adalah ketersediaan air bersih. Pasokan air bersih masih menjadi masalah di wilayah ini, sebab pipa air ledeng belum dapat menjangkau seluruh wilayah.



## **BAB III**

# **COREMAP DAN IMPLEMENTASINYA**

Coremap di Kabupaten Pangkep mulai dilaksanakan sejak tahun 2005, yaitu pada fase kedua dari program pengelolaan terumbu karang yang direncanakan akan berlangsung selama tiga fase. Kegiatan Coremap secara efektif mulai dilaksanakan Bulan Mei tahun 2005, setelah semua persyaratan administratif diselesaikan. Pada awalnya pelaksanaan program tersebut hanya meliputi dua kecamatan, yaitu satu kecamatan kepulauan (Kecamatan Liukang Tupabbiring) dan satu kecamatan pesisir (Kecamatan Labakkang). Seiring dengan berjalannya waktu, cakupan wilayah pelaksanaan program diperluas ke kecamatan-kecamatan lainnya. Pada tahun 2008 lokasi kegiatan Coremap menjadi 10 kecamatan, yaitu 3 kecamatan di kepulauan (Liukang Tupabbiring, Liukang Tangaya, dan Liukang Kalmas) dan 6 kecamatan di pesisir, yaitu Pangkajene, Minasate'ne, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri, dan Mandalle.

Bab ini mendeskripsikan implementasi kegiatan Coremap di Kabupaten Pangkep serta berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi. Pembahasan mencakup seluruh tingkat pelaksanaan, mulai dari kabupaten sampai dengan desa/wilayah yang terpilih sebagai lokasi kegiatan. Khusus di tingkat desa, pembahasan dibatasi hanya pada dua lokasi penelitian, yaitu Desa Mattiro Bombang (Kecamatan Liukang Tupabbiring) dan Kelurahan Pundata Baji (Kecamatan Labakkang).

### **3.1. PELAKSANAAN COREMAP: PERMASALAHAN DAN KENDALA**

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Coremap tidak luput dari berbagai permasalahan dan kendala. Permasalahan dan kendala muncul karena berbagai sebab, antara lain ketentuan administratif yang menyebabkan keterlambatan turunnya dana untuk membiayai

berbagai kegiatan dan keterbatasan sumber daya manusia pelaksana program, khususnya di tingkat desa/kelurahan, baik dari segi jumlah maupun kemampuan mereka mengelola program. Apalagi kegiatan tersebut baru dilaksanakan selama kurang dari tiga tahun, sehingga pengalaman para pelaksana di masing-masing tingkat masih terbatas. Selain itu, kurangnya respon dari kelompok target program juga dapat menghambat pelaksanaan Coremap. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kinerja program masih kurang optimal, yang pada gilirannya dapat berpengaruh terhadap capaian target program.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi perlu dikenali untuk menemukan solusi yang tepat. Mengingat Coremap merupakan program jangka panjang, maka kegagalan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak awal pelaksanaannya berpotensi menghambat tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, tidak tertutup kemungkinan capaian program tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam rancangan program.

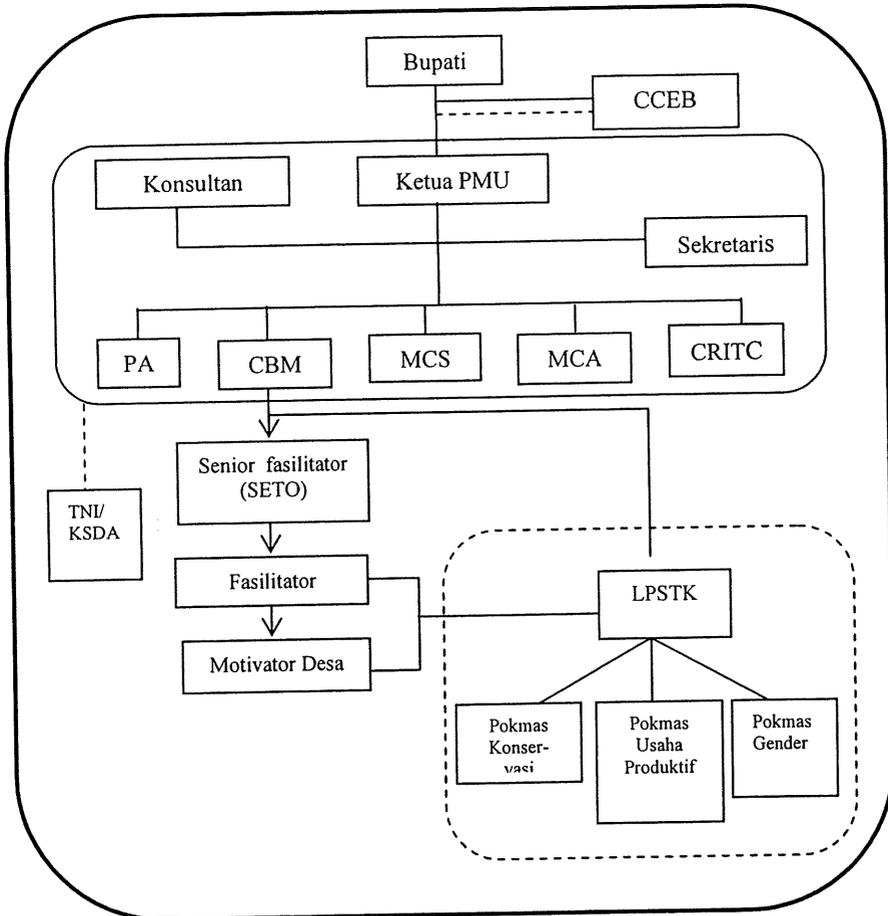
### **3.1.1. Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Coremap di Tingkat Kabupaten**

#### *PMU (Project Management Unit)*

Kegiatan Coremap di Kabupaten Pangkep dilaksanakan di bawah koordinasi PMU (*Project Management Unit*), yang diketuai oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pangkep. PMU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua kegiatan Coremap yang mencakup lima komponen, yaitu (1) PA (*Public Awareness*) – penyadaran masyarakat, (2) CBM (*Community Based Management*) – pengelolaan berbasis masyarakat, (3) MCS (*Monitoring, Controlling and Surveillance*), (4) MCA (*Marine Conservation Area*) – daerah perlindungan laut, dan (5) CRITC (*Coral Reef Information and Training Center*). Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh PMU Coremap dikoordinasikan dengan pihak-pihak lain yang bertugas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah kabupaten, yaitu TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) serta CCEB (*Coastal*

*Community Empowerment Board*) – Dewan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Sebagaimana pelaksana kegiatan pembangunan lainnya, PMU Coremap berada di bawah koordinasi bupati sebagai kepala daerah kabupaten.

**Gambar 3.1. Struktur Kelembagaan COREMAP II – Kabupaten Pangkep**



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep.

Pada awal pelaksanaannya, beberapa ketua komponen Coremap adalah pejabat dari institusi selain DKP, seperti dari Bappeda dan Kepolisian. Namun, dengan berbagai pertimbangan, seperti untuk lebih memudahkan koordinasi, maka sekarang ini semua koordinator dijabat oleh pejabat dari DKP. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika saat penelitian berlangsung ditemukan beberapa koordinator komponen yang baru saja menduduki posisi tersebut. Sebelum menjalankan tugasnya, para koordinator baru harus mempelajari semua kegiatan yang menjadi tugas komponen Coremap yang dikoordinirnya. Hal ini membutuhkan waktu, sehingga dapat menjadi kendala dalam pencapaian target program sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Agar kegiatan masing-masing komponen dapat dilaksanakan sesuai dengan rancangan program, diperlukan tenaga lapangan yang secara teknis mendampingi masyarakat di lokasi Coremap. Tenaga lapangan bertanggung jawab sebagai pendamping masyarakat untuk melaksanakan semua kegiatan Coremap, meliputi fasilitator senior, fasilitator (masyarakat) – FM, dan motivator desa (MD). Fasilitator senior dikenal pula sebagai SETO (*Senior Training Officer*), yang wilayah tugasnya meliputi satu kecamatan. Selanjutnya, FM bertugas di beberapa desa lokasi Coremap, sedangkan MD hanya bertanggung jawab mendampingi masyarakat di desa masing-masing. Karena wilayah tugasnya mencakup satu kecamatan, maka SETO bertanggung jawab untuk mengkoordinir kegiatan FM. Sampai pertengahan tahun 2008, terdapat 12 orang SETO dan 18 orang FM di seluruh Kabupaten Pangkep. Selanjutnya, jumlah MD adalah 42 orang pada tahun 2007 dan bertambah menjadi 74 orang pada tahun 2008 (wawancara dengan pengurus PMU).

Dalam melaksanakan tugasnya, PMU Coremap dibantu oleh konsultan, yang direkrut dari tenaga pengajar/dosen perguruan tinggi di Kota Makassar. Sesuai dengan rancangan program, masing-masing komponen Coremap didampingi oleh seorang konsultan, tapi sampai penelitian berlangsung hanya tiga komponen yang secara definitif memiliki konsultan. Ketiga komponen tersebut adalah PA, CBM, dan MCA. Dua komponen lainnya, yaitu MCS dan CRITC tidak memiliki konsultan, sehingga tugas pendampingan dilakukan oleh konsultan

komponen lain, misalnya konsultan MCA juga merangkap sebagai konsultan CRITC. Untuk mengkoordinir kegiatan para konsultan, terdapat seorang *consultant leader* yang mempunyai kedudukan sebagai *marine management advisor* – penasehat pengelolaan laut.

Idealnya, konsultan mulai bekerja sejak awal kegiatan dilaksanakan. Namun, dalam kenyataannya keterlibatan para konsultan baru dimulai pada awal tahun 2008. Dengan demikian, lebih dari dua tahun kegiatan berlangsung tanpa supervisi dari konsultan. Hal ini menjadi salah satu penyebab beberapa kegiatan tidak berjalan sesuai dengan rancangan Coremap, sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang konsultan berikut, "... *begitu kita masuk, kita harus membenahi dulu semua yang sudah dikerjakan. Jadi kesannya konsultan itu ditakuti*".

### *Komponen Coremap*

Pelaksana teknis dari berbagai kegiatan Coremap adalah komponen-komponen yang ada dalam program ini, sesuai dengan tugas masing-masing, dibantu oleh petugas lapangan seperti SETO, FD, dan MD. Meskipun masing-masing komponen mempunyai tugas yang berbeda satu sama lainnya, dalam kenyataannya terdapat beberapa kegiatan komponen-komponen Coremap yang saling berhubungan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan berbagai kegiatan sangat diperlukan koordinasi antar semua pelaksana komponen agar tidak terjadi tumpang tindih atau sebaliknya, ada kegiatan yang sama sekali tidak dilakukan oleh suatu karena anggapan sudah dilaksanakan oleh komponen yang lain.

Bagian ini membahas pelaksanaan kegiatan di masing-masing komponen. Melalui pembahasan ini dapat diidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi. Selain itu, dalam bagian ini juga diidentifikasi keberhasilan yang dicapai, yang dapat pula digunakan sebagai *lesson learnt* untuk pelaksanaan kegiatan di masa mendatang.

### PA (Public Awareness)

Kegiatan PA bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya memelihara kelestarian terumbu karang, khususnya, dan sumber daya laut pada umumnya. Secara garis besar, kegiatan yang dilakukan oleh komponen PA adalah (1) pengembangan materi untuk bahan penyadaran masyarakat, (2) pelatihan untuk *stakeholders* yang akan menyampaikan pesan-pesan penyadaran masyarakat, (3) sosialisasi kepada masyarakat, (4) lomba inovator muda, dan (5) lomba cerdas cermat. Uraian berikut berisi penjelasan mengenai masing-masing kegiatan yang dilakukan oleh komponen PA.

#### ○ Pengembangan materi untuk penyadaran masyarakat.

Berbagai materi dirancang sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan upaya pemeliharaan terumbu karang. Termasuk dalam materi yang dibuat adalah poster, leaflet, kalender, jam, gelas, dan kaos yang memuat pesan-pesan singkat atau ungkapan-ungkapan untuk menjaga kelestarian terumbu karang. Pesan-pesan tersebut ditulis dalam bahasa Indonesia serta bahasa daerah, khususnya bahasa Bugis dan Makassar. Penulisan pesan dalam bahasa daerah dimaksudkan agar efeknya lebih kuat di masyarakat karena disampaikan dalam bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Dengan demikian, isi pesan dapat meresap lebih dalam, yang diharapkan dapat mendorong timbulnya keinginan untuk menyelamatkan kondisi terumbu karang.

Semua materi yang sudah disiapkan oleh pelaksana Coremap di tingkat kabupaten dikirim ke berbagai lokasi Coremap. Poster ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, seperti tempat berkumpul masyarakat (pos keamanan kampung), di samping ditempel di kantor LPSTK. Selanjutnya, leaflet juga diletakkan di kantor LPSTK dan dapat dilihat oleh semua orang yang datang ke sana. Kalender, jam, gelas, dan kaos dibagikan kepada masyarakat yang menjadi anggota pokmas Coremap. Banyaknya pesan mengenai pentingnya terumbu karang serta ajakan untuk melestarikannya yang bisa dibaca di baju

kaos yang dipakai penduduk dan di kalender yang dipajang di rumah-rumah akan menimbulkan kesan yang kuat mengenai perlunya upaya-upaya pelestarian terumbu karang yang antara lain dilakukan melalui kegiatan Coremap.

- o Pelatihan untuk *stakeholders* yang akan menyampaikan pesan-pesan penyadaran masyarakat

Kegiatan pelatihan dilakukan untuk kelompok-kelompok yang mempunyai peran strategis di masyarakat. Materi yang diberikan dalam pelatihan adalah pengetahuan mengenai terumbu karang serta manfaatnya untuk menjaga ekosistem perairan. Selain itu, juga diberikan pemahaman bahwa terumbu karang yang terjaga kelestariannya mempunyai potensi ekonomi yang besar bagi penduduk yang mata pencahariannya mengandalkan sumber daya laut. Peserta pelatihan adalah da'i pesisir, dan guru-guru sekolah dasar (SD). Da'i diharapkan dapat menyampaikan pesan-pesan tentang pelestarian terumbu karang melalui dakwah mereka di mesjid-mesjid di lokasi Coremap. Selanjutnya, guru-guru SD dipilih sebagai peserta pelatihan agar dapat menyampaikan materi pelajaran yang berisi pemahaman mengenai pentingnya terumbu karang serta manfaatnya bagi kehidupan masyarakat kepulauan dan pesisir. Isu tersebut merupakan materi dalam mata pelajaran muatan lokal yang telah diberikan sejak beberapa tahun terakhir untuk murid-murid SD di wilayah kepulauan dan pesisir di Kabupaten Pangkep. Selain pelatihan, juga dilaksanakan *workshop* bagi guru-guru SD untuk penyusunan kurikulum muatan lokal.

Selain untuk kelompok *stakeholders* di atas, dilakukan pula pelatihan untuk anak-anak muda yang tinggal di lokasi Coremap. Materi yang diajarkan adalah keterampilan berkomunikasi, termasuk komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan pelestarian terumbu karang. Dengan banyaknya kelompok masyarakat yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan mengenai pentingnya terumbu karang dan upaya-upaya penyelamatannya, maka diharapkan

masyarakat memiliki pemahaman yang luas mengenai terumbu karang dan ekosistem laut pada umumnya.

- o Sosialisasi kepada masyarakat

Sosialisasi kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan penting untuk mendukung kelancaran kegiatan Coremap. Sosialisasi difokuskan pada isu-isu yang terkait dengan terumbu karang, termasuk manfaat yang diperoleh dari terumbu karang yang terjaga kondisinya atau sebaliknya, kerugian yang diderita akibat kerusakan sumber daya laut tersebut. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu di antaranya melalui pemutaran film dengan topik tersebut. Selain itu, juga dilakukan pertemuan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat di lokasi Coremap. Tenaga teknis lapangan, yaitu fasilitator dan SETO berperan penting untuk terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini.

Kegiatan sosialisasi berupa pertemuan melibatkan peserta dalam jumlah yang besar telah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2006 dan 2007. Selain itu juga direncanakan dua kali kegiatan sosialisasi lagi ke desa-desa lokasi Coremap. Dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut sudah disediakan oleh pihak PMU.

- o Lomba inovator muda

Kegiatan ini ditujukan untuk pelajar SMP dan SMA dalam bentuk lomba mengarang dengan topik terumbu karang. Lomba inovator muda ini diselenggarakan di lokasi Coremap.

- o Lomba cerdas cermat

Lomba cerdas cermat telah dilaksanakan sebanyak 2 kali di Pangkajene, ibukota Kabupaten Pangkep. Peserta lomba ini adalah murid-murid SD dan materi yang dilombakan adalah pengetahuan yang berkaitan dengan terumbu karang dan lingkungan dalam arti luas. Selain lomba cerdas cermat, untuk murid-murid SD juga

dilakukan pemilihan 'duta karang' serta lomba menggambar dengan tema lingkungan hidup.

### CBM (Community Based Management)

Sejak kegiatan Coremap dilaksanakan di Kabupaten Pangkep pada tahun 2005, komponen CBM telah melaksanakan beberapa kegiatan yang menjadi tugasnya. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain (1) pembentukan Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK), (2) pelatihan untuk MD, fasilitator, dan SETO, serta (3) pelatihan pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Bersama dengan kegiatan komponen-komponen Coremap lainnya, kegiatan yang dilakukan oleh komponen CBM sangat mendukung keberhasilan Coremap.

LPSTK merupakan pelaksana dan penanggungjawab kegiatan Coremap di tingkat desa/kelurahan. Lembaga ini dibentuk sebelum kegiatan program ini dilaksanakan di tingkat masyarakat. Pembentukan LPSTK dilakukan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pelaksana dan penanggung jawab komponen CBM serta SETO masing-masing lokasi Coremap. Semua kegiatan yang dilakukan oleh LPSTK berada di bawah koordinasi komponen CBM.

Pelatihan untuk MD, fasilitator, serta SETO mencakup berbagai materi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Coremap. Pelatihan untuk ketiga kelompok ini tidak terbatas hanya pada awal pelaksanaan Coremap. Selama program berjalan beberapa kali pelatihan diberikan untuk MD, fasilitator, dan SETO, sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan karena kelompok pelaksana teknis lapangan ini perlu dibekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk kegiatan pendampingan bagi (kelompok) masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Coremap. Salah satu materi yang diberikan dalam pelatihan adalah penyusunan RPTK (Rencana Pengelolaan Terumbu Karang) (Coremap II bekerjasama dengan Eco-Natural Society Kabupaten Pangkep, 2006). Selain itu, penyusunan laporan kegiatan masing-masing pelaksana (MD, fasilitator, dan SETO) juga merupakan salah satu materi pelatihan.

Jika kegiatan pembentukan LPSTK dan pelatihan bagi MD, fasilitator, dan SETO telah dilaksanakan pada tahun 2007 atau sebelumnya, pelatihan pengelolaan LKM<sup>2</sup> baru dilaksanakan sekitar bulan Maret 2008. Hal ini karena dana yang akan dikelola, yaitu *seed fund* dan *village grant*<sup>3</sup> baru cair pada tahun 2008. Dana yang cair tersebut merupakan alokasi anggaran tahun 2007, sedangkan dana untuk kegiatan tahun 2008 belum turun sampai penelitian dilaksanakan (Bulan Juni 2008). Terlambatnya pencairan kedua jenis dana tersebut menyebabkan keterlambatan pelaksanaan beberapa kegiatan Coremap, yang akan berakibat pada terhambatnya pencapaian target program ini.

Kegiatan LKM sangat terkait dengan kegiatan Pokmas Usaha Ekonomi Produktif (UEP). LKM merupakan lembaga yang berfungsi sebagai penyalur dana bergulir yang akan dipinjamkan kepada anggota Pokmas ekonomi produktif tersebut. *Seed fund* untuk masing-masing lokasi Coremap harus diterima oleh LKM melalui rekening atas nama ketuanya, sebelum dibagikan kepada anggota Pokmas UEP. Berdasarkan kesepakatan, jumlah dana terbesar yang dipinjamkan kepada anggota pokmas adalah Rp. 2.500.000,- per orang dan sebaliknya, jumlah pinjaman terkecil sebesar Rp. 500.000,- per orang. Jumlah pinjaman untuk masing-masing anggota Pokmas UEP ditentukan berdasarkan kebutuhan, terutama jenis usaha yang mereka lakukan.

---

<sup>2</sup> Pelatihan pengelolaan LKM diikuti oleh ketua dan bendahara LKM.

<sup>3</sup> *Seed fund* dan *village grant* merupakan dua jenis dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan Coremap di lokasi program ini. *Seed fund* dan *village grant* masing-masing berjumlah Rp. 50.000.000,- dan setiap lokasi Coremap mendapatkan keduanya. *Seed fund* digunakan sebagai dana bergulir untuk usaha ekonomi bagi anggota masyarakat yang terlibat dalam Pokmas UEP (usaha ekonomi produktif). Dana ini merupakan pinjaman yang harus dicicil oleh anggota UEP, untuk digulirkan pemakaiannya kepada Pokmas yang lain. Selanjutnya, *village grant* merupakan dana bantuan desa yang dapat digunakan untuk pengadaan sarana kegiatan Coremap, termasuk pengadaan fasilitas di kantor LPSTK seperti komputer dan pengadaan kapal yang akan digunakan sebagai armada untuk patroli laut.

### MCS (Monitoring, Controlling, and Surveillance)

Komponen MCS beranggotakan pihak-pihak yang berasal dari multisektor. Tidak hanya pelaksana dari DKP, komponen ini juga terdiri dari pejabat kepolisian dan kejaksaan serta PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Hal ini sesuai dengan fungsinya untuk melaksanakan pemantauan dan pengontrolan berbagai kegiatan yang terkait dengan terumbu karang khususnya dan sumberdaya laut pada umumnya. Penanggung jawab kegiatan MCS adalah pejabat dari DKP Kabupaten Pangkep.

Seperti komponen-komponen Coremap lainnya, MCS juga telah melaksanakan beberapa kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pada tahun 2007 dilaksanakan kegiatan “Apel Siaga” dengan peserta dari berbagai unsur yang terkait dengan pengelolaan terumbu karang (wawancara dengan pengelola komponen MCS). Kegiatan ini berupa sosialisasi dan pemberian pengetahuan mengenai isu-isu pengelolaan sumberdaya laut, antara lain Undang-Undang Perikanan, larangan penggunaan alat tangkap yang merusak, serta aturan-aturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut. Materi pelatihan disampaikan oleh pejabat dari Polres dan Kodim Kabupaten Pangkep. Target yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah berkurangnya penggunaan alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Pada tahun 2008 juga telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang didanai oleh anggaran tahun berjalan. Namun, terlambatnya pencairan dana menyebabkan tidak semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Beberapa kegiatan yang direncanakan pada tahun 2008 adalah (1) pelatihan Pokmaswas (Pokmas Pengawasan)<sup>4</sup> yang rencananya akan dilaksanakan sebanyak 4 angkatan, (2) penyusunan

---

<sup>4</sup> Materi yang diberikan dalam pelatihan ini mencakup aturan-aturan tentang pengelolaan sumber daya laut serta tata cara dan mekanisme pelaporan pelanggaran aturan-aturan tersebut.

statistik perikanan<sup>5</sup> di Kecamatan Liukang Kalmas dan Liukang Tangaya, (3) penandaan DPL (daerah perlindungan laut) di dua kecamatan tersebut, serta (4) pengadaan kapal untuk kegiatan patroli laut.

Kegiatan monitoring yang dominan dilakukan oleh komponen Coremap ini adalah penangkapan ilegal (*illegal fishing*). Kegiatan ini mencakup penggunaan cara, armada, dan alat tangkap terlarang, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU Perikanan. Laporan penemuan kegiatan penangkapan ilegal disampaikan oleh anggota pokmaswas/pokmas konservasi kepada kepala desa/kelurahan. Untuk memudahkan penyampaian laporan “petugas” pemantau dilengkapi dengan pesawat HT (*handy talky*) yang diadakan melalui dana Coremap. Pimpinan desa/kelurahan selanjutnya menyampaikan laporan yang diterima kepada polisi melalui Babinsa. Laporan pelanggaran tersebut kemudian diteruskan ke Polsek (Kepolisian Sektor) dan Polres (Kepolisian Resor). Namun dalam kenyataannya, sangat sedikit kasus pelanggaran yang ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi hukum. Hasil wawancara dengan narasumber dari berbagai kalangan memperlihatkan bahwa hampir tidak pernah ada kasus pelanggaran yang dibawa ke pengadilan karena setelah tertangkap, pada umumnya pelakunya dilepas sebelum menjalani proses persidangan di pengadilan.

### CRITC (Coral Reef Information and Training Center)

Sesuai dengan namanya, CRITC bertanggung jawab untuk menyebarluaskan berbagai informasi serta menyelenggarakan pelatihan yang terkait dengan kegiatan Coremap. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh komponen ini adalah: (1) survey sosial ekonomi, (2) creel, serta (3) publikasi dan diseminasi hasil penelitian. Pelaksanaan survei sosial ekonomi dikontrakkan kepada pihak ketiga, yaitu perusahaan konsultan, karena CRITC tidak mempunyai tenaga

---

<sup>5</sup> Statistik perikanan berisi berbagai data yang terkait dengan usaha perikanan, misalnya armada dan alat-alat tangkap yang digunakan nelayan.

peneliti. Untuk memperlancar kegiatan survei, Coremap Kabupaten Pangkep sudah dilengkapi dengan peralatan pendukung, termasuk perangkat komputer. Hasil penelitian ini kemudian disampaikan kepada masyarakat dan juga digunakan sebagai bahan untuk pembuatan leaflet dan film dalam bentuk *compact disk* (CD) yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penyadaran masyarakat.

Creel adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui (peningkatan) pendapatan masyarakat setelah ditetapkannya daerah perlindungan laut (DPL). Asumsinya, dengan ditetapkannya DPL kondisi laut, terutama di daerah sekitarnya, menjadi lebih terjaga, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung kehidupan berbagai sumber daya laut. Sumber daya laut yang melimpah sangat berpotensi untuk menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat nelayan.

Kegiatan creel baru dilakukan sebanyak satu kali, yaitu pada tahun 2007. Seperti halnya survei sosial ekonomi, kegiatan creel juga dilakukan oleh pihak ketiga, dengan sistim kontrak. Untuk tahun anggaran 2008, sampai dengan penelitian berlangsung kegiatan creel belum dapat dilaksanakan karena dana (dari Coremap pusat) untuk kegiatan tersebut belum turun. Di samping itu, dana APBD kabupaten yang merupakan dana pendamping juga belum bisa dicairkan. Keadaan ini menjadi penghambat untuk mengetahui dampak dari salah satu kegiatan Coremap, yaitu penetapan DPL.

Selain kegiatan-kegiatan di atas, CRITC juga telah melakukan berbagai pelatihan. Sebagai contoh, pada tahun 2006 telah dilakukan pelatihan monitoring ekologi, pelatihan survei sosial ekonomi, pelatihan selam, dan pelatihan untuk peningkatan pengelolaan CRITC. Pelatihan-pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampilan para pelaksana Coremap, yang akan memberikan dampak positif terhadap berbagai kegiatan dalam program ini.

### **3.1.2. Pengelolaan dan Pelaksanaan Coremap di Tingkat Lokasi/Desa**

#### *Pembentukan dan Kinerja Kelembagaan di Lokasi (LPSTK, POKMAS, POKMASWAS)*

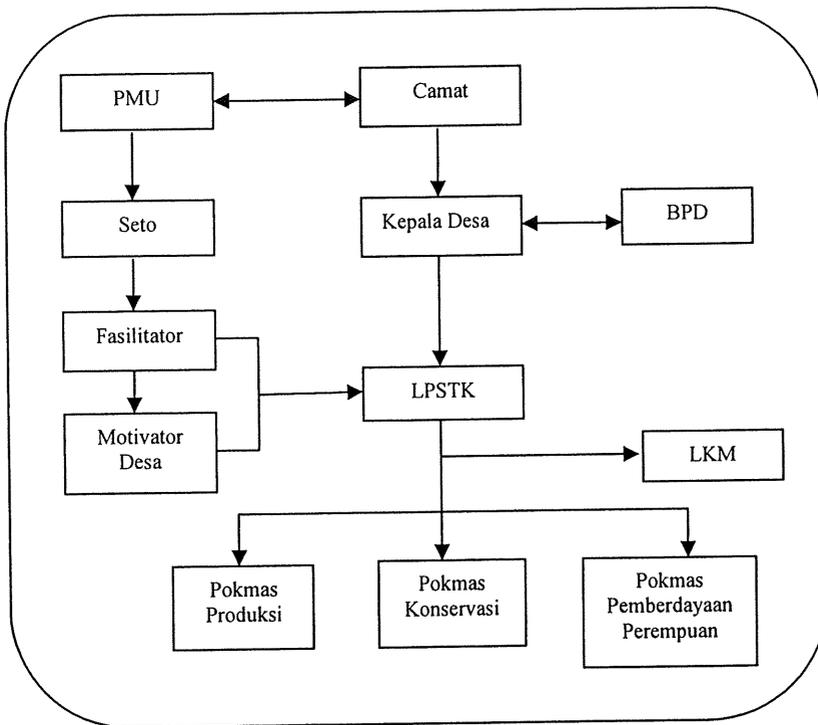
Ujung tombak pelaksanaan kegiatan Coremap berada di desa/kelurahan yang terpilih sebagai lokasi sasaran. (Struktur) kelembagaan serta sumber daya manusia yang menjadi pelaksana dan pengelola kegiatan di tingkat yang paling rendah tersebut disesuaikan dengan rancangan program yang bersifat nasional. Namun, sesuai dengan sifat program ini, yaitu "untuk masyarakat dan oleh masyarakat", maka pada para pelaksana di lokasi adalah penduduk setempat melalui kelembagaan yang dibentuk dalam kerangka kegiatan Coremap. Pada bagian ini dibahas kelembagaan yang ada dalam kegiatan Coremap, mulai dari pembentukan sampai dengan kinerjanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Secara umum lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Coremap di lokasi adalah LPSTK. Semua kegiatan yang diselenggarakan dalam skema program ini berada di bawah koordinasi LPSTK. Struktur kelembagaan LPSTK serta hubungannya dengan kelembagaan di desa/kelurahan dapat dilihat pada gambar berikut.

Lembaa pengelola sumber daya terumbu karang dibentuk oleh masyarakat di lokasi Coremap difasilitasi oleh pengelola Coremap di tingkat kabupaten serta di tingkat desa/kelurahan (SETO, FD, dan MD). Pembentukan LPSTK di kedua lokasi penelitian dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung SD yang terdapat di masing-masing lokasi. Setelah penyampaian materi mengenai Coremap secara keseluruhan, yang mencakup antara lain tujuan serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya, dilakukan pembentukan LPSTK dan para pengurusnya. Proses pemilihan pengurus LPSTK di Desa Mattiro Bombang dan Kelurahan Pundata Baji dimulai dengan usulan nama-nama calon oleh mereka yang hadir

dalam pertemuan sosialisasi. Calon-calon yang diusulkan menjadi pengurus lembaga pengelola terumbu karang di kedua lokasi tersebut adalah orang-orang yang biasanya aktif terlibat dalam berbagai kegiatan (pembangunan) di tempat tinggal mereka. Tokoh-tokoh informal seperti guru dan mereka yang berpendidikan tinggi merupakan calon-calon yang diusulkan sebagai pengurus LPSTK. Calon-calon yang akan mengisi posisi-posisi yang ada dalam kelembagaan LPSTK, seperti ketua dan bendahara, kemudian dipilih secara aklamasi.

Gambar 3.2. Struktur Kelembagaan LPSTK



Sumber: Pondok Informasi COREMAP Desa Mattiro Bombang dan Kelurahan Pundata Baji, 2008.

Pembentukan pokmas serta pemilihan ketuanya dilakukan setelah pembentukan dan pemilihan pengurus LPSTK. Waktu yang singkat untuk pembentukan pokmas menyebabkan pemilihan anggota masing-masing pokmas tidak didasarkan pada minat dan keinginan mereka. Di Desa Mattiro Bombang, misalnya, penentuan anggota masing-masing kelompok dilakukan berdasarkan posisi duduk mereka pada saat pertemuan dilaksanakan. Salah seorang narasumber yang terlibat dalam pokmas produksi mengemukakan sebagai berikut,

*Waktu mau bentuk kelompok tidak ditanya-tanya kita mau masuk kelompok mana. Cuma dibilang, "yang duduk di bagian sini masuk kelompok produksi, yang duduk di situ kelompok pengawasan". Begitu caranya bentuk kelompok, setelah itu kita pulang dan tidak dikasih tau lagi bagaimana kerjanya.*

Cara selain proses di atas dilakukan pula untuk pembentukan pokmas Coremap. Hal ini terjadi pada pembentukan pokmas jender di Desa Mattiro. Pokmas dibentuk dengan terlebih menunjuk ketuanya, yaitu seorang ibu yang paling terlibat aktif dalam berbagai kegiatan di desa ini. Ketua kelompok terpilih selanjutnya memilih anggota kelompok, dengan pertimbangan keaktifan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tempat tinggal mereka.

Dalam perjalanannya, kemungkinan karena kebanyakan pokmas yang ada, terutama yang kegiatannya melibatkan usaha ekonomi produktif belum melaksanakan kegiatan mereka terjadi perubahan anggota pokmas. Ada anggota baru yang masuk dan sebaliknya, ada pula anggota yang keluar. Fenomena ini terjadi di Desa Mattiro Bombang, antara lain pada pokmas jender dan pokmas produksi. Perubahan anggota pokmas terjadi tanpa sepengetahuan ketuanya, sebagaimana dikemukakan oleh narasumber berikut, *"saya tidak tau kalau ibu X (nama seseorang) sudah tidak jadi anggota pokmas dan ibu Y (nama seseorang lainnya) masuk anggota, Siapa yang rubah itu anggota"*. Selanjutnya, berikut adalah respon seorang ketua pokmas lainnya yang tidak mengetahui adanya perubahan anggota kelompoknya, *"saya tidak tau lagi siapa yang jadi anggota pokmas sekarang. Mungkin sudah berubah, tapi saya tidak tau siapa*

yang merubah". Perubahan anggota pokmas diduga terjadi karena adanya kepentingan pihak-pihak tertentu, yang didorong oleh keinginan untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan Coremap.

Layaknya berbagai kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan di banyak daerah, konflik-konflik dalam masyarakat juga terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Coremap. Namun konflik-konflik tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk konflik terbuka. Perwujudan konflik terbatas pada prasangka-prasangka terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang dianggap ingin "menguasai" kegiatan Coremap. Oleh karena itu, ada kecenderungan untuk hanya melibatkan mereka yang dianggap mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok tersebut, misalnya saudara atau anggota keluarga besarnya.

Kondisi yang berbeda dengan di Desa Mattiro Bombang ditemukan di Kelurahan Pundata Baji. Kecuali untuk pokmas UEP, khususnya untuk kegiatan simpan pinjam, di kelurahan ini sulit mendapatkan anggota masyarakat yang bersedia terlibat dalam kegiatan-kegiatan Coremap. Salah seorang narasumber yang diwawancarai di kelurahan pesisir ini mengemukakan sebagai berikut, "*Orang sini jarang yang mau diajak kegiatan, kalau diundang selalu bilang "sudah kamu saja yang ikut". Susah sekali orang sini mau berkumpul*". Kenyataan ini kemungkinan merupakan salah satu penyebab keterlibatan seseorang pada lebih dari satu kelompok Coremap. Bahkan tidak jarang yang terlibat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang relatif sudah berusia lanjut.

Keterbatasan anggota masyarakat yang bersedia terlibat dalam kegiatan Coremap menyebabkan pembentukan pokmas Coremap tidak melewati sistim pemilihan. Mereka yang bersedia langsung ditunjuk sebagai ketua pokmas untuk kemudian menentukan anggotanya yang juga telah dipilih menjadi anggota pokmas yang lain. Proses ini terpaksa ditempuh untuk memenuhi struktur kelembagaan Coremap sesuai dengan yang ditentukan dalam rancangan program.

Sejak pembentukan LPSTK sampai dengan pelaksanaan penelitian ketua lembaga ini di di Desa Mattiro Bombang telah mengalami pergantian. Pergantian terjadi karena ketua LPSTK yang pertama kali terpilih pindah ke luar daerah karena alasan bekerja. Hal ini karena lama setelah pembentukan LPSTK dan pemilihan pengurusnya tidak ada kegiatan yang dilaksanakan, sehingga ketua terpilih memutuskan untuk pindah dan mencari pekerjaan ke daerah lain. Sementara itu, di Kelurahan Pundata Baji terjadi kevakuman jabatan ketua LPSTK. Menurut salah seorang narasumber yang diwawancarai di kelurahan ini kevakuman terjadi karena adanya konflik dengan pengurus Coremap yang lain di tingkat kelurahan. Konflik dipicu oleh ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dan pelaksanaannya, yang berujung pada pengunduran diri ketua lembaga pengelola terumbu karang tersebut. Sampai penelitian dilaksanakan ketua LPSTK yang baru belum dipilih, sehingga koordinasi kegiatan Coremap dilakukan oleh pengurus LPSTK yang lain.

#### *Kegiatan Coremap di Lokasi*

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Coremap di tingkat desa/kelurahan merupakan salah satu kunci keberhasilan program ini secara keseluruhan. Agar bisa mencapai keberhasilan diperlukan kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, antara lain melalui keikutsertaan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam skema Coremap. Pembahasan pada bagian ini ditujukan pada penyelenggaraan berbagai kegiatan Coremap di tingkat desa/kelurahan.

#### *Penyadaran Masyarakat*

Kegiatan penyadaran masyarakat mencakup semua upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya terumbu karang serta sumber daya laut pada umumnya. Untuk meningkatkan kesadarannya, masyarakat perlu diberi informasi dan pengetahuan yang memadai mengenai peran dan manfaat terumbu karang terhadap ekosistem laut. Kesadaran yang lebih tinggi

terhadap pentingnya sumber daya tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menjaga kelestariannya melalui pengelolaan yang tepat.

Kegiatan penyadaran masyarakat di kedua lokasi penelitian diselenggarakan dalam berbagai bentuk. Salah satu di antaranya adalah menyajikan berbagai informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan terumbu karang dan sumber daya laut dalam kemasan yang bervariasi, seperti poster, *booklet*, *leaflet*, kalender, dan jam yang dibuat oleh penyelenggara Coremap, di tingkat nasional maupun lokal (kabupaten). Bahan-bahan tersebut ditempelkan atau disediakan di berbagai lokasi yang sering dikunjungi penduduk desa/kelurahan. Poster-poster dipasang di tempat-tempat yang biasanya digunakan masyarakat (nelayan) untuk berkumpul ketika tidak melaut, misalnya pos ronda. Selanjutnya, kalender dan jam antara lain dipasang di kantor desa/kelurahan, sehingga masyarakat dapat melihatnya ketika berada di kantor tersebut untuk melakukan berbagai urusan.

Di samping berbagai media yang sengaja diciptakan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat seperti di atas, terdapat pula "media" lain yang bisa menjalankan fungsi tersebut. Baju kaos dan topi yang biasa didapat oleh pelaksana kegiatan atau anggota pokmas Coremap dalam kegiatan pelatihan secara tidak langsung dapat menjadi media untuk penyadaran masyarakat. Hal ini karena baju kaos biasanya ditulisi dengan pesan-pesan sederhana mengenai penyelamatan terumbu karang. Pesan ditulis dengan latar belakang gambar-gambar yang menarik perhatian. Gambar yang menarik mengundang masyarakat untuk membaca pesan dan informasi yang tertulis di baju kaos. Di Desa Mattiro Bombang dan juga di Kelurahan Pundata Baji sering ditemui anggota pokmas dan pengurus Coremap yang memakai jenis kostum tersebut. Dengan demikian, mereka secara tidak langsung melakukan kegiatan penyadaran masyarakat melalui kostum yang dikenakan.

Motivator desa serta anggota pokmas, khususnya pokmas konservasi berperan dalam kegiatan penyadaran masyarakat. Motivator desa melakukan kunjungan pada berbagai lapisan masyarakat untuk menyampaikan informasi-informasi yang tepat

mengenai terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya. Namun, sayangnya kegiatan ini tidak berlangsung terus menerus, antara lain karena kurangnya insentif yang diterima oleh pelaksana program di tingkat yang paling bawah tersebut. Pembayaran honor yang tidak lancar menyebabkan MD kehilangan motivasi untuk melakukan pekerjaan mereka.

### Sosialisasi Coremap

Sosialisasi merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan suatu program dan dilaksanakan sebelum program tersebut berjalan. Kegiatan ini dapat dikatakan sebagai upaya untuk memperkenalkan program yang akan dilaksanakan. Bagi masyarakat di lokasi program, sosialisasi sangat penting dilakukan agar mereka mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai program yang akan diselenggarakan di daerah mereka. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang memadai menjadi salah satu pendukung keberhasilan suatu program.

Seperti program-program pemerintah lainnya, kegiatan sosialisasi Coremap juga telah dilaksanakan sebelum program ini berjalan. Sosialisasi terlebih dahulu dilakukan kepada aparat pemerintah desa/kelurahan serta para pelaksana di tingkat desa/kelurahan (motivator desa/kelurahan), sebelum dilaksanakan untuk masyarakat luas. Sosialisasi kepada pihak pemerintah desa/kelurahan dilakukan di kabupaten dengan mengundang kepala desa/lurah pada pertemuan-pertemuan yang ditujukan untuk memperkenalkan program pengelolaan sumber daya terumbu karang tersebut. Hal yang sama juga dilakukan kepada motivator desa/kelurahan. Kegiatan sosialisasi bagi para pelaksana di tingkat lokasi tersebut dilakukan di kabupaten secara bersama-sama untuk semua motivator di seluruh lokasi Coremap.

Setelah kegiatan untuk aparat pemerintah desa/kelurahan, dilakukan pula sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan ini ditujukan tidak hanya bagi mereka yang dalam kehidupannya berhubungan langsung dengan terumbu karang seperti kelompok nelayan, akan tetapi juga kelompok lainnya yang tidak terkait langsung dengan

sumber daya laut tersebut, misalnya petani dan guru. Hal ini dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui dan memahami program yang akan dilaksanakan di lokasi tempat tinggal mereka.

Berbagai cara dilakukan untuk menyosialisasikan Coremap kepada masyarakat di lokasi program. Di Desa Mattiro Bombang, khususnya di Pulau Salemo, sosialisasi diawali dengan pertemuan yang dilaksanakan di gedung SD di pulau itu. Selain oleh pelaksana Coremap di tingkat kabupaten, pertemuan dihadiri oleh pemuka masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili masing-masing rukun tetangga (RT). Selanjutnya, pada tahun 2007 dilakukan pula pertemuan yang dihadiri oleh wakil masyarakat dari masing-masing RT dan dusun yang terdapat di keempat pulau wilayah Desa Mattiro Bombang. Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut, antara lain upaya pelestarian terumbu karang (melalui kegiatan Coremap) dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat setelah program ini selesai.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tidak dapat diketahui oleh masyarakat luas. Hal ini karena terbatasnya masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi. Selain itu, ada kecenderungan mereka yang mengikutinya tidak menyebarkan informasi yang mereka dapatkan kepada penduduk yang tidak ikut dalam kegiatan sosialisasi. Ada kemungkinan pula mereka yang hadir dalam pertemuan sosialisasi tidak sepenuhnya memahami materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak anggota masyarakat yang tidak mengetahui Coremap, termasuk kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya.

Upaya-upaya lain juga dilakukan agar Coremap lebih tersosialisasi pada seluruh lapisan masyarakat. Salah satu di antaranya adalah mendatangi masyarakat langsung ke tempat-tempat mereka melakukan kegiatan. Upaya ini dilakukan oleh fasilitator dan motivator desa, misalnya dengan mendatangi masyarakat yang sedang berkumpul untuk memberikan penjelasan mengenai Coremap. Pos-pos ronda, warung-warung, dan bahkan rumah-rumah penduduk

menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi melalui cara ini. Di Pulau Sagara, Sabangko, dan Sakuala (Desa Mattiro Bombang), khususnya, cara utama untuk menyosialisasikan kegiatan Coremap adalah dengan mendatangi masyarakat secara langsung. Namun cara ini tidak dapat dilakukan secara efektif, antara lain karena keterbatasan waktu, terutama fasilitator desa. Wilayah kerja seorang fasilitator desa tidak hanya mencakup satu desa, melainkan dua atau tiga desa, padahal banyak desa yang wilayahnya mencakup lebih dari satu pulau yang berpenghuni. Hal ini menyebabkan fasilitator desa tidak dapat mengunjungi seluruh lokasi permukiman penduduk di desa-desa yang menjadi wilayah tugasnya. Selain itu, kunjungan langsung kepada masyarakat memerlukan biaya yang relatif besar, misalnya untuk transportasi dan juga membeli rokok sebagai 'suguhan' pada setiap kunjungan. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang fasilitator berikut ini,

*Kalau datang ke masyarakat kan perlu banyak uang. Untuk mengunjungi penduduk di pulau-pulau harus sewa perahu, apalagi wilayah kerja saya banyak pulaunya. Waktu kita mau ajak omong masyarakat harus keluar rokok dulu. Rokok itu untuk membuka pembicaraan. Padahal honor sering terlambat dibayar. Mana mungkin saya bisa mendatangi seluruh masyarakat.*

Berbeda dengan di Desa Mattiro Bombang yang terdiri dari empat pulau, sosialisasi Coremap di Kelurahan Pundata Baji relatif lebih mudah dilaksanakan dari sisi keterjangkauan lokasi permukiman masyarakat. Meskipun demikian kondisi ini tidak mendukung pelaksanaan sosialisasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terbukti dari masih banyaknya masyarakat, terutama yang tinggal jauh dari pesisir, yang belum mengetahui keberadaan Coremap di wilayah tempat tinggal mereka. Di antara mereka yang mengetahui program tersebut, kebanyakan tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut.

Di kelurahan Pundata Baji beberapa kegiatan dilakukan dalam rangka sosialisasi Coremap. Pada awalnya sosialisasi dilakukan melalui pertemuan yang dilaksanakan di gedung SD yang terletak di wilayah pesisir (Dusun Maccine Baji). Pertemuan tersebut dihadiri oleh pelaksana Coremap di tingkat kabupaten, perangkat kelurahan, serta fasilitator dan motivator desa serta anggota masyarakat. Mayoritas penduduk yang mengikuti pertemuan tersebut adalah yang tinggal di wilayah pesisir. Tidak ada penduduk di wilayah daratan (Dusun Pundata Baji) yang hadir dalam pertemuan sosialisasi, sehingga ada kesan bahwa Coremap hanya ditujukan untuk penduduk di wilayah tersebut.

Selain pertemuan di gedung SD tersebut, diadakan pula sosialisasi berupa pemutaran film tentang kehidupan di laut. Kegiatan tersebut dilakukan di dusun pesisir. Pada awalnya masyarakat menyambut antusias acara pemutaran film itu, terbukti dari banyaknya mereka yang datang untuk menyaksikan film yang akan di putar. Anggota masyarakat yang datang tidak hanya yang tinggal di Dusun Maccine Baji, melainkan juga mereka yang berasal dari Dusun Pundata yang pada umumnya mempunyai kegiatan ekonomi yang tidak terkait langsung dengan sumber daya laut, termasuk terumbu karang. Setelah film diputar beberapa saat dan mengetahui bahwa yang diputar adalah film tentang kehidupan di bawah laut, banyak penduduk yang kemudian meninggalkan tempat karena tidak tertarik dengan tontonan yang diputar. Salah seorang ketua pokmas Coremap yang diwawancarai dalam penelitian ini mengemukakan keadaan ini melalui kutipan berikut:

*Waktu itu Coremap mengadakan pemutaran film di Maccine (Baji). Sebelumnya diumumkan pada masyarakat sampai ke darat sana. Malam itu banyak yang datang, orang Pundata (Baji) datang berbondong-bondong ke pantai mau nonton film. Tapi waktu film sudah mulai yang keluar gambar ikan-ikan, mereka komentar, "kok filmnya tentang ikan, buat apa kita nonton ikan, bosan". Akhirnya masyarakat banyak yang pulang, tidak mau nonton lagi. Jadi percuma putar film.*

Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan pemutaran film tidak mencapai hasil yang diharapkan karena kesalahan strategi yang dilakukan oleh penyelenggara. Seharusnya pemutaran film disertai dengan kegiatan menarik lainnya seperti pertunjukan musik dan lagu yang disukai oleh masyarakat. Film diputar sebagai selingan acara musik dan lagu, misalnya selama penyanyi dan pengiringnya beristirahat. Dengan demikian, masyarakat dapat bertahan di lokasi dan menonton film karena menunggu lanjutan pertunjukan tersebut.

Strategi lainnya yang dapat dilakukan untuk menarik minat penduduk menonton film adalah memutar film populer dengan selingan film dokumentasi tentang sumber daya laut. Seperti halnya pertunjukan musik dan lagu, pertunjukan film populer dipotong beberapa kali untuk memutar film dokumenter. Masyarakat yang ingin menyaksikan film populer sampai selesai akan bertahan di depan layar dan "terpaksa" menonton film dokumenter. Melalui strategi ini tujuan kegiatan pemutaran film, yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya pelestarian terumbu karang serta sumber daya laut umumnya dapat dicapai.

### Pelatihan

Pelatihan mengacu pada semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan berkaitan dengan upaya pengelolaan terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya. Pelatihan tersebut menyangkut berbagai materi, mulai dari yang berhubungan langsung dengan kondisi fisik terumbu karang seperti pelatihan investigasi praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak sampai dengan materi yang tidak terkait langsung dengan kondisi sumber daya laut tersebut, yaitu pelatihan untuk kegiatan mata pencaharian alternatif.

Pelatihan tidak ditujukan untuk semua penduduk di lokasi Coremap, tetapi hanya untuk mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan program tersebut. Di tingkat lokasi/desa peserta pelatihan adalah motivator desa dan anggota-anggota pokmas yang ada dalam Coremap. Materi pelatihan untuk motivator desa kebanyakan adalah

yang terkait dengan administrasi pelaksanaan kegiatan, sedangkan untuk anggota pokmas materi yang diberikan adalah yang berhubungan dengan aktivitas kelompok mereka.

Dalam pelaksanaannya, frekuensi dan jenis pelatihan berbeda-beda antar berbagai pokmas yang ada, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Anggota Pokmas Pengawasan pada umumnya lebih sering mendapat pelatihan dibandingkan dengan anggota Pokmas Jender. Sebagai contoh, di Kelurahan Pundata Baji sejak Coremap dilaksanakan anggota Pokmas Pengawasan sudah menjalani beberapa kali pelatihan seperti menyelam, mengidentifikasi cara-cara penangkapan ikan yang merusak sumber daya laut, dan memantau kondisi terumbu karang, sementara pelatihan untuk kelompok jender terbatas pada keterampilan-keterampilan yang terkait dengan usaha ekonomi produktif. Keadaan yang sama juga ditemui di Desa Mattiro Bombang. Sampai saat penelitian ini dilaksanakan anggota pokmas jender di lokasi ini baru mendapatkan satu kali pelatihan, yaitu pembuatan berbagai jenis makanan, seperti dodol dari bahan rumput laut. Seperti yang diutarakan oleh beberapa narasumber yang diwawancarai, pelatihan untuk kelompok ini dilakukan beberapa hari sebelum dilaksanakannya peninjauan oleh tim dari World Bank.

Selain anggota pokmas, ketua LPSTK dan LKM juga telah mendapat pelatihan. Materi pelatihan yang diberikan untuk ketua LPSTK adalah budidaya ikan hias dan pelatihan menyelam. Selanjutnya, untuk ketua LKM pelatihan yang diberikan meliputi manajemen pengelolaan dana bergulir (dalam skema *seed fund*) untuk kegiatan pokmas UEP. Kegiatan pelatihan untuk kedua kelompok tersebut dilakukan di Pangkajene di bawah koordinasi komponen CBM. Namun karena keterlambatan turunnya *seed fund*, pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari pelatihan tidak bisa segera dimanfaatkan. Di Desa Mattiro Bombang, salah seorang pengurus LKM yang mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan bahkan tidak bisa menerapkan pengetahuannya karena sudah meninggalkan desa tersebut untuk bekerja di daerah lain sebelum dana bergulir turun.

## Edukasi

Kegiatan edukasi mencakup semua upaya untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui berbagai cara dan media. Beberapa di antaranya adalah memberikan pengetahuan dengan cara pembelajaran secara klasikal, melakukan diskusi dengan kelompok-kelompok sasaran, dan melalui media yang memuat bahan-bahan edukasi, sesuai dengan kelompok sasaran seperti buku, poster, *booklet*, dan CD (*compact disc*).

Kegiatan edukasi yang bersifat klasikal terutama dilaksanakan di SD-SD yang terdapat di Desa Mattiro Bombang dan Kelurahan Pundata Baji. Materi edukasi diberikan dalam mata pelajaran muatan lokal, berfokus pada isu-isu yang terkait dengan sumber daya laut dan pengelolaannya. Bahan ajar yang digunakan berupa buku-buku untuk anak-anak sekolah tingkat SD yang diterbitkan oleh sektor kelautan dan perikanan. Meskipun berisi materi tentang sumber daya laut pada umumnya, buku-buku tersebut memuat informasi yang memadai mengenai terumbu karang dan pengelolaannya.

Kegiatan edukasi yang tidak bersifat klasikal antara lain dilaksanakan di Pondok Informasi yang didirikan di setiap lokasi Coremap. Masyarakat bisa datang ke tempat ini untuk mencari informasi dan pengetahuan mengenai semua hal yang terkait dengan terumbu karang dan pengelolaannya. Bahan-bahan edukasi berupa buku, terutama untuk konsumsi anak-anak, poster, *booklet*, dan CD disimpan di tempat ini. Untuk memutar CD, Pondok Informasi mempunyai televisi dan pemutar CD yang bisa digunakan sesuai permintaan. Selanjutnya, poster ditempel di beberapa tempat, selain juga di Pondok Informasi. Poster juga ditempelkan di pondok informasi, di samping di berbagai lokasi startegis lainnya di desa/kelurahan lokasi Coremap.

Pada awal berdirinya, Pondok Informasi di Desa Mattiro Bombang sering dikunjungi, kebanyakan oleh anak-anak yang ingin

membaca buku-buku tentang kelautan. Karena buku-buku yang disediakan banyak berupa cerita pendek yang dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik, anak-anak antusias untuk membacanya. Namun, setelah beberapa waktu kunjungan anak-anak menjadi berkurang karena tidak ada tambahan buku (baru) yang disediakan di Pondok Informasi. Hal ini sesuai dengan penuturan salah seorang pengurus LPSTK di desa ini, " ... *anak-anak senang dengan buku-buku ini, mereka datang ramai-ramai untuk membaca. Tapi bukunya hanya itu-itulah saja, tidak buku baru, mereka sekarang tidak datang lagi*".

Di samping terbatasnya informasi baru, Pondok Informasi di Desa Mattiro Bombang jarang dikunjungi penduduk karena "kantor" LPSTK ini lebih sering ditutup. Idealnya, tempat ini dibuka setiap hari, sehingga semua orang yang butuh informasi dan pengetahuan tentang Coremap bisa mendatangnya. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan karena pengurus LPSTK juga mempunyai kesibukan lain, misalnya bekerja mencari nafkah, maka Pusat Informasi tidak bisa dibuka setiap hari.

Hal yang sedikit berbeda ditemui di Kelurahan Pundata Baji. Koleksi buku di "perpustakaan" Pondok Informasi di lokasi ini lebih banyak dan bervariasi dibandingkan dengan di Desa Mattiro Bombang. Tidak hanya bahan-bahan yang secara spesifik berisi informasi mengenai sumber daya laut, di Kelurahan Pundata Baji juga disediakan buku-buku yang bersifat umum, meskipun lebih banyak untuk segmen anak-anak. Hal ini menyebabkan Pusat Informasi di kelurahan daratan ini masih sering dikunjungi anak-anak. Apalagi, pondok informasi terletak bersebelahan dengan kantor PPL (petugas penyuluh lapangan) milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, yang mempunyai aktivitas setiap hari. Hal ini berdampak pada "hidup"nya kegiatan di pondok informasi

### Kegiatan Pengawasan

Kegiatan pengawasan bertujuan untuk menjaga terumbu karang dari aktivitas-aktivitas yang merusak kelangsungan hidupnya. Aktivitas-aktivitas tersebut terutama penangkapan ikan menggunakan

jenis-jenis armada dan alat tangkap yang merusak, seperti kapal trawl dan bom yang dapat menghancurkan terumbu karang. Kegiatan pengawasan yang intensif berpotensi untuk mencegah terjadinya kerusakan sumber daya laut tempat berkembangbiaknya berbagai jenis ikan karang tersebut.

Dalam kerangka kegiatan Coremap, kegiatan pengawasan dilakukan oleh penduduk yang terlibat sebagai anggota Pokmas Pengawasan (Pokmaswas). Kegiatan ini dilakukan melalui patroli laut menggunakan armada (perahu beserta motornya) yang pengadaannya dilakukan melalui Coremap. Idealnya patroli dilaksanakan secara rutin untuk mencegah kegiatan-kegiatan merusak yang dilakukan terutama oleh nelayan-nelayan yang berasal dari luar lokasi. Namun kenyataannya kegiatan patroli tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada biaya operasional yang disediakan oleh Coremap. Artinya, jika anggota Pokmaswas akan melakukan kegiatan patroli, mereka harus mengupayakan sendiri dana untuk membeli bahan bakar armada patroli. Selain itu, kegiatan patroli yang dilakukan menghambat mereka untuk turun ke laut yang berimplikasi mereka tidak bisa memperoleh penghasilan. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang anggota pokmaswas di Desa Mattiro Bombang, sebagai berikut,

*Saya dan anggota pokmaswas yang lain mau saja kalau disuruh patroli, tapi tidak bisa karena tidak ada biaya. Tidak ada uang untuk beli bahan bakar. Kalau patroli kita kan tidak bisa cari ikan, jadi tidak ada penghasilan. Coba kalau Coremap bisa kasih bahan bakar atau ganti penghasilan kita waktu patroli, kan patroli bisa dilakukan.*

Mengingat anggota pokmaswas tidak dapat melakukan kegiatan mereka secara khusus, maka, semua nelayan dilibatkan dalam upaya menjaga perairan di sekitar mereka dari kegiatan-kegiatan yang merusak. Pengawasan dilakukan bersamaan dengan kegiatan melaut, dengan cara mengusir orang-orang yang melakukan pengrusakan terumbu karang. Namun upaya yang dilakukan oleh nelayan setempat tidak memadai untuk menghambat kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut karena kekuatan armada tangkap

yang digunakan nelayan setempat jauh lebih kecil dibanding pelaku pengrusakan. Upaya yang dilakukan oleh nelayan setempat setidaknya dapat mengurangi intensitas aktivitas pengrusakan yang dilakukan oleh nelayan dari daerah lain. Seorang anggota pokmaswas yang lain mengemukakan sebagai berikut, "... *kita tidak bisa cegah mereka sepenuhnya, tapi paling tidak mereka agak takut karena tahu kita jaga laut kita*".

Di samping karena keterbatasan dana, kegiatan pengawasan juga sulit dilaksanakan karena kegiatan pengeboman oleh nelayan dari luar lokasi sering dilakukan malam hari. Padahal kebanyakan nelayan di lokasi penelitian tidak melaut pada malam hari, karena mereka pada umumnya adalah nelayan tradisional yang pergi melaut pagi hari dan pulang siang atau sore pada hari yang sama. Dengan demikian, tidak ada kegiatan pengawasan yang dilakukan pada malam hari. Hal ini dikemukakan oleh seorang anggota pokmaswas berikut ini,

*Kalau ibu (maksudnya peneliti) ada di pantai malam hari, ibu bisa lihat lampu kapal-kapal mereka. Mereka diam di situ, pura-pura cari ikan di situ, tau-tau sebentar malan sudah terdengar suara ledakan, mereka bom. Kita mau apa, cuma bisa dengar, mau kejar mereka pakai apa. Salah-salah kita yang dilempar bom, kita yang mati.*

Fenomena tidak dikenakannya sanksi hukum bagi pelanggar aturan dan perusak sumber daya laut tidak mendukung upaya pengawasan yang dilakukan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu penyebab berkurangnya minat masyarakat untuk melakukan kegiatan tersebut, seperti dituturkan oleh salah seorang narasumber berikut, "... *kita sudah susah-susah mengejar dan melaporkan orang yang membom, tapi apa, di polisi nanti juga bebas*". Meskipun demikian, penduduk, khususnya nelayan tidak sama sekali menghentikan upaya pengawasan. Kesadaran bahwa kehidupan mereka sangat tergantung pada sumber daya laut dan penghasilan mereka juga sangat tergantung pada kondisi sumber daya tersebut menyebabkan

masyarakat berupaya untuk menjaga kondisi perairan di sekitar mereka.

### Kegiatan UEP

Kegiatan usaha ekonomi produktif merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan di bawah koordinasi komponen CBM. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya anggota pokmas UEP dalam meningkatkan penghasilan mereka. Peningkatan penghasilan dilakukan dengan mengurangi atau bahkan mencegah aktivitas yang merusak sumber daya laut. Dalam rancangan Coremap, kegiatan pokmas UEP dilaksanakan secara berkelompok. Namun dalam kenyataannya, praktik tersebut sulit dilaksanakan karena masing-masing anggota pokmas UEP mengajukan pinjaman dana secara individu untuk kegiatan ekonomi yang akan dilakukan sendiri-sendiri. Dana pinjaman yang diajukan pada umumnya akan digunakan untuk membiayai kegiatan ekonomi yang telah mereka lakukan sebelumnya.

Di Desa Mattiro Bombang, sampai penelitian dilaksanakan kegiatan Pokmas UEP belum bisa dijalankan. Hal ini karena dana untuk kegiatan tersebut, yang ada dalam skema *seed fund* baru turun pada Bulan Juni 2008, bulan yang sama dengan waktu penelitian. Dana yang turun pada pertengahan tahun 2008 itu adalah dana kegiatan tahun 2007, sedangkan untuk tahun 2008 belum ada pencairan *seed fund*. Pencairan dana belum bisa dilaksanakan untuk seluruh pokmas yang ada karena adanya hambatan administrasi. Hal ini karena *seed fund* disalurkan melalui rekening ketua LKM yang lama, yang sudah pindah ke daerah lain. Untuk itu, diperlukan waktu untuk mengganti rekening dengan nama ketua LKM yang baru.

Kegiatan UEP yang sudah dilaksanakan baru terbatas pada pembentukan kelompok (simpan pinjam) yang akan menjadi penerima *seed fund*. Sampai penelitian ini dilaksanakan telah terbentuk tiga kelompok, yaitu kelompok Hiu, Lumba-lumba (keduanya di Pulau Salemo), dan kelompok Kerapu (di Pulau Sakuala). Masing-masing kelompok tersebut terdiri dari anggota dengan kegiatan ekonomi yang berbeda-beda, mulai dari nelayan,

pembuat kue, dan pedagang barang-barang kebutuhan sehari-hari. Mereka adalah individu-individu yang sudah diseleksi oleh pengurus LKM sebagai calon penerima dana bantuan. Dengan demikian, kegiatan kelompok bukan berarti upaya bersama yang dilakukan oleh beberapa individu yang tergabung dalam kelompok, akan tetapi adalah usaha masing-masing individu yang tergabung dalam kelompok. Hal ini menyebabkan tidak ada ikatan kebersamaan antara tiap-tiap individu yang tergabung dalam suatu kelompok.

Usaha ekonomi kelompok UEP belum bisa dilaksanakan, sehingga belum dapat dilakukan penilaian atas pelaksanaan kegiatan UEP di Desa Mattiro Bombang. Namun, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pokmas Pengawasan dapat dianggap sebagai usaha ekonomi produktif, meskipun tidak dalam skema Pokmas UEP. Kegiatan tersebut berupa pemasangan rumpon di 6 titik mencakup keempat pulau di Desa Mattiro Bombang. Pemasangan rumpon, yang berfungsi sebagai tempat hidup dan berkembangbiaknya ikan dimaksudkan agar hasil tangkapan nelayan dalam setiap kali melaut bisa meningkat. Tidak hanya nelayan yang tergabung dalam Pokmas Pengawasan, semua nelayan di seluruh Desa Mattiro Bombang dapat memanfaatkan lokasi penempatan rumpon sebagai areal penangkapan ikan mereka. Dengan demikian, kegiatan pokmas tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Keadaan yang berbeda dengan di Desa Mattiro Bombang ditemui di Kelurahan Pundata Baji. Di Kelurahan yang terletak di wilayah daratan ini *seed fund* telah turun dan dimanfaatkan sejak April 2008. Sampai dengan pelaksanaan penelitian, dana tersebut sudah dipinjamkan kepada 39 orang anggota Pokmas UED. Laporan pengelolaan *seed fund* bulan April dan Mei 2008 yang dibuat oleh ketua LKM Kelurahan Pundata Baji memperlihatkan bahwa jumlah pinjaman yang diterima berkisar antara Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,-. Kegiatan ekonomi penerima bantuan juga bervariasi, mulai dari yang terkait langsung dengan sumber daya laut seperti nelayan dan jual beli ikan/udang, sampai dengan yang tidak berhubungan dengan sumber daya tersebut, yaitu usaha perbengkelan dan perdagangan barang-barang campuran. Salah seorang pengurus LKM yang diwawancarai mengemukakan bahwa sampai dua bulan

setelah kegiatan berlangsung, pengembalian dana berjalan lancar. Artinya, semua peminjam membayar cicilan pinjaman sesuai dengan ketentuan (jumlah cicilan dan waktu pembayaran).

Mencermati nama-nama penerima bantuan yang tertulis dalam laporan pengelolaan *seed fund* tersebut, terdapat beberapa di antaranya yang secara ekonomi dikategorikan sebagai kelompok kaya. Bahkan sebagian adalah pengusaha yang mempunyai anak buah, misalnya nelayan atau petambak yang berhubungan kerja dengan mereka. Salah seorang pengurus LKM yang diwawancarai membenarkan fakta bahwa orang yang termasuk golongan ekonomi kuat di lokasi penelitian juga memperoleh pinjaman *seed fund* dengan pertimbangan adanya jaminan pengembalian dana. Hal ini karena asumsi bahwa mereka mampu mengembalikan seluruh dana yang dipinjam, sehingga keberadaan dana bisa dipertahankan dalam jangka panjang.

Tidak semua kelompok kaya penerima bantuan *seed fund* menggunakan dana pinjaman untuk kepentingan pribadi. Beberapa di antaranya meminjamkannya kembali kepada kelompok yang tergolong tidak mampu untuk digunakan sebagai (tambahan) modal usaha mereka. Kelompok tidak mampu tersebut membayar cicilan kepada penerima *seed fund*, yang kemudian membayarkannya kepada pengurus LKM. Dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa mereka yang namanya tercatat sebagai penerima bantuan dana hanya berperan sebagai "penjamin" bagi kelompok tidak mampu yang benar-benar menggunakannya. Jika di kemudian hari kelompok ini tidak dapat mengembalikan dana yang mereka pinjam, maka orang yang secara administratif tercatat sebagai peminjam akan mengembalikan dana tersebut kepada pengurus LKM untuk digulirkan lagi kepada peminjam lain. Meskipun komitmen tersebut belum dapat dibuktikan karena saat penelitian dilaksanakan kegiatan UEP baru berlangsung sekitar dua bulan, setidaknya ada upaya penduduk kaya untuk membantu kelompok penduduk tidak mampu.

### 3.2. PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN/PROGRAM COREMAP

Pengetahuan masyarakat tentang suatu program (pembangunan), termasuk tujuan yang hendak dicapai serta kegiatan yang tercakup di dalamnya sangat berperan bagi kesuksesan program tersebut. Pengetahuan yang memadai mengenai program pembangunan menjadi salah satu pendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan di dalam suatu program, yang selanjutnya berpotensi untuk menyukseskan program tersebut.

Bagian ini membahas pengetahuan masyarakat tentang Coremap di dua lokasi penelitian. Pengetahuan yang dimaksud meliputi hal-hal yang terkait dengan keberadaan program, berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta keterlibatan dalam program penyelamatan dan pengelolaan terumbu karang tersebut. Data mengenai pengetahuan (responden) tentang Coremap dan keterlibatan (mereka) dalam berbagai kegiatan di dalamnya diperlukan untuk perbaikan kinerja program di masa mendatang.

#### **Desa Mattiro Bombang**

Berdasarkan kuesioner yang diisi oleh 122 individu anggota rumah tangga yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini, terlihat bahwa pengetahuan mereka mengenai keberadaan Coremap masih terbatas. Hanya sekitar sepertiga (33,6 persen) responden yang mengetahui bahwa Coremap telah dilaksanakan di lokasi tempat tinggal mereka. Data ini dapat diinterpretasi dari dua sisi. Pertama, hal ini menunjukkan kurangnya sosialisasi Coremap kepada masyarakat. Kedua, sedikitnya masyarakat yang mengetahui Coremap kemungkinan karena kurangnya kepedulian responden terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di sekitar mereka, meskipun Coremap telah dilaksanakan sejak tahun 2005. Ada kemungkinan karena sejak tahun 2005 sampai dengan bulan Juni 2008 (waktu pelaksanaan penelitian) kegiatan Coremap baru terbatas pada sosialisasi dan pelatihan untuk anggota pokmas, sedangkan kegiatan pemberian bantuan dana belum dilaksanakan menyebabkan banyak responden tidak mengetahui keberadaan program ini.

Tabel 3.1 menyajikan data pengetahuan masyarakat di Desa Mattiro Bombang mengenai berbagai kegiatan Coremap yang telah dilaksanakan lebih dari dua tahun di desa mereka. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pengetahuan responden tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Coremap sangat terbatas. Dari 10 kegiatan Coremap yang ditanyakan kepada responden, proporsi terbesar mereka (23 persen) mengetahui kegiatan ‘peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pelestarian terumbu karang’. Untuk kegiatan-kegiatan lainnya, umumnya kurang dari 20 persen responden yang mengetahuinya (berkisar antara 7,4 persen – 16,4 persen), seperti ditunjukkan oleh data pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1. Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Mengenai Kegiatan COREMAP, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)**

No.	Kegiatan COREMAP	Tahu	Tidak tahu	Jumlah (N=122)
1.	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pelestarian terumbu karang	23,0	77,0	100,0
2.	Kegiatan perlindungan/pengawasan pesisir dan laut	16,4	83,6	100,0
3.	Pembentukan Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK)	13,1	86,9	
4.	Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	8,2	91,8	100,0
5.	Pendampingan UEP	7,4	92,6	100,0
6.	Penyusunan rencana pemanfaatan dan pelestarian terumbu karang (RPTK)	12,3	87,7	100,0
7.	Pokmas konservasi	8,2	91,8	100,0
8.	Pokmas UEP	10,7	89,3	
9.	Pokmas wanita/jender	9,8	90,2	100,0
10.	Pokmas lain	4,9	95,1	100,0

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008.

Salah satu kemungkinan yang menyebabkan terjadinya keadaan ini adalah tidak tuntasnya sosialisasi Coremap yang dilakukan oleh pelaksananya, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat desa. Artinya, pemasyarakatan program ini tidak mencakup

seluruh kegiatan yang dilaksanakan atau penjelasan mengenai kegiatan-kegiatan yang ada tidak dapat ditangkap oleh masyarakat. Kemungkinan lain yang menyebabkan kondisi tersebut adalah sebagian besar responden dalam penelitian ini tidak terlibat dalam berbagai kegiatan sosialisasi. Dengan demikian, mudah dimengerti jika pengetahuan mereka tentang kegiatan-kegiatan Coremap sangat minim.

Di antara responden yang mengetahui masing-masing kegiatan yang dilaksanakan dalam Coremap, lebih dari separuhnya terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Proporsi terbesar dari kelompok responden tersebut adalah mereka yang terlibat dalam pelatihan UEP dan pokmas konservasi (Tabel 3.2). Khusus untuk pokmas konservasi, hal ini mudah dimengerti karena kegiatan kelompok ini berjalan lebih awal daripada kegiatan kelompok lainnya. Ada kemungkinan responden yang terlibat dalam dua kegiatan tersebut adalah orang sama karena sampai saat penelitian dilaksanakan kegiatan pokmas konservasi sangat terkait dengan usaha ekonomi produktif. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan pokmas konservasi yang telah dilaksanakan adalah penempatan rumpun, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan, sehingga berpotensi meningkatkan kondisi ekonomi anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, kegiatan pelatihan UEP juga bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan mereka yang terlibat dalam pokmas konservasi juga mengikuti kegiatan pelatihan UEP karena tidak ada ketentuan yang melarang seseorang mengikuti lebih dari satu kegiatan.

Sama halnya dengan berbagai kegiatan Coremap lainnya, pengetahuan responden tentang kegiatan ekonomi yang diselenggarakan program ini juga terbatas. Kegiatan ekonomi yang diselenggarakan Coremap mencakup (1) pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang, (2) pemberian dana bergulir/kredit untuk mengembangkan UEP masyarakat, dan (3) pelatihan dan bimbingan keterampilan untuk meningkatkan usaha ekonomi. Kurang dari seperlima responden yang mengetahui adanya ketiga kegiatan tersebut. Bahkan kurang dari 10 persen di antaranya

tidak mengetahui keberadaan kegiatan pelatihan dan bimbingan keterampilan untuk meningkatkan usaha ekonomi (lihat Lampiran Tabel 3.1). Sekali lagi, kurang tuntasnya pelaksanaan sosialisasi Coremap merupakan salah satu kemungkinan penyebab kenyataan ini. Kemungkinan lain yang menyebabkan keadaan tersebut adalah cakupan peserta kegiatan sosialisasi yang terbatas, sehingga banyak anggota masyarakat di lokasi penelitian yang tidak mengetahui secara detil kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan program ini, termasuk kegiatan ekonomi.

**Tabel 3.2. Distribusi Responden yang Mengetahui Kegiatan COREMAP Menurut Keterlibatannya, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)**

No.	Kegiatan COREMAP	Terlibat	Tidak terlibat	Jumlah (N)
1.	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pelestarian terumbu karang	51,7	48,3	100,0 (28)
2.	Kegiatan perlindungan/pengawasan pesisir dan laut	52,4	47,6	100,0 (20)
3.	Pembentukan Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK)	62,5	37,5	100,0 (16)
4.	Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	80,0	20,0	100 (10)
5.	Pendampingan UEP	77,8	22,2	100 (9)
6.	Penyusunan rencana pemanfaatan dan pelestarian terumbu karang (RPTK)	60,0	40,0	100 (15)
7.	Pokmas konservasi	80,0	20,0	100 (10)
8.	Pokmas UEP	69,2	30,8	100 (13)
9.	Pokmas wanita/jender	66,7	33,3	100 (12)
10.	Pokmas lain	83,3	16,7	100 (6)

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008.

Informasi mengenai kegiatan ekonomi yang dilaksanakan Coremap pada umumnya diperoleh responden dari pengurus dan penyelenggara Coremap, seperti fasilitator dan motivator desa, serta anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Coremap. Keterlibatan aparat desa sampai ke tingkat RW/RW dalam menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan ekonomi Coremap sangat minim. Dari seluruh responden yang diwawancarai, kurang dari 10 persen yang memperoleh informasi mengenai pemilihan jenis-

jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang dari aparat desa. Sementara untuk dua kegiatan ekonomi lainnya, tidak ada responden yang memperoleh informasi dari pimpinan desa mengenai kegiatan tersebut (Lampiran Tabel 3.2). Kenyataan ini terjadi karena keterlibatan kepala desa pada umumnya hanya sekedar mengetahui keberadaan program tersebut di wilayahnya. Sebelum program ini dilaksanakan kepala desa dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosialisasi, namun dalam pelaksanaannya mereka tidak banyak terlibat.

Responden yang mengetahui jenis kegiatan ekonomi Coremap kebanyakan juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Bahkan untuk pelatihan dan bimbingan keterampilan untuk meningkatkan usaha ekonomi, hampir semua yang mengetahui keberadaannya ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (lihat Lampiran Tabel 3.3). Berdasarkan data ini dapat diartikan bahwa responden mempunyai pengetahuan tentang jenis kegiatan ekonomi Coremap karena mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Selanjutnya, pengetahuan responden mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi Coremap tidak selalu berarti bahwa kegiatan sosialisasi Coremap berhasil mencapai target. Mereka yang terlibat dalam setiap kegiatan ekonomi Coremap pada umumnya (lebih dari 80 persen responden) merasakan manfaat dari kegiatan yang diikuti. Kenyataan ini memberikan dampak positif bagi kelangsungan kegiatan Coremap di masa mendatang. Manfaat yang dirasakan oleh kelompok ini menjadi daya tarik bagi mereka yang belum terlibat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang diselenggarakan Coremap.

Di antara 122 orang responden yang diwawancarai di desa Mattiro Bombang, sebanyak 29 orang mengetahui salah satu atau ketiga kegiatan ekonomi yang diselenggarakan Coremap. Ketika didalami lebih lanjut, hanya sekitar 3-7 orang yang mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi yang telah dilaksanakan. Jenis-jenis usaha ekonomi tersebut adalah perdagangan/warung, perikanan budidaya, perikanan tangkap, peternakan (misalnya ayam/bebek/itik/kambing), pembuatan makanan/kue, pengolahan hasil laut/ikan asin, pembuatan kerajinan/souvenir, dan usaha ekonomi lainnya. Di antara semua jenis usaha ekonomi tersebut, yang paling banyak diketahui responden (7

orang) adalah usaha perikanan tangkap. Data ini sejalan dengan jenis kegiatan Coremap yang sudah dilaksanakan, yaitu penempatan rumpon oleh anggota pokmas konservasi. Manfaat yang dirasakan dari kegiatan ini adalah meningkatnya hasil tangkapan nelayan yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan pendapatan. Hampir semua nelayan merasakan manfaat tersebut, sehingga tidak mengherankan jika lebih banyak responden yang mengetahui usaha perikanan tangkap sebagai jenis usaha ekonomi yang dilaksanakan Coremap.

Tidak semua responden yang mengetahui jenis-jenis kegiatan ekonomi Coremap terlibat dalam kegiatan tersebut, kecuali untuk usaha perikanan. Dari 7 orang responden yang mengetahui adanya usaha perikanan tangkap, semuanya terlibat dalam kegiatan itu. Hal ini karena mayoritas penduduk Desa Mattiro Bombang adalah nelayan, sehingga mereka lebih memilih untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan mata pencaharian mereka. Meskipun keterlibatan responden dalam usaha ekonomi Coremap masih sangat minim, berkisar antara 2-7 orang, manfaat kegiatan ini telah dirasakan oleh mereka yang terlibat. Artinya, program ini telah memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, terutama dari sisi ekonomi.

### **Kelurahan Pundata Baji**

Pengetahuan responden di Kelurahan Pundata Baji mengenai keberadaan Coremap lebih baik dibanding responden di Desa Mattiro Bombang. Hal ini terlihat dari hasil penelitian, yaitu sebanyak 55,8 persen dari 120 responden mengetahui adanya Coremap di lokasi tempat tinggal mereka, sedangkan di Desa Mattiro Bombang proporsinya sebesar 33,6 persen (dari 122 responden). Beberapa kemungkinan diduga menyebabkan keadaan ini. Pertama, posisi wilayah kelurahan yang seluruhnya berada di daratan, termasuk pesisir memudahkan penyampaian informasi mengenai keberadaan Coremap. Kemudahan menjangkau seluruh wilayah kelurahan menyebabkan berbagai informasi juga mudah disampaikan ke seluruh pelosok daerah ini. Kedua, akses terhadap informasi yang lebih

terbuka, antara lain karena kemudahan transportasi menuju dan ke luar wilayah memungkinkan penduduk kelurahan ini lebih mudah untuk memperoleh informasi dari luar wilayah, termasuk informasi mengenai program pengelolaan terumbu karang.

Sejalan dengan lebih banyaknya responden yang mengetahui keberadaan Coremap, proporsi mereka yang mengetahui berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut juga lebih besar. Jika di Desa Mattiro Bombang proporsi terbesar responden yang mengetahui jenis-jenis kegiatan Coremap adalah sekitar 23 persen, di wilayah pesisir ini proposinya mencapai sekitar 45 persen. Proporsi terbesar responden di Kelurahan Pundata Baji mengetahui kegiatan "peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pelestarian terumbu karang" (45,8 persen) dan kegiatan "perlindungan/pengawasan pesisir dan laut" (45 persen). Kenyataan ini terjadi karena dalam pelaksanaan Coremap, peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pelestarian terumbu karang termasuk kegiatan yang paling awal dilakukan. Selanjutnya, besarnya proporsi responden yang mengetahui kegiatan perlindungan/pengawasan pesisir dan laut kemungkinan terjadi karena kegiatan tersebut sangat terkait dengan sumber mata pencaharian penduduk yang menjadi target (utama) Coremap di Kelurahan Pundata Baji, yaitu yang tinggal di Dusun Maccine Baji yang berlokasi di pinggir pantai.

Proporsi responden yang mengetahui kegiatan-kegiatan lainnya adalah kurang dari 40 persen. Jika dikaitkan dengan kegiatan sosialisasi, dapat dikatakan bahwa di Kelurahan Pundata Baji sosialisasi relatif lebih berhasil daripada yang dilaksanakan di Desa Mattiro Bombang. Kegiatan yang paling sedikit diketahui oleh responden adalah pendampingan UEP, seperti juga yang ditemui di lokasi Coremap di kepulauan (Desa Mattiro Bombang).

**Tabel 3.3. Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Mengenai Kegiatan COREMAP, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%)**

No.	Kegiatan COREMAP	Tahu	Tidak tah	Jumlah (N=120)
1.	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pelestarian terumbu karang	45,8	54,2	100,0
2.	Kegiatan perlindungan/pengawasan pesisir dan laut	45,0	55,0	100,0
3.	Pembentukan Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK)	37,5	62,5	
4.	Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	21,7	78,3	100,0
5.	Pendampingan UEP	16,7	83,3	100,0
6.	Penyusunan rencana pemanfaatan dan pelestarian terumbu karang (RPTK)	21,7	78,3	100,0
7.	Pokmas konservasi	20,8	79,2	100,0
8.	Pokmas UEP	21,7	78,3	
9.	Pokmas wanita/jender	18,3	81,7	100,0
10.	Pokmas lain	3,3	96,7	100,0

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008.

Pengetahuan responden tentang Coremap dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya tidak diikuti oleh keterlibatan mereka dalam masing-masing kegiatan. Data pada Tabel 3.4 memperlihatkan bahwa kurang dari separuh responden yang mengetahui kegiatan-kegiatan Coremap terlibat dalam berbagai kegiatan. Jika dibandingkan dengan Desa Mattiro Bombang, keterlibatan responden di Kelurahan Pundata Baji lebih rendah. Hal ini dapat diartikan bahwa informasi mengenai kegiatan-kegiatan Coremap lebih merata di kalangan penduduk Kelurahan Pundata Baji, sehingga mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan program ini juga mengetahui keberadaan setiap program. Di antara sepuluh kegiatan Coremap yang ditanyakan keterlibatan responden yang terendah adalah pada pokmas jender, Ada kemungkinan hal ini terjadi karena pokmas jender adalah satu-satunya pokmas yang semua anggotanya perempuan, sedangkan mayoritas responden adalah laki-laki. Oleh karena itu, mudah

dipahami jika proporsi terkecil responden yang terlibat dalam kegiatan Coremap adalah pada pokmas jender.

Pengetahuan responden tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi Coremap bervariasi, berkisar antara 30,8 persen – 45,8 persen. Angka ini jauh lebih besar daripada yang ditemui di Mattiro Bombang. Sekali lagi, kemudahan akses informasi di lokasi yang terletak di daratan (pesisir) ini menyebabkan banyak penduduk yang mengetahui berbagai kegiatan yang dilakukan Coremap, termasuk kegiatan ekonomi. Sama halnya dengan yang ditemui di Desa Mattiro Bombang, proporsi terbesar responden memperoleh informasi mengenai kegiatan ekonomi Coremap dari pelaksana dan pengurus Coremap, khususnya di tingkat kelurahan, diikuti oleh mereka yang memperoleh informasi dari anggota masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan program tersebut.

**Tabel 3.4. Distribusi Responden yang Mengetahui Kegiatan COREMAP Menurut Keterlibatannya, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%)**

No.	Kegiatan COREMAP	Terlibat	Tidak terlibat	Jumlah (N)
1.	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pelestarian terumbu karang	45,5	54,5	100,0 (55)
2.	Kegiatan perlindungan/pengawasan pesisir dan laut	42,6	57,4	100,0 (54)
3.	Pembentukan Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK)	48,9	51,1	100,0 (45)
4.	Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	46,2	53,8	100 (26)
5.	Pendampingan UEP	35,0	65,0	100 (20)
6.	Penyusunan rencana pemanfaatan dan pelestarian terumbu karang (RPTK)	42,3	57,7	100 (26)
7.	Pokmas konservasi	36,0	64,0	100 (25)
8.	Pokmas UEP	23,1	76,9	100 (26)
9.	Pokmas wanita/jender	18,2	81,8	100 (22)
10.	Pokmas lain	50,0	50,0	100 (4)

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi, COREMAP, 2008.

Peranan aparat kelurahan dalam penyampaian informasi mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi Coremap tidak menonjol. Hal ini ditunjukkan oleh relatif kecilnya proporsi responden yang memperoleh informasi mengenai kegiatan tersebut dari pimpinan formal Kelurahan Pundata Baji. Namun jika dibandingkan dengan keadaan di desa Mattiro Bombang, aparat Kelurahan Pundata Baji cenderung lebih berperan dalam penyampaian informasi mengenai kegiatan ekonomi Coremap. Hal ini terlihat dari adanya responden yang memperoleh informasi dari aparat kelurahan pada semua jenis kegiatan ekonomi, meskipun proporsinya kecil (lihat Lampiran Tabel 3.9). Sementara itu, di Desa Mattiro Bombang informasi mengenai kegiatan ekonomi Coremap yang diperoleh responden dari aparat desa hanya pada kegiatan "pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang" (Lampiran Tabel 3.2). Berdasarkan kenyataan ini dapat dikatakan bahwa aparat pemerintah di Kelurahan Pundata Baji lebih berperan dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan ekonomi Coremap dibandingkan dengan kelompok yang sama di Desa Mattiro Bombang.

Keterlibatan responden (yang mengetahui jenis kegiatan ekonomi) dalam kegiatan-kegiatan tersebut relatif rendah daripada kelompok yang sama di Desa Mattiro Bombang. Jika di Desa Mattiro Bombang proporsi kelompok ini lebih dari 50 persen, bahkan pada kegiatan pelatihan dan bimbingan keterampilan untuk meningkatkan usaha proporsinya mencapai 90 persen (Lampiran Tabel 3.3), di Kelurahan Pundata Baji proporsi responden yang mengetahui jenis kegiatan ekonomi dan terlibat di dalamnya kurang dari separuh (lihat Lampiran Tabel 3.10). Keadaan ini dapat dijelaskan dengan dua kemungkinan. Pertama, responden di Kelurahan Pundata Baji kurang berkeinginan untuk mengikuti kegiatan Coremap. Kedua, informasi mengenai kegiatan Coremap menyebar di kalangan masyarakat luas (termasuk responden), sehingga mereka yang tidak terlibat pun juga mengetahui kegiatan-kegiatan (ekonomi) yang dilaksanakan Coremap.

Penelitian ini mendapatkan sebanyak 56 orang dari 120 responden mengetahui salah satu dari tiga jenis kegiatan ekonomi Coremap yang ditanyakan. Proporsi terbesar dari 56 orang responden

tersebut (46,4 persen) mengetahui bahwa jenis usaha ekonomi yang pernah dilaksanakan Coremap adalah pengolahan hasil laut/ikan asin, diikuti oleh penangkapan ikan dan kegiatan perikanan budidaya. Hal ini mudah dimengerti karena selama ini terkesan bahwa Coremap secara khusus ditujukan untuk penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Akibatnya, jenis-jenis usaha yang terkait langsung dengan aktivitas ekonomi nelayan lebih diketahui responden dibanding berbagai jenis usaha lainnya.

Dalam konteks manfaat kegiatan, semua responden yang terlibat mengatakan bahwa mereka memperoleh manfaat dari usaha ekonomi Coremap yang diikuti. Meskipun jumlah responden yang terlibat dalam berbagai usaha ekonomi relatif sedikit, yaitu paling banyak 26 orang pada usaha pengolahan hasil laut, manfaat kegiatan Coremap sudah dirasakan oleh mereka yang ikut serta dalam kegiatan program ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bagi mereka yang terlibat, Coremap memberikan dampak positif. Agar Coremap dapat dirasakan oleh lebih banyak penduduk di lokasi kegiatan, maka di masa mendatang upaya untuk mengundang keikutsertaan masyarakat harus lebih menjadi perhatian para pengelola dan penyelenggara program ini, terutama di tingkat desa/kelurahan.



## **BAB IV**

# **PENDAPATAN PENDUDUK DAN PERUBAHANNYA**

**S**alah satu tujuan khusus pelaksanaan COREMAP fase II adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk (Direktorat Jenderal Kelautan dan Pesisir Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007). Tingkat pendapatan merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk maka dapat semakin baik kondisi ekonomi dan semakin sejahtera penduduk tersebut. Karena itu indikator penting dalam melihat keberhasilan Coremap adalah meningkatnya pendapatan total masyarakat yang didapat dari berbagai kegiatan berbasis terumbu karang dan kegiatan alternatif sebesar 10 persen, pada akhir program (Project Appraisal Document - World Bank, 2004).

Bertolak dari indikator tersebut diatas, bab ini membahas dan mendiskripsikan pendapatan penduduk Kabupaten Pangkep dalam beberapa tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2008. Secara khusus bab ini juga menggambarkan perubahan pendapatan rumah tangga terpilih (T0 dan T1) di kedua lokasi penelitian. T0 adalah tahun 2006, sebagai titik awal dalam melihat perubahan dan T1 adalah tahun 2008. Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, kedua lokasi penelitian terpilih mewakili dua karakteristik wilayah yang berbeda, yaitu kepulauan dan pesisir Kabupaten Pangkep. Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tuppabiring mewakili wilayah kepulauan dan Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang mewakili wilayah pesisir. Selain itu, bab ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan penduduk, yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan pelaksanaan COREMAP dan berbagai program pemerintah lainnya.

#### **4.1. PENDAPATAN KABUPATEN PANGKEP**

Pendapatan Kabupaten Pangkep menggambarkan kondisi makro perekonomian berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Bappeda dan BPS Kabupaten Pangkep. Data yang digunakan untuk melihat perubahan perekonomian Kabupaten Pangkep adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sejak tahun 2000 sampai dengan 2006.

##### **4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangkep**

Selama kurun waktu 2000 sampai dengan 2006, perekonomian Kabupaten Pangkep terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat Tabel 4.1). Pada tahun 2000 PDRB Kabupaten Pangkep berdasarkan atas harga konstan tahun 2000 berjumlah Rp. 1.392.780.000,-. Jumlah ini mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2006 menjadi Rp. 1.967.630.000,-. Sejalan dengan peningkatan jumlah PDRB-nya, sumbangan Kabupaten Pangkep terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dari 4,37 persen pada tahun 2002 menjadi 4,49 persen pada tahun 2006 (BPS Kabupaten Pangkep, 2004; BPS Kabupaten Pangkep, 2007a).

Meskipun secara nominal pendapatan Kabupaten Pangkep mengalami peningkatan setiap tahun, akan tetapi pertumbuhan ekonomi Kabupaten ini cenderung mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi terendah Kabupaten Pangkep terjadi pada tahun 2003 yang mencapai 1,98 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 12,91 persen, terjadi pada tahun 2001. Dalam dua tahun terakhir (2005-2006) pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkep tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan yaitu 5,61 persen (2005) dan 5,92 persen (2006), padahal menurut analisis ekonomi regional Provinsi Sulawesi Selatan, Pangkep merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat, selain Kabupaten Luwu (Saharudin, 2006).

**Tabel 4.1. PDRB Kabupaten Pangkep dan Pertumbuhannya 2000-2006**

Tahun	PDRB Harga Berlaku (Milyar Rp)	PDRB Harga Konstan (Milyar Rp)	Pertumbuhan (%)
2000	1.392,78	1.392,78	-
2001	1.623,14	1.572,60	12,91
2002	1.763,97	1.624,19	3,28
2003	1.936,94	1.656,41	1,98
2004	2.145,41	1.758,99	6,19
2005	2.381,01	1.857,73	5,61
2006*)	2.735,86	1.967,63	5,92
Rata-Rata			5,98

\*) Angka sementara

Sumber: BPS Kabupaten Pangkep 2007a

#### **4.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha: Fokus pada Sektor Pertanian**

Sub-bagian ini membahas PDRB menurut lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Pangkep. Berdasarkan lapangan usaha, sumbangan PDRB terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Pangkep sejak kurun waktu 2000 sampai dengan 2006 berasal dari sektor industri pengolahan. Selama tahun 2000 sampai dengan 2004, persentase PDRB yang berasal dari sektor industri pengolahan mencapai lebih dari 50 persen setiap tahun. Namun, sejak tahun 2005 kontribusi PDRB dari sektor industri pengolahan berdasarkan harga konstan tahun 2000 mengalami penurunan, dan di akhir tahun 2006 persentasenya mencapai 33,28 persen (lihat Tabel 4.2).

Penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Pangkep bertolakbelakang dengan peningkatan kontribusi sektor pertanian. Sejak tahun 2000, kontribusi PDRB dari sektor pertanian berada pada peringkat kedua setelah sektor industri pengolahan. Sumbangan PDRB di sektor pertanian mengalami peningkatan yang cukup besar antara tahun 2004 dan 2006. Pada tahun 2004 sumbangan sektor pertanian sebesar 18,29 persen, sedangkan pada tahun 2006 meningkat mencapai lima puluh persen lebih besar, yaitu menjadi 27,27 persen. Keadaan tersebut kemungkinan mencerminkan adanya pergeseran pembangunan di

Kabupaten Pangkep yang sebelum tahun 2004 lebih menekankan pada pembangunan di sektor industri pengolahan, akan tetapi setelah tahun 2004 pembangunan di sektor pertanian terus mengalami peningkatan. Selain kedua sektor tersebut, hampir tidak terlihat peningkatan sumbangan sektor-sektor lainnya terhadap PDRB Kabupaten Pangkep sejak tahun 2000 sampai dengan 2006. Sektor pembangunan yang memberikan distribusi PDRB terkecil dan cenderung tidak mengalami perubahan adalah sektor listrik, gas, dan air bersih, dengan persentase kurang dari satu persen. Selain itu, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan serta sektor bangunan juga memberikan sumbangan yang relatif kecil terhadap PDRB, yaitu kurang dari lima persen. Sumbangan sektor-sektor tersebut memperlihatkan peningkatan sejak dua tahun terakhir (2005-2006), meskipun persentasenya masih sangat rendah.

**Tabel 4.2. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Pangkep Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000, Kabupaten Pangkep Tahun 2000-2006 (dengan Semen Tonasa)**

<i>Lapangan Usaha</i>	2000	2001	2002	2003	2004	2005*)	2006*)
Pertanian	19.53	18.38	19.01	18.88	18.29	27.24	27.27
Pertambangan dan penggalian	5.02	4.82	4.86	4.99	5.07	7.95	7.98
Industri pengolahan	54.57	57.10	55.89	55.18	55.73	33.51	33.28
Listrik, gas dan air bersih	0.36	0.35	0.35	0.36	0.36	0.55	0.55
Bangunan	2.88	2.75	2.81	2.90	2.93	4.27	4.25
Perdagangan, hotel dan restoran	4.53	4.27	4.35	4.60	4.55	6.78	6.76
Angkutan dan komunikasi	3.98	3.42	3.52	3.64	3.63	5.34	5.10
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	2.04	2.10	2.23	2.53	2.72	3.84	3.67
Jasa – jasa	7.10	6.81	6.98	6.92	6.71	10.53	11.14
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

\*) Angka sementara

Sumber: BPS Kabupaten Pangkep, 2007a

Selama kurun waktu 2000-2006 PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 memperlihatkan adanya fluktuasi pertumbuhan

sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2001 mencapai 18,16 persen. Sektor ini mengalami penurunan pertumbuhan terbesar di tahun 2003, menjadi 0,68 persen, namun di tahun 2005 kembali mengalami peningkatan mencapai 7,17 persen. Akan tetapi, pada tahun 2006 pertumbuhan sektor industri pengolahan kembali mengalami penurunan menjadi 5,65 persen, masih lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan sektor pertanian pada tahun yang sama (lihat Tabel 4.3). Pertumbuhan sektor pertanian juga cenderung mengalami penurunan pada tahun 2001 (6,31 persen) sampai dengan 2003 (1,30 persen), dan kembali menggeliat pada tahun 2004 (2,86 persen) dan pada tahun 2006 pertumbuhan sektor pertanian mencapai 5,98 persen. Dengan demikian, dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2006 terlihat adanya peningkatan pertumbuhan pertanian dibandingkan dengan periode 2000 sampai dengan 2004.

**Table 4.3. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, Kabupaten Pangkep Tahun 2001-2006 (%) (dengan semen Tonasa)**

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005	2006*)
Pertanian	6.31	6.81	1.30	2.86	2.77	5.98
Pertambangan dan penggalian	8.39	4.11	4.75	7.90	8.16	6.32
Industri pengolahan	18.16	1.09	0.68	7.26	7.17	5.65
Listrik, gas dan air bersih	7.68	4.93	4.80	5.82	4.67	7.10
Bangunan	7.71	5.55	5.38	7.28	0.54	5.52
Perdagangan, hotel, dan restoran	6.38	5.35	7.73	5.04	2.85	5.55
Angkutan dan komunikasi	2.79	6.15	5.53	6.03	1.34	1.14
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	16.26	9.59	15.76	14.28	0.97	1.35
Jasa - jasa	8.26	5.84	1.09	3.01	8.30	12.03
PDRB	12.91	3.28	1.98	6.19	5.61	5.92

\*) Angka sementara

Sumber: BPS Kabupaten Pangkep, 2007a

Berdasarkan dua indikator yaitu sumbangan terhadap PDRB kabupaten dan pertumbuhan ekonomi terlihat bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang mengalami peningkatan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan sektor industri pengolahan. Sektor pertanian memberikan manfaat ekonomi yang lebih langsung dirasakan oleh penduduk Kabupaten Pangkep dibandingkan dengan

sektor industri pengolahan. Manfaat ekonomi dari sektor industri pengolahan yang didominasi oleh PT. Semen Tonasa lebih banyak dirasakan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, dilihat dari penyerapan tenaga kerja, sektor industri pengolahan hanya sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu 5,20 persen (2005) dibandingkan dengan sektor-sektor perdagangan dan jasa-jasa lainnya (BPS Kabupaten Pangkep, 2007b). Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa jumlah penduduk yang memperoleh manfaat secara langsung dari sektor industri pengolahan melalui pendapatan dari pekerjaan-pekerjaan di sektor tersebut juga sangat terbatas. Di pihak lain, sektor pertanian masih merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar yaitu mencapai 49,54 persen pada tahun 2005 (BPS Kabupaten Pangkep, 2007b). Dengan mempertimbangkan jumlah penduduk yang memperoleh manfaat ekonomi yang cukup besar, maka sektor pertanian dapat dikatakan sebagai sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap kesejahteraan penduduk Kabupaten Pangkep.

**Tabel 4.4. Pertumbuhan Sektor Pertanian Kabupaten Pangkep Menurut Sub-sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2001-2006 (%)**

Sub-sektor	2001	2002	2003	2004	2005	2006*)
Tanaman Bahan Makanan	4,15	1,06	2,81	0,99	1,77	6,68
Tanaman Perkebunan	2,40	0,06	1,27	0,05	2,65	6,38
Peternakan	2,93	7,19	0,43	1,48	3,19	1,97
Kehutanan	4,82	2,70	1,46	8,77	8,53	3,72
Perikanan	8,39	10,41	0,74	4,71	3,14	5,98
Sektor Pertanian	6,31	6,81	1,30	2,86	2,77	5,98

\*) Angka sementara

Sumber: BPS Kabupaten Pangkep, 2007a

Pada tahun 2006, pertumbuhan sektor pertanian memperlihatkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 2,77 persen di tahun 2005 menjadi 5,98 persen di tahun 2006. Dilihat menurut sub-sektornya, tanaman bahan

makanan, tanaman perkebunan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Pangkep. Pertumbuhan ketiga sub-sektor tersebut berturut-turut adalah 6,68 persen, 6,38 persen, dan 5,98 persen.

Walaupun tidak mengalami pertumbuhan tertinggi setiap tahun, sejak tahun 2000 sampai dengan 2006 sub-sektor perikanan terus berada di peringkat pertama dalam besarnya jumlah kontribusi yang diberikan terhadap PDRB sektor pertanian. Pada akhir tahun 2006 sumbangan sub-sektor perikanan mencapai 11,35 persen. Dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pertanian, maka perikanan dapat dikatakan sebagai salah satu sub-sektor yang diandalkan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Pangkep karena selain memberikan kontribusi yang besar terhadap sektor pertanian juga memberikan manfaat langsung terhadap kesejahteraan penduduk Kabupaten Pangkep pada umumnya.

**Tabel 4.5. Distribusi PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Pangkep Menurut Sub-sektor atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2001-2006 (%)**

<i>Sub-sektor</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005*)</i>	<i>2006*)</i>
Tanaman Bahan Makanan	5.39	5.11	4.93	4.94	4.61	4.44	4.47
Tanaman Perkebunan	1.77	1.68	1.66	1.66	1.55	1.48	1.50
Peternakan	1.01	0.95	0.95	0.93	0.91	0.90	0.85
Kehutanan	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Perikanan	11.33	11.03	11.31	11.22	11.46	11.33	11.35
Sektor Pertanian	19.53	18.80	19.01	18.78	18.55	18.18	18.19

\*) Angka sementara

Sumber: BPS Kabupaten Pangkep, 2007a

### 4.1.3. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah/wilayah. Sejak kurun waktu 2001 sampai dengan 2006, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkep terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 2004 sampai dengan 2006, terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk Kabupaten Pangkep dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun

2004, PDRB per kapita Kabupaten Pangkep mencapai Rp. 6.490.823,- yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2006, sehingga mencapai Rp.6.800.365,-. Dibandingkan dengan rata-rata PDRB per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan, jelas terlihat bahwa PDRB per kapita Kabupaten Pangkep lebih tinggi daripada PDRB per kapita tingkat provinsi. Namun, PDRB per kapita kabupaten ini masih lebih rendah dibandingkan dengan PDRB per kapita Kota Makasar. Sebaliknya, dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya, seperti Kota Pare-pare, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Maros, PDRB per kapita Kabupaten Pangkep jauh lebih tinggi (BPS Kabupaten Pangkep, 2007a). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Pangkep relatif lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk kabupaten/kota tetangganya dan bahkan juga kesejahteraan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan secara umum.

**Tabel. 4.6. Rata-Rata PDRB per Kapita Penduduk Kabupaten Pangkep dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2006 (Rupiah)**

Tahun	Kabupaten Pangkep		Provinsi Sulawesi Selatan	
	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
2001	6.118.363	5.927.858	4.362.110	4.056.498
2002	6.602.203	6.079.039	4.730.028	4.132.855
2003	7.198.371	6.155.791	5.150.214	4.257.334
2004	7.916.742	6.490.823	5.746.545	4.414.727
2005	8.031.746	6.266.589	6.943.005	4.859.319
2006 *)	9.455.459	6.800.365	7.982.347	5.094.273

\*) Angka sementara

Sumber: BPS Kabupaten Pangkep, 2007a

#### **4.2. PENDAPATAN RUMAH TANGGA TERPILIH DAN PERUBAHANNYA (T0 DAN T1)**

Pendapatan dalam penelitian ini dihitung dari pendapatan rumah tangga yang terpilih sebagai sampel. Pendapatan rumah tangga mengacu pada jumlah seluruh pendapatan rumah tangga yang berasal

dari semua anggotanya yang bekerja. Dengan demikian, pendapatan rumah tangga tidak hanya berasal dari kepala rumah tangga (KRT) akan tetapi juga dari anggota rumah tangga lainnya yang bekerja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika KRT tidak bekerja berarti rumah tangga tidak mempunyai sumber pendapatan atau pendapatan rumah tangga berasal dari anggota rumah tangganya, seperti anak yang bekerja. Analisis perubahan pendapatan rumah tangga terpilih berguna untuk melihat apakah terjadi peningkatan atau penurunan pendapatan rumah tangga secara umum, antara tahun 2006 dan 2008.

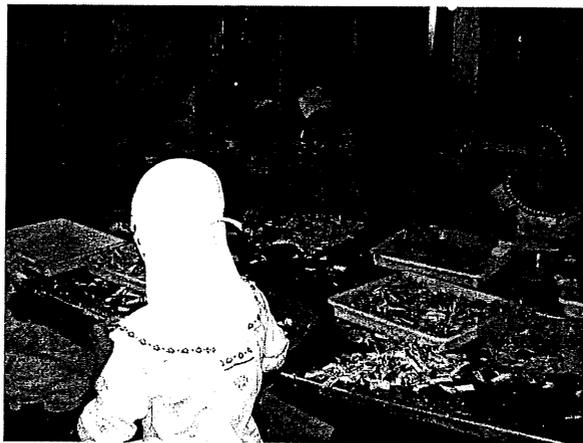
#### **4.2.1. Desa Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Tupabiring**

Seperti wilayah kepulauan pada umumnya, mata pencaharian mayoritas penduduk Desa Mattiro Bombang bersumber dari kegiatan kenelayanan. Mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan penangkap kepiting baik dilakukan sendiri ataupun bersama dengan orang lain. Selain nelayan penangkap kepiting, ada pula nelayan penangkap ikan tenggiri dan ikan gamasi. Jenis tangkapan nelayan dari tahun 2006 dan 2008 cenderung tidak memperlihatkan perbedaan yang berarti. Kepiting masih merupakan hasil tangkapan dominan sepanjang tahun (wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan nelayan). Akhir-akhir ini peranan pendapatan dari kegiatan kenelayanan ini semakin berkurang. Pada tahun 2006, kegiatan kenelayanan masih menjadi sumber mata pencaharian bagi 94 persen rumah tangga, tetapi pada tahun 2008 turun menjadi hanya 81 persen dari rumah tangga sampel.

Selain kegiatan kenelayanan, sumber pendapatan rumah tangga lainnya adalah sektor perdagangan, jasa, dan industri pengolahan sumber daya laut (pengupasan kepiting). Sektor perdagangan berupa perdagangan bahan kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan kegiatan kenelayanan. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2006, saat ini berdasarkan observasi di lapangan terlihat peningkatan jumlah warung-warung besar yang menjual beragam kebutuhan rumah tangga dan peralatan untuk kegiatan kenelayanan. Pada tahun 2006 hanya terdapat dua warung

besar/toko, akan tetapi pada tahun 2008 jumlah warung besar/toko mengalami peningkatan dua kali lipat. Di sisi lain, industri pengolahan kepiting atau lebih dikenal dengan sebutan mini plan di Desa Mattiro Bombang bertambah sebanyak dua buah, bahkan pada akhir Juni 2008 akan bertambah satu lagi mini plan di Pulau Salemo (wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat). Peranan sektor jasa juga meningkat. Pada tahun 2006 hanya tiga persen rumah tangga yang mempunyai sumber mata pencaharian di sektor jasa, akan tetapi saat ini meningkat menjadi lebih dari dua kali lipat (7,1 persen). Peningkatan ini khususnya terjadi pada sektor jasa transportasi laut. Perubahan tersebut jelas menggambarkan adanya peningkatan perekonomian masyarakat Desa Mattiro Bombang yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk

**Gambar 4.1. Mini Plan di Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang**



Penelitian ini mendapatkan lebih dari 50 persen rumah tangga terpilih pada tahun 2008 memiliki pendapatan per bulan sebesar Rp. 734.167,- atau lebih rendah, dengan rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan sebesar Rp. 958.260,-. Tingginya rata-rata pendapatan rumah tangga tersebut dikarenakan variasi pendapatan yang cukup besar, berkisar dari nol rupiah per bulan sampai dengan sembilan juta rupiah per bulan. Rumah tangga yang tidak memiliki

pendapatan (nol rupiah) adalah rumah tangga (khususnya pasangan muda) yang masih dibiayai oleh orang tua dari kedua belah pihak (suami/istri), karena keduanya belum bekerja. Variasi tersebut juga memperlihatkan adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan yang cukup besar antara rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin.

Dibandingkan dengan tahun 2006, pada tahun 2008 jelas terlihat terjadinya peningkatan pendapatan rumah tangga di Desa Mattiro Bombang (Tabel 4.7). Akan tetapi perlu dicermati bahwa peningkatan pendapatan rumah tangga tersebut tidak secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan pendapatan terjadi karena kenaikan harga jual ikan, namun jika diperhitungkan dengan biaya produksi, terutama karena kenaikan harga BBM, maka peningkatan pendapatan hanya untuk menutupi biaya produksi. Namun, secara umum fenomena tersebut dapat menggambarkan terjadinya peningkatan kesejahteraan penduduk Desa Mattiro Bombang.

**Tabel 4.7. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008**

<i>Pendapatan per Bulan</i>	2006	2008
Rata-rata	Rp. 547.250,-	Rp. 958.751
Median	Rp. 402.083,-	Rp. 734.167
Minimum	Rp. 30.167,-	0*
Maksimum	Rp. 3.333.333,-	Rp. 9.650.000
Per kapita	Rp. 116.963,-	Rp. 195.359

Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006.  
 - Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008.

Hasil survei juga memperlihatkan terjadinya perubahan distribusi pendapatan rumah tangga. Pada tahun 2006, sekitar 61 persen rumah tangga berpendapatan kurang dari Rp. 500.000,- per bulan, sedangkan pada tahun 2008 proporsi ini menurun menjadi hanya 34,4 persen. Pada tahun 2008, sebanyak 14,3 persen rumah

tangga berpendapatan di bawah Rp. 200.000,- per bulan, dan 32 persen rumah tangga berpendapatan antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- per bulan. Rumah tangga dengan penghasilan antara Rp. 1 juta sampai dengan Rp. 1,49 juta per bulan mencapai 18 persen (lihat Tabel 4.8). Secara umum data pada Tabel 4.8 menunjukkan terjadinya pergeseran pendapatan rumah tangga sampel di Desa Mattiro Bombang, ke arah yang lebih tinggi dan juga semakin kecilnya perbedaan proporsi rumah tangga dengan pendapatan terendah dan tertinggi. Keadaan ini mengindikasikan terjadinya pemerataan yang lebih baik pada tingkat kesejahteraan penduduk pada tahun 2008, dibandingkan dengan tahun 2006.

**Tabel 4.8. Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Besar Pendapatan, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008**

Besar pendapatan	2006	2008
	<i>n = 100</i>	<i>n=122</i>
< Rp. 500.000,-	61,0	34.4
Rp. 500.000,- - Rp. 999.000,-	28,0	32.0
Rp. 1.000.000,- – Rp. 1.499.000,-	7,0	18.0
Rp. 1.500.000,- – Rp. 1.999.000,-	2,0	9.8
Rp. 2.000.000,- – Rp. 2.499.000,-	1,0	0.8
Rp. 2.500.000,- – Rp. 2.999.000,-	0	1.6
Rp. 3.000.000,- +	1,0	3.3
Jumlah	100,0	100.0

Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006  
 - Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008.

Peningkatan pendapatan rumah tangga sampel ini, antara lain terjadi karena semakin beragamnya lapangan pekerjaan penduduk di Desa Mattiro Bombang, meskipun ketergantungan penduduk pada kegiatan kenelayan juga masih besar. Pada 2006 dua sektor utama lapangan pekerjaan KRT yaitu perikanan laut dan jasa. Sementara pada tahun 2008 terjadi penambahan sektor pekerjaan yang memberikan pendapatan rumah tangga, dengan masuknya sektor

perdagangan, jasa kemasyarakatan, industri pengolahan, dan transportasi. Rumah tangga yang dulu hanya memanfaatkan sumber pendapatan dari sektor perikanan, mulai merambah ke sektor lainnya, terlihat dari sektor jasa dan perdagangan yang semakin banyak ditekuni oleh kepala rumah tangga terpilih.

**Tabel 4.9. Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga dan Besar Pendapatan, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008**

Pekerjaan Utama KRT	Rata-rata		Minimum		Maximum	
	2006	2008	2006	2008	2006	2008
Perikanan tangkap	555.504	984.414	30.167	21.667	3.333.333	9.650.000
Perdagangan	-	1.804.400	-	212.000	-	5.210.000
Jasa Kemasyarakatan	344.000	491.666	280.000	275.000	472.000	700.000
Industri	-	560.000	-	560.000	-	560.000
Transportasi		693.333		100.000		1.500.000
KRT tidak bekerja	491.889	529.208	184.000	-	758.333	1.100.000

Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006  
 - Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008.

Pada tahun 2008 pendapatan rumah tangga rata-rata tertinggi ditemukan pada rumah tangga yang kepalanya (KRT) bekerja di sektor perdagangan, diikuti dengan sektor perikanan tangkap. Pendapatan rumah tangga terkecil (Rp. 21.667,-) dan yang terbesar (Rp. 9.650.000,-) juga ditemukan pada rumah tangga dengan KRT yang bekerja di sektor perikanan tangkap. Selanjutnya, perbedaan pendapatan rumah tangga yang mencolok terdapat pada rumah tangga dengan KRT yang bekerja di sektor perikanan tangkap. Perbedaan pendapatan rumah tangga di sektor perikanan tangkap sangat berkaitan dengan perbedaan kepemilikan sarana produksi kegiatan kenelayanan, yaitu perahu bermotor (*joloro/ketiting*) dan perahu tanpa mesin (*lepa-lepa*). Selain karena perbedaan penggunaan armada tangkap perbedaan pendapatan juga sangat dipengaruhi oleh perbedaan jenis alat tangkap, yaitu jaring dengan bubu. Kedua hal

tersebut tentunya akan mempengaruhi hasil produksi tangkapan nelayan.

Secara umum, rata-rata pendapatan rumah tangga dari sektor perikanan tangkap meningkat dari Rp. 555.504,- pada tahun 2006 menjadi Rp. 984.414,- di tahun 2008. Hal tersebut juga tercermin dari pendapatan tertinggi yang ditemukan pada rumah tangga dengan sumber mata pencaharian dari sektor perikanan tangkap. Keadaan sebaliknya, terjadi penurunan pendapatan rumah tangga terendah dari Rp. 30.167,- per bulan di tahun 2006 menjadi Rp. 21.667,- per bulan di tahun 2008. Kemungkinan besar penurunan tersebut sebagai akibat dari penurunan produksi (hasil tangkap) perikanan di perairan sekitar wilayah desa karena armada dan alat tangkap yang tidak mengalami perubahan. Penurunan produksi perikanan dirasakan oleh banyak penduduk Desa Mattiro Bombang yang memerlukan waktu lebih lama dan jarak yang semakin jauh ketika melaut mencari ikan (wawancara mendalam dengan nelayan).

Peningkatan pendapatan yang signifikan ditemukan pada rumah tangga dengan sumber pendapatan dari sektor jasa kemasyarakatan, yaitu dari Rp. 344.000,- pada tahun 2006 menjadi Rp. 491.666,- pada tahun 2008. Sektor jasa kemasyarakatan di sini adalah pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi perkantoran atau guru. Selain kedua sektor tersebut, pada tahun 2008 juga ditemukan rumah tangga dengan mata pencaharian utama di sektor-sektor lain yang tidak ditemukan pada tahun 2006, antara lain dari sektor transportasi. Berkembangnya sektor transportasi ini sangat berkaitan dengan meningkatnya mobilitas penduduk antarpulau di Desa Mattiro Bombang dengan daratan Kabupaten pangkep, yang memerlukan jasa transportasi. Seiring dengan bertambah beragamnya mata pencaharian KRT di Desa Mattiro Bombang, pendapatan rumah tangga mengalami peningkatan, di samping juga mengurangi ketergantungan pada kegiatan kenelayanan. Peningkatan pendapatan ini juga akan berpengaruh terhadap perekonomian di desa, yang dapat diperkirakan dari berkembangnya sektor perdagangan. Pada tahun 2006, sektor perdagangan hanya menjadi sumber mata pencaharian tambahan bagi KRT, tetapi pada tahun 2008 sudah menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama rumah tangga di Desa Mattiro Bombang.

## Gambar 4.2. Pengerinan Rumput Laut di Desa Mattiro Bombang



### Rumah Tangga Kegiatan Kenelayanan

Di antara seluruh rumah tangga sampel, sebanyak 71,1 persen mempunyai sumber pendapatan utama dari kegiatan kenelayanan. Pendapatan nelayan sangat dipengaruhi oleh musim atau gelombang laut dan jenis komoditas tangkapannya. Jenis komoditas tangkapan nelayan di Desa Mattiro Bombang tidak memperlihatkan perubahan dari tahun 2006 sampai dengan 2008. Pada musim gelombang kuat (musim barat) yang berlangsung dari Bulan Desember sampai dengan Maret atau April, pada umumnya nelayan menangkap kepiting, yang ditangkap di sekitar perairan desa. Pada musim tersebut penduduk tidak mungkin pergi melaut lebih jauh, tetapi perubahan terjadi pada alat tangkap yang digunakannya. Dulu nelayan menggunakan jaring namun sekarang menggunakan bubu kepiting (rakang). Dibandingkan dengan musim lainnya, musim barat merupakan puncak produksi kepiting di Desa Mattiro Bombang. Kuatnya gelombang menyebabkan kepiting keluar dari sarang/rumahnya (naik ke permukaan), sehingga meskipun nelayan tidak jauh melaut pada musim ini hasil kepiting sangat menjanjikan. Selain dari itu, nelayan

yang tidak mempunyai jolore pada musim ini tidak dapat melaut dan penghasilannya pun menjadi tidak ada (nol). Musim gelombang kuat juga merupakan musim ketika pendapatan rumah tangga mencapai titik terendah dibandingkan dengan musim lainnya (lihat Tabel 4.10).

Pada musim timur atau dikenal dengan musim gelombang tenang, nelayan melaut pada jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan musim lainnya. Pada musim ini jenis tangkapan juga semakin bervariasi, tidak hanya kepiting, namun juga ikan tenggiri dan hiu yang memiliki nilai ekonomis jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepiting. Pada umumnya kondisi laut tenang terjadi antara Bulan Juni sampai dengan Bulan September sehingga nelayan dapat melaut sampai di perairan Makasar (laut dalam) dengan lama melaut 3 sampai 7 hari sebelum kembali ke desa asal. Meskipun nelayan yang menangkap ikan tenggiri dan hiu jumlahnya terbatas, namun dengan tetap menangkap kepiting yang dapat dilakukan dua kali dalam sehari, secara umum pendapatan pada musim ini menjadi sedikit lebih besar dibandingkan dengan musim barat. Selain itu, untuk dapat meningkatkan pendapatan dari sektor perikanan, sebagian nelayan juga melaut menangkap ikan gamasi, meskipun nilai ekonominya rendah. Kegiatan lainnya yang dapat memberikan pendapatan tambahan, yang juga dilakukan pada musim timur adalah memancing ikan kerapu yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Selain itu, nelayan juga memanfaatkan waktu dengan mencari dan mengeringkan rumput laut. Dengan demikian pendapatan rumah tangga pada musim timur dapat dimaksimumkan oleh nelayan yang memiliki alat tangkap dan perahu bermotor, tetapi tidak demikian bagi nelayan lepa-lepa (lihat Tabel 4.10).

**Tabel 4.10. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (Rupiah)**

Pendapatan	Musim					
	Gelombang Lemah		Pancaroba		Gelombang Kuat	
	2006	2008	2006	2008	2006	2008
Rata-rata	539.104	885.396	343.219	854.186	486.958	1.023.069
Median	335.000	750.000	250.000	687.500	400.000	600.000
Minimum	7.000	0	30.000	0	0	0
Maksimum	3.000.000	5.850.000	2.000.000	4.000.000	2.550.000	8.600.000

Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006  
 - Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008

Masa sulit bagi nelayan di Desa Mattiro Bombang adalah masa pancaroba yang berlangsung antara Bulan April sampai dengan Mei dan Bulan Oktober sampai dengan November. Pada masa ini pendapatan rumah tangga yang bersumber dari perikanan tangkap mengalami penurunan dibandingkan dengan musim timur dan barat. Penurunan pendapatan rumah tangga perikanan sangat terkait dengan penurunan hasil tangkapan kepiting dan nilai jual ikan gamasi yang sangat rendah akibat jumlah tangkapan ikan gamasi<sup>6</sup> yang meningkat. Kedua keadaan tersebut jelas tidak menguntungkan bagi nelayan. Di sisi lain, kondisi cuaca yang tidak menentu semakin mempersulit nelayan untuk melaut yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan rumah tangga.

Dilihat dari kondisi musim dan cuaca, tidak ada perubahan pola pendapatan antara tahun 2006 dan 2008. Pendapatan rumah tangga perikanan tertinggi pada musim gelombang lemah yang diikuti pada gelombang kuat. Pendapatan rumah tangga paling rendah adalah pada musim pancaroba. Tidak adanya perbedaan tersebut juga mencerminkan tidak adanya perubahan jenis tangkapan nelayan. Hal yang mencolok terjadi adalah peningkatan pendapatan rumah tangga di setiap musim. Peningkatan harga bahan pokok di tingkat desa yang merupakan dampak dari peningkatan harga bahan bakar minyak

<sup>6</sup> Harga jual ikan gamasi di tingkat desa pada musim pancaroba adalah Rp. 70,-/ekor sedangkan pada musim timur harga jual ikan mencapai Rp. 150,-/ekor.

(BBM) di tingkat nasional menyebabkan peningkatan harga jual komoditas tangkapan, tidak hanya di tingkat nelayan bahkan juga di tingkat pasar. Sebagai contoh, harga jual kepiting meningkat dari Rp. 20.000,- per kg pada tahun 2006 menjadi Rp. 26.000,- per kg di tahun 2008. Selain itu, bertambahnya perusahaan *mini plan* di Desa Mattiro Bombang menyebabkan harga jual kepiting juga menjadi kompetitif karena tidak ada monopoli.

**Tabel 4.11. Distribusi Rumah Tangga Menurut Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan dan Musim, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008(%)**

Besar Pendapatan	Musim					
	Gelombang Lemah		Pancaroba		Gelombang Kuat	
	2006	2008	2006	2008	2006	2008
< Rp. 500.000,-	61,4	31.0	85,4	34.8	67,7	38.6
Rp. 500.000,- - Rp. 999.000,-	20,8	35.4	8,3	32.9	20,8	24.1
Rp. 1.000.000,- - Rp. 1.499.000,-	9,4	20.3	4,2	17.7	7,3	13.9
Rp. 1.500.000,- - Rp. 1.999.000,-	5,2	3.2	1,0	5.1	2,1	10.8
Rp. 2.000.000,- - Rp. 2.499.000,-	1,0	5.1	1,0	4.4	1,0	6.3
Rp. 2.500.000,- - Rp. 2.999.000,-	1,0	3.0	-	1.9	1,0	1.3
Rp. 3.000.000,- - Rp. 3.499.000,-	1,0	1.3	-	2.5	-	-
Rp. 3.500.000,- - Rp. 3.999.000,-	-	0.6	-	-	-	2.5
Rp. 4.000.000,- +	-	-	-	0.6	-	1.0
Jumlah	100,0		100,0		100,0	

Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006  
 - Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008.

Dilihat dari distribusi pendapatan rumah tangga perikanan, terjadi penurunan persentase rumah tangga yang berpendapatan kurang dari Rp. 500.000,- per bulan, meskipun persentase terbesar masih pada kelompok pendapatan rumah tangga tersebut. Sepanjang tahun dan sepanjang musim, terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga dari perikanan tangkap, baik pada musim gelombang lemah, gelombang kuat dan musim pancaroba. Peningkatan pendapatan rumah tangga perikanan yang paling mencolok terjadi pada musim gelombang kuat, dengan rata-rata pendapatan rumah tangga

meningkat setengah sampai satu kali lipat dari pendapatan rumah tangga perikanan per bulan pada tahun 2006 (lihat Tabel 4.10 dan 4.11). Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga perikanan adalah penggunaan alat tangkap bubu untuk menangkap kepiting yang dianggap lebih tahan lama dan tidak mudah rusak atau hilang sebagai pengganti jaring.

### *Rumah Tangga Anggota Pokmas COREMAP*

Meskipun COREMAP telah diperkenalkan kepada masyarakat Desa Mattiro Bombang sejak tahun 2005, akan tetapi pelaksanaan COREMAP sampai di tingkat desa baru dirasakan oleh penduduk pada tahun 2008, melalui beberapa kegiatan seperti pengadaan *info center*, pembelian kapal untuk patroli, pembuatan rumpon dan pelatihan singkat dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pangkep. Karena kegiatan COREMAP masih terbatas dan baru dilaksanakan selama beberapa bulan sebelum penelitian, maka sulit untuk mengatakan bahwa kegiatan COREMAP telah berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga anggota pokmas, dalam arti meningkatkan pendapatannya.

**Tabel 4.12. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Anggota dan Bukan Anggota Pokmas/COREMAP, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkep, 2008 (Rupiah)**

<i>Pendapatan</i>	<i>Anggota Pokmas/COREMAP</i>	<i>Bukan Anggota Pokmas/COREMAP</i>
Rata-rata	1,170,606	879,524
Median	950,000	616,667
Minimum	212,000	0
Maksimum	4,603,333	9,650,000
per kapita	256,288	172,655
N	33	89

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008.

Rata-rata pendapatan rumah tangga yang salah satu anggota rumah tangganya sebagai anggota pokmas atau terlibat dalam

kegiatan COREMAP sebesar Rp. 1.170.606,- per bulan. Pendapatan tersebut relatif lebih besar dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga lainnya (Rp. 879.524,- per bulan). Tingginya pendapatan rumah tangga anggota pokmas juga terlihat dari nilai tengah dan pendapatan terendah (Rp. 212.000,-) yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan terendah rumah tangga yang anggotanya tidak terlibat dalam kegiatan pokmas COREMAP, yaitu nol rupiah. Perbedaan pendapatan juga dapat dilihat dari pendapatan per kapita per bulan. Rumah tangga yang salah satu anggotanya merupakan anggota pokmas mempunyai pendapatan per kapita sebanyak 50 persen lebih besar daripada pendapatan per kapita per bulan rumah tangga bukan anggota pokmas (lihat Tabel 4.12). Dengan mempertimbangkan keberadaan COREMAP di Desa Mattiro Bombang dan lebih tingginya pendapatan rumah tangga anggota pokmas, dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga anggota pokmas relatif lebih baik, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa hal itu merupakan dampak positif dari kegiatan COREMAP. Hal ini karena mereka belum mendapatkan manfaat langsung dari pinjaman modal yang diberikan COREMAP. Pinjaman dana tersebut, disebut dana *seed fund*, baru cair di tingkat desa pada Bulan Juni 2008.

Dilihat dari jenis pekerjaannya, mayoritas KRT dalam rumah tangga anggota pokmas/COREMAP mempunyai kegiatan sebagai nelayan (68,8 persen), tenaga penjualan (12,5 persen) tenaga profesional/administrasi (6,3 persen), dan tenaga jasa (12,5 persen). Seperti kondisi umumnya, sektor perikanan tangkap (68,8 persen) masih menjadi sektor utama sumber pendapatan rumah tangga anggota pokmas/COREMAP di Desa Mattiro Bombang. Mata pencarian KRT yang terlibat dalam kegiatan pokmas/COREMAP, juga bervariasi. Rumah tangga anggota pokmas/COREMAP yang mempunyai pendapatan rata-rata tertinggi per bulan adalah yang dikepalai oleh KRT yang bekerja di sektor perikanan tangkap (Rp. 1.327.636,-), yang kemudian diikuti oleh transportasi dengan pendapatan rata-rata per bulan sebesar Rp. 962.500,-. Keadaan yang sama juga terlihat dari rata-rata pendapatan per kapita per bulan (lihat Tabel 4.13).

**Tabel 4.13. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Anggota Pokmas/COREMAP Menurut Lapangan Pekerjaan KRT, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkep 2008 (Rupiah)**

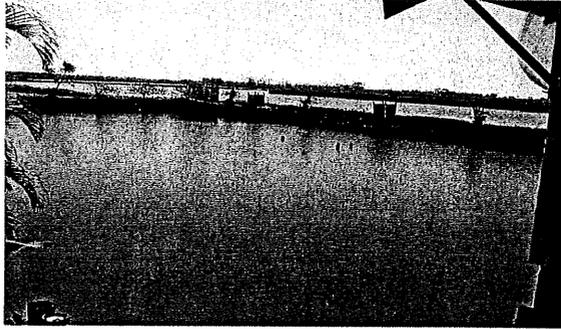
Lapangan Pekerjaan KRT	Rata-rata Pendapatan RT/bulan	Rata-rata Pendapatan perkapita/bulan
Perikanan tangkap	1,327,636	285,302
Perdagangan	953,000	174,714
Jasa kemasyarakatan	600,000	152,381
Transprotasi	962,500	274,306
KRT tidak bekerja	560,000	80,000

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008.

#### **4.2.2. Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang**

Sumber mata pencaharian penduduk di Kelurahan Pundata Baji lebih bervariasi dibandingkan dengan di Desa Mattiro Bombang. Secara umum, dari tahun 2006 sampai dengan 2008 tidak terjadi perubahan sumber mata pencaharian penduduk di Kelurahan Pundata Baji. Selain perikanan tangkap, penduduk Kelurahan Pundata Baji cukup banyak yang bekerja di sektor perikanan budidaya, khususnya ikan bandeng dan udang. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2006, terjadi peningkatan proporsi rumah tangga yang memiliki sumber mata pencaharian utama di sektor perikanan tangkap, yaitu dari 14 pesen pada tahun 2006 menjadi 27 pesen pada tahun 2008. Sebaliknya, proporsi rumah tangga yang memiliki sumber mata pencaharian utama di sektor perikanan budidaya sedikit menurun, khususnya pada budidaya udang. Kegiatan ekonomi lainnya yang dilakukan penduduk di Kelurahan Pundata Baji adalah pertanian tanaman pangan, industri pengolahan, perdagangan, jasa kemasyarakatan, dan transportasi. Satu kegiatan ekonomi yang hanya ada di kelurahan ini (dan tidak terdapat di Desa Mattiro Bombang) adalah peternakan ayam. Selain dari itu, pada tahun 2008 juga tidak ditemukan lagi rumah tangga yang mempunyai sumber mata pencarian utama di sektor bangunan, dimana pada tahun 2006 keadaan ini masih ditemukan.

**Gambar 4.3. Kegiatan budidaya ikan (tambak) di Kelurahan Pundata Baji**



Berdasarkan informasi dari masyarakat di Kelurahan Pundata Baji, selama setahun terakhir kegiatan perikanan tangkap di wilayah Kelurahan Pundata Baji mulai memperlihatkan peningkatan. Hal tersebut dapat terlihat dari semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bermatapencaharian sebagai nelayan seperti yang diuraikan pada bagian sebelumnya. Diperkenalkannya alat tangkap baru di kalangan nelayan menarik kembali nelayan untuk melaut. Dua tahun yang lalu nelayan hanya menggunakan jaring untuk menangkap kepiting, akan tetapi alat tangkap baru (*bubu/rakang*) yang diperkenalkan memberikan hasil yang relatif lebih baik dibandingkan dengan hanya menggunakan jaring. Pembaruan alat tersebut juga terkait dengan dukungan bantuan permodalan dari pedagang pengumpul kepada sawi-sawinya dalam pengadaan *bubu*. Bantuan keuangan tersebut tidak terlepas pula dari kegiatan COREMAP (wawancara mendalam dengan pedagang pengumpul dan pengurus COREMAP).

Selain kegiatan perikanan, penduduk yang bekerja sebagai pedagang cukup banyak ditemukan di Kelurahan Pundata Baji. Meskipun secara umum terjadi penurunan persentase penduduk yang bekerja di sektor tersebut, namun masih menjadi salah satu sumber pendapatan rumah tangga. Penurunan proporsi pedagang pengumpul di Kelurahan Pundata Baji sangat terkait dengan hasil tangkapan nelayan yang hanya terkonsentrasi pada satu jenis sumber daya laut, yaitu kepiting. Pada tahun 2006, nelayan menangkap jenis ikan yang

lebih bervariasi yaitu ikan bete-bete, lurek, dan gamasi. Tahun 2008, nelayan lebih cenderung menangkap kepiting karena memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis hasil laut lainnya.

Tidak berbeda dengan wilayah pesisir lainnya, Kelurahan Pundata Baji memiliki variasi kesempatan kerja yang sangat beragam. Keadaan ini juga berdampak pada bervariasinya sumber pendapatan rumah tangga. Hanya sebagian kecil rumah tangga yang cuma memiliki satu macam/jenis sumber pendapatan rumah tangga. Pada umumnya pendapatan rumah tangga di Kelurahan Pundata Baji berasal dari dua jenis pekerjaan, misalnya dari jasa kemasyarakatan dan budidaya perikanan. Dengan demikian, musim atau gelombang laut tidak serta merta mempengaruhi pendapatan rumah tangga. Hanya rumah tangga yang sepenuhnya bergantung pada perikanan tangkap yang mengalami fluktuasi pendapatan berdasarkan musim, seperti penduduk di Desa Mattiro Bombang.

Secara umum, pendapatan rumah tangga di Kelurahan Pundata Baji masih lebih besar dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga di Desa Mattiro Bombang. Hal tersebut, terlihat dari nilai tengah pendapatan rumah tangga di Kelurahan Pundata Baji yaitu Rp. 833.333,- per bulan, lebih besar dibandingkan dengan nilai tengah pendapatan rumah tangga di Desa Mattiro Bombang yang berjumlah Rp. 734.167,- per bulan. Tingginya pendapatan rumah tangga di Kelurahan Pundata Baji terkait dengan beragamnya kesempatan kerja di wilayah tersebut, sehingga pendapatan rumah tangga tidak hanya bersumber dari satu pekerjaan. Selain itu, karena mata pencaharian penduduk tidak hanya tergantung pada hasil laut maka pendapatan rumah tangga tidak dipengaruhi oleh keadaan musim dan gelombang laut.

Dibandingkan dengan tahun 2006, rata-rata pendapatan rumah tangga di Kelurahan Pundata Baji pada tahun 2008 sedikit lebih baik, dengan laju pertumbuhan per tahun adalah 1.35 persen..Meskipun demikian, terjadi penurunan pada nilai tengah pendapatan rumah tangga dari Rp. 975.000,- per bulan pada tahun 2006 menjadi Rp. 833.333,- per bulan pada tahun 2008. Penurunan

tersebut juga terlihat dari pendapatan rumah tangga minimum yang juga semakin menurun. (lihat Tabel 4.14). Peningkatan yang signifikan juga terlihat dari pendapatan per kapita per bulan. Perubahan pendapatan rumah tangga yang relatif rendah di Kelurahan Pundata Baji terkait dengan tidak adanya perubahan jenis pekerjaan dan juga tidak hanya tergantung pada sumber daya laut.

**Tabel 4.14. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008**

Pendapatan per Bulan	2006	2008
Rata-rata	Rp. 1.137.574,-	Rp. 1.168.727,-
Median	Rp. 975.000,-	Rp. 833.333,-
Minimum	Rp. 60.000,-	Rp. 41.667,-
Maksimum	Rp. 4.796.667,-	Rp. 8.070.000,-
Per kapita	Rp. 222.319,-	Rp. 236.602,-

Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006.  
 - Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008.

Tabel 4.15 berikut ini menyajikan distribusi pendapatan rumah tangga terpilih di Kelurahan Pundata Baji. Dari data tersebut terlihat bahwa 25,8 persen rumah tangga mempunyai pendapatan kurang dari Rp. 500.000,- setiap bulan. Secara umum, terjadi pergeseran distribusi menuju arah pendapatan rumah tangga yang lebih rendah, antara lain dapat dilihat dari meningkatnya proporsi rumah tangga dengan pendapatan kurang dari Rp. 500.000,-, yaitu dari 25 persen pada tahun 2006 menjadi 25,8 persen pada tahun 2008. Keadaan ini juga terjadi pada kelompok pendapatan antara Rp. 500.000,- - Rp. 999.000,-, yang meningkat dari 26 persen pada tahun 2006 menjadi 31,7 persen pada tahun 2008. Selanjutnya, pada kelompok pendapatan tinggi, di atas Rp. 1.000.000,-, terjadi penurunan proporsi, kecuali untuk kelompok pendapatan Rp. 2.000.000,- - Rp. 2.499.000,- yang meningkat dari empat persen pada tahun 2006 menjadi 5,8 persen pada tahun 2008. Keadaan ini cenderung menunjukkan perubahan distribusi pendapatan ke arah pendapatan yang lebih rendah, antara tahun 2006 dan 2008.

**Tabel 4.15. Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Besar Pendapatan, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (%)**

Besar Pendapatan	2006 <i>n=100</i>	2008 <i>n= 120</i>
< Rp. 500.000,-	25,0	25,8
Rp. 500.000,- - Rp. 999.000,-	26,0	31,7
Rp. 1.000.000,- – Rp. 1.499.000,-	21,0	20,0
Rp. 1.500.000,- – Rp 1.999.000,-	14,0	9,2
Rp. 2.000.000,- – Rp. 2.499.000,-	4,0	5,8
Rp. 2.500.000,- – Rp. 2.999.000,-	4,0	1,7
Rp. 3.000.000,- +	6,0	5,8
<b>Jumlah</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006.  
 - Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008.

Beragamnya jenis pekerjaan yang terdapat di Kelurahan Pundata Baji tercermin dari lapangan pekerjaan KRT terpilih. Sumber pendapatan rumah tangga terpilih di Kelurahan Pundata Baji berasal dari enam sektor pekerjaan (lihat Tabel 4.16). Sektor perikanan budidaya masih menjadi sumber pendapatan utama yang terpenting, yang kemudian diikuti oleh perikanan laut dan sektor jasa kemasyarakatan. Pada tahun 2008, rumah tangga dengan pendapatan rata-rata yang tergolong tinggi adalah yang mempunyai KRT yang bekerja di sektor jasa kemasyarakatan dan perdagangan. Meskipun rata-rata pendapatan rumah tangga untuk KRT yang bekerja di sektor industri pengolahan juga termasuk yang paling tinggi, akan tetapi KRT yang bekerja di sektor tersebut sangat sedikit, sehingga tidak dapat menggambarkan kondisi umum di Kelurahan Pundata Baji.

**Tabel 4.16. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (Rupiah)**

Lapangan Pekerjaan Utama KRT	Rata-rata		Minimum		Maximum	
	2006	2008	2006	2008	2006	2008
Perikanan tangkap	974.226	929.292	191.667	212.500	2.116.667	2.138.333
Perikanan budidaya	1.216.513	1.090.530	155.833	41.667	4.796.667	7.100.000
Pertanian tanaman pangan	388.667	511.083	100.000	187.500	716.667	1.238.750
Industri Pengolahan	4.090.278	2.523.333	270.833	700.000	11.000.000	6.000.000
Perdagangan	1.194.764	1.176.042	284.000	240.000	3.240.000	2.521.667
Jasa Kemasyarakatan	1.545.145	1.518.157	600.000	400.000	2.300.000	4.894.500
Transportasi	760.917	429.458	371.250	80.000	1.833.333	870.000
Peternakan	3.083.333	725.000	3.083.333	125.000	3.083.333	1.325.000
Lainnya (Bangunan)	1.220.278	-	289.167	-	2.891.667	-
KRT tidak bekerja	920.000	2.211.333	60.000	396.667	2.500.000	8.070.000

Sumber : - Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006.  
 - Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008..

Secara umum, terjadi penurunan pendapatan rata-rata rumah tangga pada setiap lapangan pekerjaan KRT, antara tahun 2006-2008. Namun di sisi lain, pendapatan rumah tangga di sektor pertanian tanaman pangan mengalami peningkatan (lihat Tabel 4.16). Penurunan pendapatan rumah tangga terbesar terjadi pada rumah tangga dengan KRT yang bekerja di sektor industri pengolahan. Penurunan ini tentunya terkait dengan penurunan hasil sumber daya laut, khususnya kepiting di perairan di sekitar Kecamatan Labakkang. Berkurangnya hasil tangkapan nelayan juga berpengaruh terhadap penurunan pendapatan rumah tangga dari perikanan tangkap, dari Rp. 974.266,- per bulan menjadi Rp. 929.292,- per bulan. Akan tetapi penurunan rata-rata pendapatan rumah tangga perikanan tangkap tidak terlihat pada nilai minimum dan maksimum pendapatan rumah tangga. Pada tahun 2006 pendapatan rumah tangga terendah adalah Rp. 191.667,- per bulan dan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 212.500,- per bulan.

Penurunan pendapatan rumah tangga juga terjadi pada rumah tangga yang mata pencaharian utamanya bersumber dari sektor budidaya perikanan, dengan besar penurunan dari Rp. 1.216.513,- pada tahun 2006 menjadi Rp. 1.090.530,- pada tahun 2008. Penurunan pendapatan rumah tangga pada sektor budidaya perikanan sangat terkait dengan dengan peningkatan biaya operasional budidaya seperti bibit, pakan ikan, pupuk dan bahan bakar minyak. Ketergantungan bibit dari luar Kabupaten Pangkep memaksa petani

budidaya mengeluarkan biaya yang semakin tinggi. Selain itu, biaya perawatan pun juga mengalami peningkatan akibat semakin tingginya kebutuhan hidup *sawi*, sebagai orang yang dipercaya untuk melakukan perawatan. Dengan demikian, biaya kebutuhan *sawi* merupakan salah satu komponen biaya perawatan. Peningkatan biaya-biaya operasional tersebut tidak secara signifikan meningkatkan harga jual ikan bandeng di pasar lokal dan domestik. Meskipun terjadi penurunan pendapatan rumah tangga yang bersumber dari perikanan budidaya, namun pendapatan rumah tangga tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga yang bersumber dari perikanan tangkap. Masih tingginya pendapatan rumah tangga budidaya perikanan sangat terkait dengan luasnya lahan dan nilai ekonomi ikan dan udang yang relatif stabil dan cukup tinggi.

Secara umum terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga yang bersumber dari sektor pertanian tanaman pangan pada tahun 2008. Peningkatan pendapatan rumah tangga tersebut sangat terkait dengan penambahan aliran irigasi dari pemerintah Kabupaten Pangkep, sehingga lahan yang pada tahun 2006 hanya dapat ditanami satu kali dalam setahun, pada tahun 2008 menjadi dua kali penanaman, meskipun tidak terjadi perluasan lahan tanam. Peningkatan frekuensi penanaman padi dalam satu tahun tentunya mempengaruhi hasil panen dan pendapatan rumah tangga.

Selain pendapatan rumah tangga sektor pertanian tanaman pangan yang meningkat, pendapatan rumah tangga dimana KRTnya tidak bekerja juga meningkat. Keadaan ini terjadi karena tanggung jawab KRT sebagai pencari penghasilan rumah tangga tergantikan oleh anggota rumah tangga lainnya. Di Kelurahan Pundata Baji, pada umumnya rumah tangga terpilih dengan KRT yang tidak bekerja memiliki ART yang bekerja di sektor jasa seperti jasa kemasyarakatan, transportasi, dan perdagangan, atau sektor industri sebagai buruh di industri pengupasan kepiting atau industri pertambangan yang terdapat di sekitar Kecamatan Labakkang. Dengan demikian peningkatan penghasilan di sektor-sektor tersebut akan meningkatkan pendapatan rumah tangganya.

## Rumah Tangga Kegiatan Kenelayanan

Pendapatan rumah tangga terpilih yang berasal dari kegiatan kenelayanan dengan armada tangkap yang sangat sederhana bervariasi menurut musim. Musim gelombang lemah memberikan peluang bagi nelayan untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar karena mereka dapat melaut sampai ke lokasi yang jauh dari pantai. Pada tahun 2008, pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan pada musim gelombang lemah hampir sama dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga nelayan pada musim gelombang kuat dan satu setengah kali lipat dibandingkan dengan musim pancaroba. Rendahnya pendapatan rumah tangga pada musim gelombang kuat karena kondisi alam yang tidak memungkinkan nelayan untuk melaut menangkap ikan.

**Tabel 4.17. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (Rupiah)**

Pendapatan	Musim					
	Gelombang Lemah		Pancaroba		Gelombang Kuat	
	2006	2008	2006	2008	2006	2008
Rata-rata	1.378.611	1.072.600	457.222	792.900	135.000	591.000
Median	870.000	1.000.000	500.000	675.000	75.000	355.000
Minimum	250.000	0	200.000	0	0	0
Maksimum	4.000.000	3.500.000	9.550.000	1.600.000	500.000	1.750.000

Sumber : - Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006  
- Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008.

Secara umum, pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayan memperlihatkan peningkatan antara tahun 2006 dan 2008 pada musim pancaroba dan gelombang kuat, tetapi tidak meningkat pada musim gelombang lemah. Pada musim gelombang lemah, pendapatan rumah tangga cenderung memperlihatkan penurunan sampai 22 persen, dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Akan tetapi, penurunan tersebut tidak menjadi signifikan apabila dilihat dari nilai tengah (median) pendapatan rumah tangga musim gelombang lemah yang cenderung meningkat. Pada musim gelombang kuat dan pancaroba peningkatan pendapatan rumah tangga masing-masing mencapai tiga kali lipat dan dan tiga perempat kali lipat secara berturut-turut (lihat Tabel 4.17).

**Tabel 4.18. Distribusi Rumah Tangga Menurut Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan dan Musim, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (%)**

<i>Besar Pendapatan</i>	Musim					
	Gelombang Lemah		Pancaroba		Gelombang Kuat	
	2006	2008	2006	2008	2006	2008
< Rp. 500.000,-	16,7	16,0	44,4	30,0	94,4	58,0
Rp. 500.000,- - Rp. 999.000,-	44,4	28,0	55,6	28,0	5,6	16,0
Rp. 1.000.000,- - Rp. 1.499.000,-	5,6	38,0	-	22,0	-	22,0
Rp. 1.500.000,- - Rp. 1.999.000,-	11,1	6,0	-	10,0	-	4,0
Rp. 2.000.000,- - Rp. 2.499.000,-	5,6	6,0	-	-	-	-
Rp. 2.500.000,- - Rp. 2.999.000,-	-	2,0	-	-	-	-
Rp. 3.000.000,- +	16,7	4,0	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	100,0		100,0		100,0	

Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006.  
 - Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008.

Peningkatan pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan juga terlihat dari distribusi pendapatan rumah tangga menurut musim (Tabel 4.18). Data pada Tabel 4.18 memperlihatkan bahwa pada musim gelombang kuat ada pergeseran pendapatan rumah tangga menuju kelompok pendapatan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, proporsi rumah tangga dengan pendapatan di bawah Rp. 500.000,- per bulan, berkurang dari 94 persen pada tahun 2006 menjadi 58 persen pada tahun 2008. Pergeseran terbesar terjadi pada kelompok pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 1.499.000,- per bulan yang pertambahannya mencapai 22 persen. Peningkatan pendapatan rumah tangga juga terjadi pada musim pancaroba, dimana pada kelompok pendapatan rumah tangga kurang dari Rp. 1.000.000,-/bulan terjadi peningkatan yang mencapai 32 persen atau sepertiga dari rumah tangga yang terpilih. Pada musim gelombang lemah, pendapatan rumah tangga secara umum juga memperlihatkan pergeseran ke arah pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian meskipun terjadi penurunan pendapatan rumah tangga pada musim gelombang lemah, akan tetapi secara umum terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan.

Secara umum, kegiatan kenelayanan di Kelurahan Pundata Baji relatif lebih sederhana dibandingkan dengan nelayan di Desa Mattiro Bombang. Keberagaman sumber daya alam di kelurahan ini mengakibatkan hanya sebagian kecil rumah tangga yang menggantungkan kehidupan rumah tangga terhadap hasil laut. Kegiatan kenelayanan yang umumnya terjadi di perairan Maccine Baji adalah nelayan pukat atau lampara dan nelayan bubu. Nelayan pukat atau lampara umumnya melaut pada musim gelombang tenang dan musim pancaroba. Dari jenis tangkapan, nelayan di sekitar Kelurahan Pundata Baji tidak terlihat adanya perubahan komoditas tangkapan yaitu kepiting dan ikan-ikan kecil seperti lurek atau bête-bete dibandingkan dengan kondisi dua tahun lalu. Dilihat dari kapasitas tangkapannya kepiting masih menjadi tangkapan utama nelayan. Hal tersebut semakin didukung dengan adanya alat tangkap baru yaitu rakang. Rakang diperkenalkan pada penduduk pada awal tahun 2008. Keberadaan alat ini cukup membantu nelayan untuk memudahkan proses penangkapan kepiting (hasil wawancara dengan pedagang pengumpul). Dengan demikian meskipun secara umum terjadi penurunan produksi/hasil tangkapan nelayan di Kelurahan Pundata Baji, tetapi penggunaan alat tangkap baru dan peningkatan harga jual akibat peningkatan harga bahan bakar minyak akan berdampak pada meningkatnya pendapatan nelayan. Selain sebagai nelayan pada umumnya, sebagian penduduk di sekitar dermaga Maccine Baji juga bekerja sebagai buruh angkut ikan yang mengangkat ikan-ikan hasil tangkapan dari kapal-kapal besar yang merapat di dermaga tersebut untuk dijual ke pasar di Kabupaten Pangkep. Kegiatan kenelayanan yang cukup banyak dilakukan oleh penduduk di sekitar demaga adalah sebagai ABK pada kapal-kapal besar tersebut yang merupakan milik penduduk pulau-pulau di Desa Mattiro Baji. Bekerja sebagai ABK umumnya dilakukan oleh penduduk usia muda.

### *Rumah Tangga Anggota Pokmas/COREMAP*

Sama halnya dengan Desa Mattiro Bombang, masyarakat di Kelurahan Pundata Baji mulai diperkenalkan pada program COREMAP tahun 2005. Akan tetapi pengucuran dana bergulir atau

*seed fund* di tingkat masyarakat baru terlaksana pada Bulan April 2008. Masih barunya pemanfaatan dana tersebut di tingkat masyarakat menyebabkan sulitnya untuk melihat dampak dari Coremap terhadap pendapatan rumah tangga anggota pokmas. Secara umum, rata-rata pendapatan rumah tangga anggota pokmas di Kelurahan Pundata Baji lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga bukan anggota pokmas, yang juga terlihat dari pendapatan per kapitanya, meskipun nilai tengah (median) pendapatan rumah tangga anggota pokmas sama dengan rumah tangga bukan anggota pokmas (lihat Tabel 4.19).

**Tabel 4.19. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Anggota dan Bukan Anggota Pokmas/COREMAP, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkep, 2008**

<i>Pendapatan</i>	<i>Anggota Pokmas/COREMAP</i>	<i>Bukan Anggota Pokmas/COREMAP</i>
Rata-rata	Rp. 965.300,-	Rp. 1.236.537,-
Median	Rp. 833.333,-	Rp. 834.167,-
Minimum	Rp. 83.333,-	Rp. 41.667,-
Maksimum	Rp. 2.323.333,-	Rp. 8.070.000,-
Per kapita	Rp. 235.439,-	Rp. 236.990,-
N	30	90

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008.

Dana bergulir atau *seed fund* di Kelurahan Pundata Baji terealisasi pada bulan April 2008, yang berarti saat penelitian dilaksanakan dana tersebut baru berjalan dua bulan di tingkat masyarakat. Masih barunya dana tersebut sampai di tingkat masyarakat menyebabkan sulit untuk menilai bahwa bantuan yang diberikan oleh COREMAP telah memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan rumah tangga anggota pokmas. Dengan demikian, tingginya pendapatan rumah tangga anggota pokmas tidak dapat dikatakan sebagai dampak dari bantuan dana bergulir yang diterima. Akan tetapi pendapatan rumah tangga anggota pokmas termasuk cukup baik meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga bukan anggota pokmas.

**Tabel 4.20. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Anggota Pokmas/COREMAP Menurut Lapangan Pekerjaan Utama KRT, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkep, 2008**

<i>Lapangan Pekerjaan Utama KRT</i>	<i>Mean</i>	<i>Median</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>
Perikanan tangkap	976.410	947.500	212.500	2.138.333
Perikanan budidaya	1.038.889	833.333	83.333	2.323.333
Perdagangan	280.000	280.000	280.000	280.000
Jasa	947.952	700.000	140.667	2.300.000

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP, 2008.

Dilihat dari sumber pendapatan utama kepala rumah tangga anggota pokmas/COREMAP di Kelurahan Pundata Baji, mayoritas bersumber dari perikanan tangkap. Rumah tangga anggota pokmas/COREMAP memiliki pendapatan yang relatif tinggi, kecuali rumah tangga yang lapangan pekerjaan KRT-nya di sektor perdagangan. Rata-rata pendapatan rumah tangga tertinggi anggota pokmas/COREMAP berasal dari sektor perikanan budidaya. Keadaan tersebut sangat terkait dengan sifat pendapatan yang relatif stabil dibandingkan sektor perikanan tangkap. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang mendapatkan bantuan *seed fund* mempunyai pendapatan rata-rata yang relatif lebih baik dibandingkan dengan rumah tangga lainnya, tercermin dari rata-rata pendapatan rumah tangga menurut lapangan pekerjaan kepala rumah tangga anggota pokmas/COREMAP di Kelurahan Pundata Baji (lihat Tabel 4.20).

#### **4.3. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERUBAHAN PENDAPATAN**

Berdasarkan analisis pendapatan di kedua lokasi penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2008 rumah tangga yang terpilih sebagai sampel penelitian

mengalami peningkatan pendapatan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2006. Peningkatan pendapatan rumah tangga tersebut dapat terlihat hampir di semua rumah tangga yang terpilih. Adanya peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga terpilih di kedua lokasi penelitian dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Tiga faktor utama yang mempengaruhi perubahan pendapatan tersebut yaitu faktor struktural, internal, dan eksternal. Lebih lanjut, pada sub-bab ini akan mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan rumah tangga tersebut.

#### 4.3.1. Faktor Struktural

Faktor struktural mencakup aturan/kebijakan/program pemerintah, baik yang berkaitan langsung dengan kegiatan COREMAP maupun program-program pemerintah lainnya yang berperan baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perubahan pendapatan rumah tangga. Meskipun kegiatan COREMAP telah diperkenalkan kepada masyarakat di kedua lokasi penelitian sejak akhir tahun 2005, akan tetapi implementasi kegiatan di tingkat masyarakat baru terlaksana pada bulan April 2008 berupa bantuan dana bergulir atau *seed fund*. Dengan demikian, adanya peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga di kedua lokasi tidak dapat dinyatakan sebagai akibat langsung dari kegiatan COREMAP, melainkan dari faktor lain yang lebih mempengaruhi perubahan tersebut.

Banyaknya program pemerintah lainnya yang dilaksanakan di kedua lokasi penelitian diduga mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah tangga. Program pemerintah lainnya tersebut adalah Koperasi Usaha Bersama (KUB) yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) melalui pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dan Koperasi Syariah (lihat uraian Bab II). KUB merupakan program yang memberikan bantuan modal bagi nelayan untuk pengadaan armada atau alat tangkap, sedangkan PPK merupakan program bantuan modal untuk berbagai kegiatan usaha masyarakat atau peningkatan infrastruktur desa. Semua program

tersebut juga memberikan bantuan pinjaman dana seperti halnya kegiatan COREMAP. Bantuan dana yang dapat digunakan untuk pengadaan armada atau alat tangkap dirasakan oleh sebagian nelayan di kepulauan maupun di pesisir sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan mereka dari kegiatan kenelayanan (wawancara mendalam dengan nelayan dan tokoh masyarakat di kedua lokasi penelitian). Dengan demikian, keberadaan kegiatan-kegiatan dan berbagai program pemerintah selain COREMAP mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah tangga di lokasi penelitian.

Bagi rumah tangga yang mempunyai sumber pendapatan utama dari kegiatan kenelayanan, penguasaan teknologi (armada dan alat tangkap) sangat berpengaruh terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh. Berdasarkan hasil survei di kedua lokasi penelitian, dalam kurun waktu dua tahun terjadi peningkatan kepemilikan armada tangkap, khusus perahu tempel dan alat tangkap bubu dan jaring (lihat uraian Bab II). Semakin beragamnya jumlah dan jenis jaring yang dimiliki rumah tangga menyebabkan semakin besar kemungkinan rumah tangga untuk meningkatkan pendapatannya. Pengenalan alat tangkap baru berupa bubu kepiting pada awal tahun 2008 di kalangan nelayan semakin memudahkan kegiatan penangkapan sumber daya laut tersebut dan meningkatkan volume hasil tangkapan mereka. Peningkatan kepemilikan jumlah dan jenis alat tangkap terkait dengan program-program pemerintah yang memberikan bantuan dana untuk modal usaha di kalangan nelayan (wawancara mendalam dengan beberapa nelayan di kedua lokasi penelitian). Sebagian nelayan penerima bantuan modal tersebut menggunakannya untuk membeli mesin perahu atau menambah jumlah serta jenis alat tangkap. Kepemilikan armada tangkap yang dilengkapi dengan mesin sangat mempengaruhi wilayah penangkapan yang pada gilirannya dapat meningkatkan produksi tangkapan nelayan. Dengan demikian, keberadaan sarana produksi yang lebih baik dan jangkauan wilayah tangkap yang semakin luas menyebabkan pendapatan nelayan semakin meningkat.

Perluasan wilayah tangkap di kalangan nelayan sangat dirasakan oleh sebagian besar penduduk, tidak hanya yang tinggal di

pesisir namun juga penduduk di kepulauan. Sebagai contoh, wilayah penangkapan ikan tenggiri pada tahun 2008 mengalami perluasan dibandingkan dengan tahun 2006. Pada tahun 2006 wilayah tangkap ikan tenggiri umumnya hanya di sekitar perairan laut dalam di Desa Mattiro Bombang, sehingga kegiatan melaut dapat dilakukan setiap hari, yaitu pergi malam dan pulang menjelang subuh (Noveria, dkk. 2006). Akan tetapi, dua tahun kemudian (2008) terjadi perluasan wilayah tangkap karena di sekitar perairan laut dalam Desa Mattiro Bombang populasi ikan tenggiri semakin berkurang. Untuk mendapatkan hasil yang sama dengan tahun 2006 nelayan harus melaut sampai wilayah yang makin jauh dari desa mereka. Perubahan wilayah tangkap tersebut juga terkait dengan waktu melaut yang lebih lama, yaitu dua sampai dengan tiga hari (wawancara mendalam dengan nelayan). Keadaan tersebut menggambarkan bahwa perluasan wilayah tangkap di kalangan nelayan yang dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan rumah tangga nelayan. Perluasan wilayah tangkap dapat dilakukan nelayan setelah mereka mempunyai armada tangkap dengan kekuatan mesin yang lebih baik, yang sebagian diperoleh melalui bantuan program-program pemerintah.

#### **4.3.2. Faktor Internal**

Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah tangga, yaitu sumber pendapatan, teknologi dan wilayah penangkapan serta biaya produksi. Keberagaman sumber pendapatan rumah tangga berperan penting dalam meningkatkan jumlah pendapatan rumah tangga. Semakin beragam sumber pendapatan rumah tangga, maka pendapatan rumah tangga juga cenderung semakin meningkat. Secara umum, di kedua lokasi penelitian sumber pendapatan rumah tangga relatif bervariasi. Desa Mattiro Bombang yang merupakan wilayah kepulauan mengalami peningkatan variasi sumber pendapatan rumah tangga dibandingkan pada kondisi tahun 2006. Pada tahun 2006, mayoritas penduduk Desa Mattiro Bombang mengantungkan kehidupannya pada hasil laut, dalam arti sumber mata pencaharian utama mereka berasal dari kegiatan kenelayanan. Akan tetapi, di tahun 2008 terjadi

peralihan sumber pendapatan penduduk kepulauan dari kegiatan perikanan ke sektor jasa transportasi, perdagangan eceran dan usaha budidaya rumput laut. Tingginya kebutuhan terhadap alat transportasi yang menghubungkan pulau-pulau di wilayah perairan dan juga pulau-pulau dengan daratan mendorong masyarakat untuk meningkatkan jumlah armada angkutan umum dan sebagian di antaranya beralih usaha ekonomi dari kegiatan kenelayanan menjadi jasa angkutan laut. Di sektor perdagangan, berdasarkan hasil observasi di Pulau Salemo juga terlihat adanya peningkatan jumlah warung dan toko yang menjual bahan-bahan kebutuhan rumah tangga dan kegiatan kenelayanan. Selain dari kedua jenis aktivitas di atas, kegiatan ekonomi yang mulai dikembangkan oleh sebagian masyarakat di Pulau Salemo adalah usaha budidaya rumput laut meskipun dalam jumlah yang masih sangat terbatas. Penghasilan yang diperoleh dari hasil panen budidaya rumput laut merupakan sumber tambahan pendapatan rumah tangga selain dari kegiatan melaut (wawancara mendalam dengan nelayan yang juga mengusahakan kegiatan budidaya rumput laut). Bagi penduduk pesisir, keberagaman sumber pendapatan telah dirasakan sejak dahulu. Hal tersebut tercermin dari pendapatan rumah tangga di Kelurahan Pundata Baji (tahun 2006 dan 2008) yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga di Desa Mattiro Bombang. Dengan demikian, keberagaman sumber pendapatan rumah tangga menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah tangga baik di wilayah kepulauan maupun di pesisir.

Meningkatnya rata-rata pendapatan rumah tangga di kedua lokasi penelitian terkait pula dengan bertambahnya jumlah anggota rumah tangga yang memasuki pasar kerja. Fenomena penduduk berusia 15 tahun ke bawah yang bekerja sangat terlihat di wilayah kepulauan. Perubahan status anggota rumah tangga yang berusia 15 tahun ke bawah dari “sekolah” menjadi pekerja pengupas kepiting mengakibatkan kegiatan sekolah menjadi pilihan kedua. Menurut pengakuan seorang guru di Desa Mattiro Bombang, pekerjaan tersebut mengakibatkan anak-anak (perempuan) usia sekolah bekerja sejak pulang sekolah sampai dengan malam hari. Dengan keadaan tersebut, tak jarang keesokan harinya anak-anak yang bekerja tidak

bisa mengikuti pelajaran dengan maksimal karena kelelahan dan mengantuk. Pada mulanya, pekerjaan mengupas kepiting dilakukan oleh perempuan usia kerja, akan tetapi semakin tingginya kebutuhan akan tenaga pengupas kepiting menyebabkan anak-anak perempuan usia sekolah juga terdorong untuk melakukan pekerjaan tersebut. Penambahan jumlah anggota rumah tangga yang bekerja sebagai pengupas kepiting, akan mempengaruhi pendapatan rumah tangga mereka. Meningkatnya jumlah anggota rumah tangga yang bekerja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga, khususnya di wilayah kepulauan.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah tangga adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM yang rendah tidak hanya terkait dengan penangkapan SDL, tetapi juga budidaya dan pengolahan SDL. Adanya pengetahuan mengenai budidaya SDL di kalangan penduduk menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah tangga. Pengetahuan tentang budidaya SDL yang telah dikembangkan di kedua lokasi penelitian adalah budidaya rumput laut. Kegiatan budidaya rumput laut masih dilakukan oleh sebagian kecil penduduk di awal tahun 2008. Dalam perkembangannya pengolahan rumput laut memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga, apalagi potensi wilayah juga mendukung untuk dilaksanakannya kegiatan tersebut. Selain budidaya rumput laut, pengetahuan tentang pengolahan rumput laut menjadi sirup dan dodol juga merupakan potensi yang cukup besar bagi penduduk di Desa Mattiro Bombang sebagai alternatif usaha ekonomi untuk peningkatan pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan penduduk pada umumnya.

### **4.3.3. Faktor Eksternal**

Pendapatan rumah tangga khususnya yang berasal dari kegiatan kenelayanan tidak dapat dilepaskan dari faktor pengaruh yang berasal di luar lingkungan masyarakat (faktor eksternal). Degradasi lingkungan, rantai/jalur pemasaran, biaya produksi, permintaan terhadap hasil tangkapan, dan musim merupakan faktor

eksternal utama yang mempengaruhi pendapatan nelayan. Degradasi lingkungan dirasakan oleh nelayan di perairan Kabupaten Pangkep dalam menurunkan volume produksi tangkapan mereka yang selanjutnya berpengaruh terhadap pendapatan melaut. Hasil penelitian CRITC COREMAP II (2007) juga menyatakan bahwa telah terjadi penurunan persentase tutupan karang hidup di perairan Kabupaten Pangkep dari 34,68 persen pada tahun 2006 menjadi 30,42 persen di tahun 2007.

Keberadaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bagan rambo dan *mini trawl* di sekitar perairan lokasi penelitian semakin memperparah kerusakan terumbu karang di perairan lokasi penelitian. Penggunaan bahan peledak oleh nelayan bagan rambo tidak hanya merusak terumbu karang akan tetapi juga mengakibatkan matinya ikan-ikan kecil. Penggunaan *mini trawl* juga menyebabkan tertangkapnya semua jenis ikan, sampai dengan yang berukuran kecil. Selain itu, penggunaan bius/potas oleh sebagian nelayan yang berasal desa-desa lainnya di Kecamatan Liukang Tupabiring semakin memperparah kerusakan terumbu karang. Meskipun beberapa nelayan lokal dan masyarakat setempat telah menegur pelaku pemboman, baik secara langsung dan tidak langsung, akan tetapi penggunaan bahan-bahan tersebut untuk menangkap sumber daya laut tetap berlangsung di lokasi penelitian. Pet-Soede, Cesar, dan Pet (1999) menyatakan bahwa apabila penangkapan hasil laut dengan menggunakan bahan peledak di perairan Indonesia terus berlangsung maka diperkirakan dalam jangka waktu 20 tahun Indonesia akan kehilangan nilai ekonomi sebesar US \$ 306.800 per km<sup>2</sup> terumbu karang yang berpontesi tinggi dan US \$ 33.900 per km<sup>2</sup> terumbu karang yang pontesi rendah. Dengan perhitungan tersebut, kerusakan terumbu karang di perairan Spermonde berdampak terhadap penurunan hasil tangkapan nelayan dari tahun ke tahun. Penurunan hasil tangkapan tersebut sangat dirasakan oleh sebagian besar nelayan lokal, seperti yang diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat Desa Mattiro Bombang sebagai berikut :

*Jawab: Iya, tapi kalau sekarang masyarakatnya mencari ikannya aja susah, ga boleh lagi kepiting kecil harus dilepas yah buat apa ya?.....Cuma dapat 2*

*ekor. Nah perbandingan bu waktu periode saya awal-awal itu yang ngambil 10 kilo sekarangnya untung 2 kilo. Dari tahun ke tahun menurun, yang ngambil 10 kilo dalam 1 hari toh, 1 kali panen untung-untung cukup 2 kilo sekarang untuk sekali perbandingannya*

*Tanya: Perbandingannya 1 banding 5. itu yang 10 kilo berapaan tuh?*

*Jawab: Yah 10 tahun yang lalu.... 10 tahun yang lalu sudah dapat 10 kilo*

*Tanya: Dulu juga sekali ngambil ya pak, ikan ya? Sekali ngambil ya?*

*Jawab: Iya sekali ngambil 1x panen, 1 hari itu*

*Iya masih sempat ada kalau ga salah saya ingat itu ada dapat-dapat 1 orang nelayan itu 10 atau 8 kilo, sekarang uda ndak bisa. Paling enggak 2 kilo atau 1 kilo*

Faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga nelayan adalah pasar. Pasar yang dimaksud adalah permintaan komoditas SDL dan harga yang secara langsung memegang peran penting terhadap pendapatan rumah tangga. Meningkatkannya permintaan terhadap kepiting di pasar lokal di kedua lokasi penelitian semakin mendorong masyarakat untuk menangkap jenis SDL tersebut. Bertambahnya jumlah *mini plan* di lokasi penelitian juga semakin memperbesar permintaan kepiting di tingkat lokal. Selain kepiting yang memiliki permintaan tinggi di tingkat lokal, ikan bandeng juga merupakan komoditas yang cukup banyak diusahakan oleh petani budidaya di wilayah pesisir. Pada umum, permintaan ikan bandeng cenderung tidak mengalami perubahan (stabil). Hal tersebut terkait dengan jangkauan pasar yang lebih luas, tidak hanya di tingkat Kabupaten Pangkep akan tetapi menjangkau pasar di tingkat Propinsi Sulawesi Selatan dan propinsi-propinsi lainnya (Noveria, dkk. 2008). Dengan demikian, permintaan komoditas baik di tingkat lokal dan kabupaten juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan rumah tangga nelayan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain permintaan pasar yang tinggi, harga komoditas juga mempengaruhi pendapatan rumah tangga. Secara umum, kedua komoditas yang memiliki permintaan pasar yang tinggi (kepiting dan ikan bandeng) memiliki kecenderungan harga yang relatif stabil di sepanjang tahun. Harga kepiting cenderung stabil jika dibandingkan dengan harga ikan bandeng. Hal tersebut dikarenakan harga ikan bandeng lebih dipengaruhi kuantitas hasil tangkapan ikan laut. Harga ikan bandeng akan meningkat apabila produksi tangkapan hasil laut menurun dan harga menurun pada kondisi sebaliknya. Dilihat dari harga kedua komoditas tersebut pada dua tahun yang lalu, terlihat adanya kenaikan harga jual kepiting dari Rp. 16.000,- per kg (2006) menjadi Rp. 26.000,- per kg (2008) di kedua lokasi penelitian. Sementara itu, harga jual ikan bandeng cenderung tidak mengalami perubahan yaitu Rp. 12.000,- sampai dengan Rp. 14.000,- per kg untuk yang berukuran dua ekor dalam satu kilogram. Dengan demikian, peningkatan harga jual kepiting lebih mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah tangga dibandingkan dengan harga jual ikan bandeng.

Biaya produksi juga mempengaruhi peningkatan dan penurunan pendapatan rumah tangga nelayan. Secara umum, saat ini biaya produksi yang dikeluarkan oleh seorang nelayan cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi dua tahun yang lalu. Peningkatan terbesar terjadi pada biaya bahan bakar minyak (BBM) terkait dengan meningkatnya harga BBM di Indonesia. Untuk mengatasi kendala tersebut, nelayan berupaya melakukan pencampuran bahan bakar, yaitu solar dan minyak tanah guna menekan pengeluaran bahan bakar. Dengan kondisi demikian, peningkatan biaya produksi, khusus BBM tidak secara langsung mempengaruhi perubahan pendapatan rumah tangga nelayan.

Seperti halnya nelayan pada umum, musim merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan. Nelayan Desa Mattiro Bombang cenderung mengalami peningkatan pendapatan pada musim gelombang kuat. Pada musim gelombang kuat hasil tangkapan kepiting jauh lebih banyak dibandingkan pada musim lainnya. Hal tersebut dikarenakan pada musim tersebut ombak yang kuat menyebabkan kepiting keluar

dari sarangnya, sehingga nelayan lebih mudah menangkapnya. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan di Desa Mattiro Bombang tetap melakukan aktivitas melaut meskipun musim gelombang kuat dengan lokasi penangkapan yang relatif lebih dekat dibandingkan pada musim lainnya. Keadaan sebaliknya terjadi pada nelayan di Kelurahan Pundata Baji, yang pada musim gelombang kuat cenderung mengalami penurunan pendapatan rumah tangga. Nelayan di Kelurahan Pundata Baji sama sekali tidak bisa melaut pada masa gelombang kuat karena angin yang kuat menyebabkan mereka tidak mampu menembus ke tengah laut. Kondisi tersebut jelas mempengaruhi pendapatan rumah tangga nelayan pada musim gelombang kuat. Akan tetapi, jika dibandingkan kondisi tahun 2006 dan 2008, musim tidak menyebabkan perubahan besar terhadap pendapatan rumah tangga. hal ini karena tidak adanya perubahan musim yang signifikan dalam dua tahun terakhir yang secara langsung mempengaruhi pendapatan nelayan.

Dengan memperhatikan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa perubahan pendapatan rumah tangga berdasarkan faktor eksternal di kedua lokasi penelitian lebih didominasi oleh kerusakan terumbu karang yang berdampak terhadap penurunan hasil tangkapan, penggunaan teknologi melalui peningkatan kepemilikan armada dan alat tangkap, serta permintaan yang tinggi akan komoditas unggulan (kepiting dan ikan bandeng). Faktor-faktor tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pendapatan rumah tangga dan tingkat kesejahteraan penduduk lokasi COREMAP pada umumnya.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. KESIMPULAN**

**P**erairan Kabupaten Pangkep dikelilingi oleh terumbu karang yang mempunyai nilai ekologi dan ekonomi tinggi. Namun sayangnya, sebagaimana juga terjadi di berbagai wilayah perairan di Indonesia, sebagian besar terumbu karang tersebut berada dalam kondisi kurang baik. Kondisi ini terutama disebabkan oleh perilaku manusia yang "tidak bersahabat" dengan terumbu karang, seperti menangkap ikan menggunakan armada, bahan dan alat tangkap yang menimbulkan kerusakan sumberdaya laut tempat hidup berbagai jenis ikan dan biota laut tersebut. Armada tangkap yang bersifat merusak terumbu karang yang biasanya digunakan oleh sebagian nelayan adalah *trawl* atau *mini trawl*. Selain itu, tidak jarang nelayan pula menggunakan bom dan racun dalam kegiatan penangkapan ikan. Kedua jenis bahan tersebut bersifat menghancurkan dan mengganggu kelangsungan hidup sumber daya terumbu karang.

Kerusakan terumbu karang berakibat pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkurang atau bahkan hilangnya jenis-jenis biota laut tertentu yang menjadi sumber mata pencaharian penduduk yang tinggal di sekitarnya. Hal ini terutama dirasakan oleh mereka yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut melalui kegiatan kenelayanan (perikanan laut). Di lokasi penelitian, yaitu Desa Mattiro Bombang (Kecamatan Liukang Tupabbiring) mayoritas penduduknya bekerja di sektor perikanan laut dan kebanyakan mereka adalah nelayan kecil yang biasa melaut sendiri dengan armada tangkap yang sederhana. Mereka melaut menggunakan perahu motor berkekuatan kecil, sehingga mengalami kesulitan untuk berlayar sampai jauh ke tengah laut. Padahal dengan kondisi terumbu karang yang rusak mereka terpaksa mencari ikan

sampai wilayah yang jauh dari pantai karena di sekitar pantai sumber daya laut tersebut sudah semakin berkurang.

Pemerintah telah meluncurkan program untuk mengelola dan merehabilitasi terumbu karang agar kondisi sumber daya laut tersebut tidak bertambah buruk. Dalam konteks masyarakat pesisir dan kepulauan, khususnya, pemerintah juga berusaha untuk mempertahankan dan jika memungkinkan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka di tengah menurunnya kondisi terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya. Program yang diluncurkan adalah COREMAP (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program*) yang mencakup beragam jenis kegiatan, baik yang ditujukan untuk lingkungan fisik maupun untuk sosial ekonomi penduduk yang tinggal di sekitar terumbu karang. Program ini melibatkan *stakeholders* dari berbagai institusi (pemerintah) mulai dari tingkat nasional sampai dengan kelurahan/desa yang terpilih sebagai lokasi kegiatan. Melalui COREMAP dilakukan usaha-usaha penyelamatan terumbu karang serta sumber daya laut pada umumnya dan juga upaya-upaya peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama melalui penciptaan mata pencaharian alternatif.

Keberhasilan COREMAP diukur dari berbagai aspek sesuai dengan jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan. Karena dalam program ini juga terdapat kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan dan memelihara kondisi fisik terumbu karang, maka bertambahnya luas tutupan karang serta keragaman jenis biota laut yang hidup di sekitarnya menjadi salah satu ukuran keberhasilan COREMAP. Dari aspek sosial ekonomi, indikator capaian tujuan program ini meliputi: (1) peningkatan pendapatan dan jumlah penduduk yang menerima pendapatan dari kegiatan ekonomi berbasis terumbu karang dan kegiatan alternatif lainnya sebesar sepuluh persen pada akhir tahun 2009, (2) sedikitnya 70 persen dari masyarakat nelayan (*beneficiaries*) di kabupaten lokasi program merasakan dampak positif COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan dan status sosial ekonominya (World Bank, 2004). Capaian ini tidak hanya diukur pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan COREMAP, akan tetapi juga pada waktu-waktu di antaranya (dalam periode satu atau dua tahun).

Untuk itulah dilakukan pemantauan agar capaian program ini selama satu atau dua tahun dapat diketahui.

COREMAP secara resmi dilaksanakan di Kabupaten Pangkep pada tahun 2005. Semua kecamatan di kabupaten ini, kecuali yang terletak di dataran tinggi, yaitu Kecamatan Todong Tallasa dan Balocci, terpilih menjadi lokasi pelaksanaan COREMAP. Secara keseluruhan, program ini dilaksanakan di 37 desa/kelurahan di wilayah kepulauan serta pesisir dan dataran rendah. Program ini dimulai dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi, edukasi, penyadaran masyarakat, dan pelatihan-pelatihan untuk para pelaksananya di tingkat desa/kelurahan (SETO, fasilitator desa, dan motivator desa). Terkait dengan mata pencaharian penduduk, namun masih berkaitan dengan sektor perikanan, kegiatan yang telah dilakukan adalah penanaman rumput yang bertujuan menyediakan tempat untuk berkumpulnya ikan, sehingga nelayan tidak perlu berlayar sampai jauh ke tengah laut untuk memperoleh hasil tangkapan yang memadai. Selain itu, kegiatan pengawasan juga sudah dilakukan meskipun tidak secara rutin karena keterbatasan dana untuk itu. Kegiatan pengawasan telah memperlihatkan hasilnya, yaitu mencegah nelayan dari luar lokasi melakukan penangkapan ikan menggunakan armada, bahan, dan alat tangkap yang merusak terumbu karang. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan produksi tangkapan nelayan di lokasi penelitian, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan mereka.

Kegiatan COREMAP untuk mengembangkan mata pencaharian alternatif, yaitu yang tidak terkait dengan eksploitasi sumber daya laut, baru dilaksanakan pada tahun 2008, setelah *seed fund* (dana bantuan untuk kegiatan ekonomi produktif – UEP) cair. Di antara dua lokasi penelitian, dana tersebut baru dimanfaatkan di Kelurahan Pundata Baji (Kecamatan Labakkang). *Seed fund* dipinjamkan kepada anggota pokmas UEP untuk mengembangkan usaha, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 500.000,- - Rp. 2.000.000,- per orang. Sebagian penerima *seed fund* adalah mereka yang sebelumnya sudah mempunyai berbagai jenis usaha ekonomi, mulai dari berjualan (makanan), usaha perbengkelan, sampai pada usaha perikanan darat. Bantuan uang yang diterima digunakan untuk

mengembangkan atau menambah skala usaha, misalnya memperbanyak jenis dan jumlah alat tangkap. Namun demikian ada pula beberapa penerima *seed fund* yang belum mempunyai usaha ekonomi dan baru akan memulai usahanya dengan modal dana bantuan.

*Seed fund* bersifat dana bergulir, dalam arti uang yang diterima harus dikembalikan dengan cara mencicil, untuk kemudian digulirkan kepada anggota pokmas yang belum menerima bantuan. Penerima bantuan diseleksi oleh pengurus LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dengan pertimbangan kelayakan usaha serta kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Namun dalam praktiknya, penerima *seed fund* lebih didasarkan pada pertimbangan kemampuan untuk mengembalikan cicilan, sehingga banyak di antara mereka adalah penduduk yang tergolong mampu secara ekonomi. Beberapa penerima dana kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota masyarakat lainnya yang dipandang lebih membutuhkan. Jika mereka tidak bisa membayar cicilan, maka anggota pokmas UEP yang namanya tercatat sebagai penerima *seed fund* bertanggungjawab untuk membayar cicilannya kepada pengurus LKM. Dalam kasus ini mereka berperan sebagai "penjamin" dana yang dipinjam. Cara ini ditempuh agar dana dapat bertahan dalam jangka panjang agar lebih banyak penduduk yang bisa memperoleh manfaat dari dana tersebut.

Berbeda dengan di Kelurahan Pundata Baji, sampai dengan pelaksanaan penelitian (bulan Juni 2008) *seed fund* di Desa Mattiro Bombang (Kecamatan Liukang Tupabbiring) belum bisa dimanfaatkan calon penerimanya. Hal ini karena masih ditemukan kendala administrasi akibat pergantian ketua LKM. Menurut ketentuan program rekening penampung *seed fund* harus atas nama ketua LKM dan karena ketua LKM yang pertama terpilih telah pindah ke luar desa, maka harus dilakukan pergantian rekening dengan nama ketua LKM yang baru. Pencairan dana selanjutnya menunggu proses pergantian nama pemilik rekening penerimanya.

Terlepas dari belum turunnya dana untuk kegiatan ekonomi produktif, kegiatan masing-masing pokmas COREMAP masih sangat terbatas, untuk mengatakan tidak ada sama sekali. Sebagai contoh,

pokmas jender di Desa Mattiro Bombang baru memperoleh satu kali pelatihan, yaitu pengolahan rumput laut menjadi sirup dan dodol. Pelatihan tersebut dilakukan dua hari sebelum adanya peninjauan oleh tim dari World Bank. Keadaan yang hampir serupa juga terjadi pada pokmas lainnya, antara lain pokmas pengawasan. Tidak ada kegiatan pengawasan yang secara khusus dilakukan oleh anggota pokmas dalam kerangka kegiatan COREMAP. Kenyataan ini menimbulkan kesan bahwa kegiatan pokmas-pokmas COREMAP hanya terbatas pada pembentukan kelompok. Setelah kelompok terbentuk, hampir tidak ada kegiatan lain yang dilakukan masing-masing pokmas.

Dalam konteks pendapatan rumah tangga, penelitian ini menemukan adanya peningkatan pendapatan rumah tangga-rumah tangga yang terpilih sebagai sampel. Peningkatan pendapatan yang signifikan ditemukan di antara rumah tangga sampel di Desa Mattiro Bombang. Pada tahun 2006 pendapatan rata-rata rumah tangga terpilih sebesar Rp. 547.250,- per bulan, sementara dua tahun setelahnya (2008) meningkat menjadi Rp. 958.750,- per bulan. Jika dilihat dari pendapatan per kapita, terjadi peningkatan dari Rp. 116.960,- setiap bulan menjadi Rp. 195.350,- per bulan selama kurun waktu dua tahun tersebut. Selanjutnya, di Kelurahan Pundata Baji pendapatan rata-rata rumah tangga sampel pada tahun 2006 adalah Rp. 1.137.570,- per bulan. Jumlah ini meningkat menjadi Rp. 1.168.725,- setiap bulan pada tahun 2008. Hal yang sama juga terjadi pada pendapatan per kapita, dengan peningkatan dari Rp. 222.320,- per bulan pada tahun 2006 menjadi Rp. 236.600,- per bulan pada tahun 2008.

Di Desa Mattiro Bombang, khususnya, dapat dikatakan bahwa peningkatan pendapatan terjadi pada hampir semua rumah tangga sampel. Hal ini terlihat dari kecenderungan perubahan distribusi pendapatan ke arah yang lebih besar. Jika pada tahun 2006 sekitar 61 persen rumah tangga sampel mempunyai pendapatan rata-rata kurang dari Rp. 500.000,- setiap bulan, pada tahun 2008 proporsi rumah tangga dengan jumlah pendapatan tersebut berkurang menjadi 34,4 persen. Kondisi yang sebaliknya terjadi pada rumah tangga dalam kelompok pendapatan yang lebih besar. Hanya 1 persen di antara seluruh rumah tangga sampel pada tahun 2006 yang

berpenghasilan lebih dari Rp. 3.000.000,- per bulan. Pada tahun 2008 proporsi rumah tangga yang berpenghasilan lebih dari Rp. 3.000.000,- per bulan meningkat menjadi 3,3 persen. Perubahan distribusi pendapatan rumah tangga seperti tersebut tidak terlihat di antara rumah tangga-rumah tangga sampel di Kelurahan Pundata Baji. Proporsi rumah tangga berpenghasilan kecil (kurang dari Rp. 500.000,- setiap bulan) bahkan sedikit lebih banyak pada tahun 2008 daripada tahun 2006, yaitu 25,8 persen dan 25 persen secara berturut-turut. Selanjutnya, proporsi rumah tangga yang berpenghasilan lebih dari Rp. 3.000.000,- per bulan juga berkurang dari 6 persen pada tahun 2006 menjadi 5,8 persen di tahun 2008.

Membandingkan rumah tangga yang salah satu atau lebih dari anggotanya terlibat dalam kegiatan pokmas COREMAP dan rumah tangga tanpa anggota yang terlibat sebagai anggota pokmas, terlihat perbedaan pendapatan di antara kedua kelompok tersebut. Keadaan ini terutama ditemui di Desa Mattiro Bombang. Rumah tangga dengan anggota yang terlibat dalam pokmas Coremap mempunyai pendapatan rata-rata per bulan lebih tinggi daripada rumah tangga yang anggotanya sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan pokmas Coremap. Namun keadaan ini tidak ditemui di lokasi penelitian yang terletak di wilayah pesisir. Pendapatan rumah tangga anggota pokmas Coremap di Kelurahan Pundata Baji bahkan lebih rendah dibanding pendapatan rumah tangga yang anggotanya tidak terlibat dalam kegiatan pokmas program tersebut.

Peningkatan pendapatan rumah tangga sampel selama periode dua tahun (2006-2008), terutama di Desa Mattiro Bombang, disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu di antaranya adalah lebih bervariasinya jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga. Jika pada tahun 2006 hampir semua rumah tangga memperoleh pendapatan dari kegiatan kenelayanan, dua tahun sesudahnya sumber pendapatan mereka lebih bervariasi. Sebagai contoh, pada tahun 2008 lebih banyak rumah tangga yang melakukan usaha ekonomi berupa perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari dibanding tahun 2006. Selain itu, pada tahun 2008 beberapa rumah tangga juga mengusahakan budidaya rumput lain, usaha

ekonomi yang tidak dilakukan oleh masyarakat di lokasi penelitian pada tahun 2006.

Lebih banyaknya anggota rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga. Pada tahun 2008 setelah beroperasinya beberapa usaha pengupasan kepiting (*mini plan*) baru di Desa Mattiro Bombang banyak anak usia sekolah yang bekerja sebagai buruh pengupas kepiting di *mini plan* tersebut. Mereka bekerja sejak pulang sekolah sampai larut malam. Pekerjaan yang mereka lakukan menghasilkan upah yang selanjutnya diserahkan kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Anak-anak pengupas kepiting memberi kontribusi yang berarti terhadap pendapatan rumah tangga.

Di luar faktor internal rumah tangga, ada pula faktor struktural yang memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga sampel. Termasuk dalam faktor ini adalah program-program dari berbagai institusi (pemerintah) yang antara lain berupa bantuan pinjaman modal usaha bagi masyarakat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi mereka. Bagi sebagian nelayan bantuan modal yang diterima dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas armada tangkap, misalnya membeli mesin perahu yang berkekuatan lebih besar, atau menambah jenis dan jumlah alat tangkap. Dengan armada tangkap berkekuatan lebih besar serta alat tangkap yang lebih banyak dan bervariasi nelayan dapat memperbesar volume produksi yang pada gilirannya memberikan penghasilan yang lebih besar pula bagi mereka. Bagi penduduk yang bukan nelayan, bantuan modal yang diperoleh melalui berbagai program pemerintah tersebut digunakan juga digunakan untuk meningkatkan skala usaha, sehingga memungkinkan mereka untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Secara umum dapat dikatakan bahwa COREMAP, khususnya kegiatan ekonomi produktif, belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini terlihat dari tidak adanya perbedaan pendapatan antara rumah tangga yang anggotanya terlibat sebagai anggota pokmas (UEP) dengan rumah

tangga tanpa anggota yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Di Desa Mattiro Bombang, pendapatan rata-rata rumah tangga yang mempunyai anggota yang terlibat dalam pokmas COREMAP lebih tinggi daripada rumah tangga yang tidak mempunyai anggota yang terlibat dalam pokmas COREMAP. Namun, kondisi yang sebaliknya terjadi di Kelurahan Pundata Baji. Di kelurahan pesisir ini, rumah tangga anggota pokmas COREMAP mempunyai pendapatan rata-rata yang lebih rendah dibanding rumah tangga yang anggotanya terlibat dalam kegiatan pokmas COREMAP. Hal ini terutama karena bantuan modal yang berasal dari COREMAP baru diterima sekitar satu bulan sebelum penelitian, sehingga belum memberikan pengaruh terhadap perbaikan pendapatan rumah tangga. Bahkan ada kelompok UEP yang belum menerima dana bantuan dari kegiatan COREMAP. Oleh karena itu, masih diperlukan waktu untuk mengetahui keberhasilan COREMAP dalam kegiatan mata pencaharian alternatif.

Walaupun telah dilaksanakan sekitar tiga tahun, keberhasilan yang dicapai COREMAP di tingkat desa/kelurahan tampaknya masih jauh dari memadai. Hal ini terlihat dari kecilnya proporsi masyarakat, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh individu yang menjadi responden penelitian, yang mengetahui berbagai kegiatan yang dilakukan COREMAP. Bahkan hanya sekitar sepertiga responden di Kelurahan Pundata Baji dan separuh responden di Desa Mattiro Bombang yang mengetahui bahwa COREMAP telah dilaksanakan di tempat tinggal mereka. Karena hanya sedikit yang mengetahui keberadaan COREMAP, maka sedikit pula responden yang terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut.

Kenyataan di atas merupakan salah satu indikasi bahwa sosialisasi COREMAP tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat dianalisis dari dua sisi. Pertama, karena program ini mencakup wilayah yang luas, sementara tenaga pelaksana di lapangan, khususnya fasilitator dan motivator desa, terbatas jumlahnya. Akibatnya, kegiatan-kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan kurang atau tidak mencapai seluruh masyarakat yang tinggal di pelosok lokasi COREMAP. Apalagi di wilayah kepulauan, dimana satu desa terdiri dari tiga sampai empat pulau, sosialisasi adakalanya hanya dilakukan di pulau-pulau yang banyak

penduduknya dan menjadi pusat desa. Mereka yang tinggal di pulau lainnya tidak tersentuh kegiatan sosialisasi. Selain itu, hambatan cuaca juga memberi sumbangan yang berarti terhadap kurangnya sosialisasi COREMAP. Tidak jarang ketika sosialisasi dilakukan cuaca dan gelombang laut tidak memungkinkan penduduk untuk melakukan perjalanan, sehingga mereka yang tinggal di pulau-pulau lain tidak bisa menghadiri kegiatan tersebut. Kedua, kurangnya kepedulian masyarakat kemungkinan menyebabkan kegiatan COREMAP tidak diketahui secara luas. Hal ini terutama ditemukan di lokasi-lokasi yang penduduknya mempunyai mata pencaharian beragam, seperti di Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang. Mereka yang kegiatan ekonominya tidak secara langsung berkaitan dengan terumbu karang atau sumber daya laut pada umumnya, kurang tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh COREMAP. Hal ini tidak mengherankan karena selama ini memang kegiatan COREMAP lebih difokuskan pada masyarakat pesisir yang mempunyai mata pencaharian yang sangat terkait dengan sumber daya laut.

## 5.2. SARAN

Disadari bahwa hasil yang dicapai COREMAP setelah program ini dilaksanakan lebih kurang selama tiga tahun masih kurang memadai. Keterlambatan pelaksanaan program yang secara langsung terkait dengan (perbaikan) kondisi ekonomi masyarakat, khususnya pencairan dana bantuan modal usaha, menyebabkan sampai saat ini keberhasilan program ini belum terlihat secara nyata. Namun demikian, program ini berpotensi untuk mencapai keberhasilan, sepanjang pelaksanaannya tidak menyimpang dari rancangan program dan mendapat dukungan dari berbagai *stakeholders* yang terlibat.

Mengacu pada hasil pemantauan dan evaluasi mengenai implementasi COREMAP di tingkat lapangan yang dilaksanakan melalui kegiatan penelitian ini, maka beberapa saran diajukan untuk pelaksanaan program pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang ini ke depan, yaitu:

- ✚ Upaya sosialisasi COREMAP agar lebih ditingkatkan karena banyak anggota masyarakat di lokasi penelitian yang tidak mengetahui keberadaan program ini di daerah tempat tinggal mereka. Kegiatan sosialisasi seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya mereka yang sepenuhnya menggantungkan kehidupan pada sumber daya laut. Selama ini ada kesan bahwa COREMAP hanya ditujukan bagi penduduk yang mempunyai mata pencaharian dari kegiatan kenelayanan dan eksploitasi sumber daya laut pada umumnya. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, diharapkan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan COREMAP juga semakin luas.
- ✚ Agar kegiatan sosialisasi bisa dilakukan lebih intensif diperlukan kerja keras dari para pelaksana teknis di lapangan, terutama fasilitator masyarakat dan motivator desa. Dengan jumlah tenaga yang terbatas, sementara wilayah kerja mereka mencakup tiga sampai empat pulau yang sulit dijangkau terutama pada musim angin dan gelombang laut yang kuat, fasilitator masyarakat mengalami kesulitan untuk lebih sering mendatangi masing-masing wilayah kerja mereka. Jika memungkinkan tenaga fasilitator masyarakat bisa diperbanyak agar mereka dapat konsentrasi bekerja di satu atau dua pulau saja. Dengan demikian, mereka dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di pelosok lokasi COREMAP.
- ✚ Motivator desa juga harus lebih dipacu dalam melaksanakan pekerjaannya. Kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pekerja teknis lapangan tersebut harus dilaksanakan, sehingga memaksa mereka untuk bekerja lebih sungguh-sungguh. Bila perlu mekanisme "reward and punishment" bisa diberlakukan untuk memberi penghargaan kepada mereka yang telah bekerja keras dan sebaliknya memberikan disinsentif bagi mereka yang gagal dalam melaksanakan pekerjaannya.
- ✚ Terkait dengan kegiatan pokmas UEP, ada baiknya usaha ekonomi yang dilakukan berkelompok lebih diutamakan daripada usaha yang dilakukan secara individu. Hal ini bertujuan agar dana yang digulirkan untuk usaha ekonomi bisa berjumlah lebih besar,

sehingga skala usaha juga menjadi lebih besar. Daripada meminjamkan dana dalam jumlah yang sedikit, misalnya Rp. 500.000,- kepada individu lebih baik mengumpulkannya untuk kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam suatu kelompok, sehingga modal usaha menjadi lebih besar. Dengan modal yang lebih besar, maka usaha yang dilakukan juga bisa lebih besar. Selain itu, dengan bekerja berkelompok juga terbangun kerjasama di antara sesama anggota pokmas dan semangat untuk berhasil juga menjadi lebih terpacu.

- ✚ Masing-masing pokmas COREMAP agar menggalakkan pelaksanaan berbagai kegiatan yang menjadi tanggungjawab mereka. Ini terutama untuk menghindari anggapan masyarakat bahwa pokmas COREMAP tidak melakukan kegiatan apa pun, sehingga masyarakat menjadi tidak tertarik untuk terlibat dalam program tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2006. *Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan : Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2005*. BPS Indonesia, Jakarta.
- BPS Kabupaten Pangkep. 2004. *Produk Domestik Bruto Regional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 1999-2003*. BPS Kabupaten Pangkep, Pangkajene.
- BPS Kabupaten Pangkep. 2007a. *Produk Domestik Bruto Regional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2000-2006*. BPS Kabupaten Pangkep, Pangkajene.
- BPS Kabupaten Pangkep. 2007b. *Kabupaten Pangkep Dalam Angka 2007*. BPS Kabupaten Pangkep, Pangkajene.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 2007. *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2006*, diunduh dari <http://sulsel.bps.go.id/> tanggal 1 November 2008.
- BPS & Bappeda Kabupaten Pangkep. 2006. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangkep 2006*. BPS Kabupaten Pangkep, Pangkajene.
- COREMAP II dan Eco-Natural Society. 2006. *Laporan Akhir Monitoring dan Evaluasi COREMAP II Kabupaten Pangkep*. Pangkajene.
- CRITC COREMAP II. 2007. *Monitoring Ekologi Pangkep*. Coral Reef Information and Training Center, Coral Reef Rehabilitation and Management Program, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- CV Melania Consultant. 2005. *Laporan Akhir Draft Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) Tingkat Desa Kabupaten Pangkep Sulsel*, CV Melania Consultant, Makassar.

- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2007. *Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK)*. Direktorat Jendral Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep. 2007. *Statistik Perikanan*.
- Noveria, Mita, dkk. 2008. *Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat di Lokasi COREMAP II. Kasus Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. LIPI Press, Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Pangkep. 2008. *Potensi Daerah*, diunduh dari [www.pangkep.go.id](http://www.pangkep.go.id) tanggal 20 Oktober 2008.
- Pet-Soede, C., H.S. J. Cesar, dan N. D J. S. Pet. 1999. "An economic Analysis of Blast Fishing on Indonesian Coral Reefs". *Environmental Conservation* Vol. 26 . Issu : 2 : p.83-93. Conservation and Community Investment Forum (CCIF) Publication.  
[http://www.cciforum.org/pdfs/Blast\\_Fishing.pdf](http://www.cciforum.org/pdfs/Blast_Fishing.pdf).
- Saharudin, S. 2006. *Analisis Ekonomi Regional Propinsi Sulawesi Selatan*, Vol. 3 No. 1.  
[http://www.pascaunhas.net/jurnal\\_pdf/an\\_3\\_1/02-Syahrulsaharuddin%20Oke.pdf](http://www.pascaunhas.net/jurnal_pdf/an_3_1/02-Syahrulsaharuddin%20Oke.pdf).
- UNDP. 1992. *Human Development Report 1992* UNDP, New York.
- Wahyudin, Y. 2002. *Budidaya Rumput Laut: Prospek Mata Pencaharian Alternatif di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan*. Indonesia Coastal Universities Network Edisi No. 02/ Th II.  
[http://www.komitmenku.files.wordpress.com/2008/05/20020413-incune-budidaya-rumput-laut\\_prospek-mpa-di-kabpangkep-sulsel.pdf](http://www.komitmenku.files.wordpress.com/2008/05/20020413-incune-budidaya-rumput-laut_prospek-mpa-di-kabpangkep-sulsel.pdf) -.
- World Bank. 2004. *Project Appraisal Document*.

## LAMPIRAN

### Lampiran Tabel 3.1

**Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Tentang Jenis Kegiatan Ekonomi COREMAP, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)**

<i>Jenis kegiatan ekonomi</i>	<i>Tahu</i>	<i>Tidak tahu</i>	Jumlah (N=122)
Pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang	19,8	80,2	100,0
Pemberian dana bergulir/kredit untuk mengembangkan UEP masyarakat	18,2	81,8	100,0
Pelatihan dan bimbingan keterampilan untuk meningkatkan usaha	9,2	90,8	100,0

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

**Lampiran Tabel 3.2**  
**Distribusi Responden yang Mengetahui Jenis Kegiatan Ekonomi COREMAP**  
**Menurut Sumber Informasi Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)**

<i>Jenis kegiatan ekonomi</i>	<i>Sumber informasi</i>					<i>Jumlah (N)</i>
	<i>Fasilitator/motivator/pengurus COREMAP</i>	<i>Kepala/aparat desa/dusun/kampung/RT/RW</i>	<i>Pimpinan informal di desa/pulau/kampung</i>	<i>Anggota masyarakat yang terlibat/turut serta dalam kegiatan COREMAP</i>	<i>Anggota masyarakat lainnya</i>	
<i>Pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang</i>	70,8	8,3	-	20,8	-	100,0 (24)
<i>Pemberian dana bergulir/kredit untuk mengembangkan UEP masyarakat</i>	77,3	-	-	18,2	4,5	100,0 (22)
<i>Pelatihan dan bimbingan keterampilan untuk meningkatkan usaha</i>	81,8	-	-	18,2	-	100,0 (11)

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

**Lampiran Tabel 3.3**  
**Distribusi Responden yang Mengetahui Jenis Kegiatan Ekonomi COREMAP dan Keterlibatannya Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)**

<i>Jenis kegiatan ekonomi</i>	<i>Terlibat</i>	<i>Tidak terlibat</i>	<i>Jumlah (N)</i>
<i>Pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang</i>	54,2	45,8	100,0 (24)
<i>Pemberian dana bergulir/kredit untuk mengembangkan UEP masyarakat</i>	72,7	27,3	100,0 (22)
<i>Pelatihan dan bimbingan keterampilan untuk meningkatkan usaha</i>	90,9	9,1	100,0 (11)

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

**Lampiran Tabel 3.4****Distribusi Responden yang Terlibat dalam Kegiatan Ekonomi Coremap Menurut Manfaat yang Dirasakan, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)**

<i>Jenis kegiatan ekonomi</i>	<i>Bermanfaat</i>	<i>Tidak bermanfaat</i>	<i>Jumlah (N)</i>
Pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang	84,6	15,4	100,0 (13)
Pemberian dana bergulir/kredit untuk mengembangkan UEP masyarakat	81,3	18,7	100,0 (16)
Pelatihan dan bimbingan keterampilan untuk meningkatkan usaha	80,0	20,0	100,0 (10)

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

**Lampiran Tabel 3.5.****Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Mengenai Jenis Usaha Ekonomi yang Pernah Dilakukan COREMAP, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)**

<i>Jenis usaha ekonomi</i>	<i>Tahu</i>	<i>Tidak tahu</i>	<i>Jumlah (N=29)</i>
Perdagangan/warung	10,3	89,7	100,0
Perikanan budidaya	10,3	89,7	100,0
Perikanan tangkap	24,1	75,9	100,0
Ternak	10,3	89,7	100,0
ayam/bebek/itik/kambing/dll.			
Pembuatan	10,3	89,7	100,0
makanan/kue/minyak kelapa			
Pengolahan hasil laut/ikan asin	10,3	89,7	100,0
Kerajinan/souvenir	10,3	89,7	100,0
Lainnya	6,9	93,1	100,0

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

**Lampiran Tabel 3.6**

**Distribusi Responden yang Mengetahui Jenis Usaha Ekonomi yang Pernah Dilakukan COREMAP Menurut Keterlibatannya, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)**

<i>Jenis usaha ekonomi</i>	<i>Terlibat</i>	<i>Tidak Terlibat</i>	<i>Jumlah (N)</i>
Perdagangan/warung	66,7	33,3	100,0 (3)
Perikanan budidaya	66,7	33,3	100,0 (3)
Perikanan tangkap	100,0	0,0	100,0 (7)
Ternak ayam/bebek/itik/kambing/dll.	66,7	33,3	100,0 (3)
Pembuatan makanan/kue/minyak kelapa	66,7	33,3	100,0 (3)
Pengolahan hasil laut/ikan asin	66,7	33,3	100,0 (3)
Kerajinan/souvenir	66,7	33,3	100,0 (3)
Lainnya	50,0	50,0	100,0 (2)

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

**Lampiran Tabel 3.7**

**Distribusi Responden yang Terlibat dalam Usaha Ekonomi yang Pernah Dilakukan COREMAP Menurut Manfaat yang Dirasakan, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)**

<i>Jenis usaha ekonomi</i>	<i>Bermanfaat</i>	<i>Tidak bermanfaat</i>	<i>Jumlah (N)</i>
Perdagangan/warung	100,0	0,0	100,0 (2)
Perikanan budidaya	100,0	0,0	100,0 (2)
Perikanan tangkap	100,0	0,0	100,0 (7)
Ternak ayam/bebek/itik/kambing/dll.	100,0	0,0	100,0 (2)
Pembuatan makanan/kue/minyak kelapa	100,0	0,0	100,0 (2)
Pengolahan hasil laut/ikan asin	100,0	0,0	100,0 (2)
Kerajinan/souvenir	100,0	0,0	100,0 (2)
Lainnya	100,0	0,0	100,0 (1)

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

**Lampiran Tabel 3.8**

**Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Tentang Jenis Kegiatan Ekonomi COREMAP, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%)**

<i>Jenis kegiatan ekonomi</i>	<i>Tahu</i>	<i>Tidak tahu</i>	Jumlah (N=120)
Pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang	41,7	58,3	100,0
Pemberian dana bergulir/kredit untuk mengembangkan UEP masyarakat	45,8	54,2	100,0
Pelatihan dan bimbingan keterampilan untuk meningkatkan usaha	30,8	69,2	100,0

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

**Lampiran Tabel 3.9**

**Distribusi Responden yang Mengetahui Jenis Kegiatan Ekonomi COREMAP Menurut Sumber Informasi, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%)**

<i>Jenis kegiatan ekonomi</i>	<i>Sumber informasi</i>					Jumlah (N)
	Fasilitator/ motivator/ pengurus COREMAP	Kepala/ aparap desa/ dusun/ kampung /RT/RW	Pimpinan informal di desa/ pulau/ka mpung	Anggota masyarakat yang terlibat /turut serta dalam kegiatan COREMAP	Anggota masyarak at lainnya	
Pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang	82,0	2,0	-	12,0	4,0	100,0 (50)
Pemberian dana bergulir/kredit untuk mengembangkan UEP masyarakat	80,0	3,6	-	14,5	1,8	100,0 (55)
Pelatihan dan bimbingan keterampilan untuk meningkatkan usaha	75,7	2,7	-	18,9	2,7	100,0 (37)

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

**Lampiran Tabel 3.10**  
**Distribusi Responden yang Mengetahui Jenis Kegiatan Ekonomi COREMAP dan Keterlibatannya, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%)**

<i>Jenis kegiatan ekonomi</i>	<i>Terlibat</i>	<i>Tidak terlibat</i>	Jumlah (N)
Pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang	38,0	62,0	100,0 (50)
Pemberian dana bergulir/kredit untuk mengembangkan UEP masyarakat	47,3	52,7	100,0 (55)
Pelatihan dan bimbingan keterampilan untuk meningkatkan usaha	45,9	54,1	100,0 (37)

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

**Lampiran Tabel 3.11**  
**Distribusi Responden yang Terlibat dalam Kegiatan Ekonomi Coremap Menurut Manfaat yang Dirasakan, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%)**

<i>Jenis kegiatan ekonomi</i>	<i>Bermanfaat</i>	<i>Tidak bermanfaat</i>	Jumlah (N)
Pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang	100,0	-	100,0 (19)
Pemberian dana bergulir/kredit untuk mengembangkan UEP masyarakat	100,0	-	100,0 (26)
Pelatihan dan bimbingan keterampilan untuk meningkatkan usaha	100,0	-	100,0 (17)

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

**Lampiran Tabel 3.12**

**Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Mengenai Jenis Usaha Ekonomi yang Pernah Dilakukan COREMAP, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%)**

<i>Jenis usaha ekonomi</i>	<i>Tahu</i>	<i>Tidak tahu</i>	<i>Jumlah (N=56)</i>
Perdagangan/warung	3,6	96,4	100,0
Perikanan budidaya	12,5	87,5	100,0
Perikanan tangkap	25,0	75,0	100,0
Ternak ayam/bebek/itik/kambing/dll.	1,8	98,2	100,0
Pembuatan makanan/kue/minyak kelapa	1,8	98,2	100,0
Pengolahan hasil laut/ikan asin	46,4	53,6	100,0
Kerajinan/souvenir	0,0	100,0	100,0
Lainnya	0,0	100,0	100,0

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

**Lampiran Tabel 3.13**

**Distribusi Responden yang Mengetahui Jenis Usaha Ekonomi yang Pernah Dilakukan COREMAP Menurut Keterlibatannya. Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%)**

<i>Jenis usaha ekonomi</i>	<i>Terlibat</i>	<i>Tidak Terlibat</i>	<i>Jumlah (N)</i>
Perdagangan/warung	0,0	100,0	100,0 (2)
Perikanan budidaya	42,9	57,1	100,0 (7)
Perikanan tangkap	50,0	50,0	100,0 (14)
Ternak ayam/bebek/itik/kambing/dll.	0,0	100,0	100,0 (1)
Pembuatan makanan/kue/minyak kelapa	100,0	0,0	100,0 (1)
Pengolahan hasil laut/ikan asin	84,6	15,4	100,0 (26)
Kerajinan/souvenir	-	-	100,0 (0)
Lainnya	-	-	100,0 (0)

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

**Lampiran Tabel 3.14**  
**Distribusi Responden yang Terlibat dalam Usaha Ekonomi yang Pernah Dilakukan COREMAP Menurut Manfaat yang Dirasakan, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%)**

<i>Jenis usaha ekonomi</i>	<i>Bermanfaat</i>	<i>Tidak bermanfaat</i>	<i>Jumlah (N)</i>
Perdagangan/warung	0,0	0,0	100,0 (0)
Perikanan budidaya	100,0	0,0	100,0 (3)
Perikanan tangkap	100,0	0,0	100,0 (7)
Ternak ayam/bebek/itik/kambing/dll.	-	-	100,0 (0)
Pembuatan makanan/kue/minyak kelapa	100,0	0,0	100,0 (1)
Pengolahan hasil laut/ikan asin	100,0	0,0	100,0 (22)
Kerajinan/souvenir	-	-	100,0 (0)
Lainnya	-	-	100,0 (0)

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.